

**PERAN STAKEHOLDER DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
LOKAL MELALUI INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)**

**(Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
Kota Kediri).**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

RISCHI AGUSTINA

105030113111002



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2014

DAFTAR ISI

MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kontribusi Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Administrasi Publik.....	18
B. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	19
C. Pengertian Otonomi Daerah.....	21
D. Pemberdayaan Masyarakat.....	22
E. Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah.....	25
F. Pengembangan Perekonomian Lokal.....	27

G. Pengertian Governance.....	28
H. Stakeholder	30
I. Peran Stakeholder dalam Mengembangkan IKM	32
J. Pengertian Industri Kecil dan Menengah.....	33
K. Pentingnya Pengembangan Industri	36
L. Bentuk Pengembangan Industri Kecil	38
M. Pengertian Kemitraan	40
N. Pola Kemitraan	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Fokus Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	50
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Instrumen Penelitian.....	54
G. Analisa Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	59
1. Gambaran Umum Kota Kediri.....	59
a) Visi dan Misi Kota Kediri	60
b) Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	62
c) Produk Unggulan	63
2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri.....	64
a) Visi dan Misi Disperindagtamben	64

b) Kedudukan, Tupoksi Disperindagtamben Kota Kediri (Peraturan Walikota No. 65 tahun 2008).....	65
c) Susunan Organisasi Disperindagtamben Kota Kediri.....	66
3. Gambaran Umum IKM (Industri Kecil dan Menengah) Kota Kediri	69
B. Penyajian Data	70
1. Peran <i>Stakeholder</i> dalam meningkatkan perekonomian lokal Kota Kediri melalui pemberdayaan IKM	70
a) Peran Pemerintah	70
b) Peran Swasta	75
c) Peran Masyarakat.....	80
2. Peningkatan perekonomian lokal	85
1) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha.....	85
2) Perluasan Peningkatan pendapatan.....	89
3) Keberdayaan lembaga usaha ‘mikro dan kecil’ dalam proses produksi dan pemasaran.....	90
4) Keberdayaan ‘kelembagaan jaringan kerja’ kemitraan antara pemerintah, usaha swasta dan masyarakat lokal.....	94
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran stakeholder dalam meningkatkan perekonomian Kota Kediri melalui IKM, yang meliputi:.....	95
a. Faktor pendukung	95
1) Pembinaan Melalui Pelatihan	95
2) Kualitas Produk	97
3) Adanya event kegiatan di Kediri	98
4) Kerjasama pameran dengan pihak swasta dan daerah lain	98
b. Faktor penghambat.....	99
1) Keterampilan Pegawai	100



2) Teknologi yang kurang	101
3) Faktor Cuaca	102
C. Analisa Data.....	103
1. Peran <i>Stakeholder</i> dalam meningkatkan perekonomian lokal Kota Kediri melalui pemberdayaan IKM	103
a) Peran Pemerintah	103
b) Peran Swasta.....	110
c) Peran Masyarakat.....	112
2. Peningkatan Perekonomian Lokal.....	117
1) Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha.....	117
2) Perluasan Peningkatan Pendapatan.....	119
3) Keberdayaan Lembaga Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Proses Produksi Dan Pemasaran.....	120
4) Keberdayaan Kelembagaan Jaringan Kerja Kemitraan Antara Pemerintah, Usaha Swasta Dan Masyarakat Lokal.....	122
3. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Kediri Melalui IKM.....	123
a. Faktor pendukung	123
b. Faktor penghambat	126
BAB V PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	137



MOTTO

BERANI JUJUR ITU HEBAT

(KPK)

KEBAHAGIAAN ITU KITA SENDIRI YANG MEMBUAT
TIDAK PERNAH ADA USAHA YANG SIA-SIA
COBAAN ITU ADA UNTUK KITA HADAPI BUKAN DIHINDARI
JANGAN PERNAH MENYERAH TERHADAP KEAADAAN

(Rischi agustina)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran *Stakeholder* Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri)

Disusun oleh : RISCHI AGUSTINA

NIM : 105030113111002

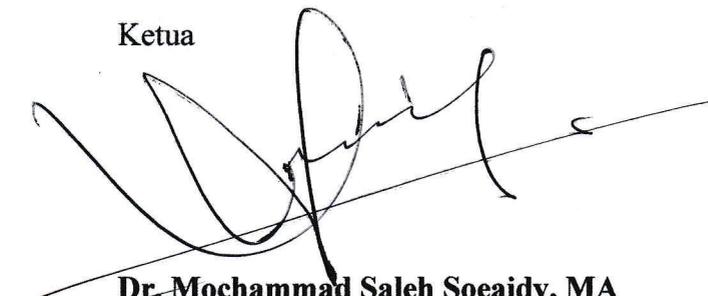
Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Malang, 22 April 2014

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Mochammad Saleh Soeaidy, MA
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 01 002

TANDA PENGESAHAN

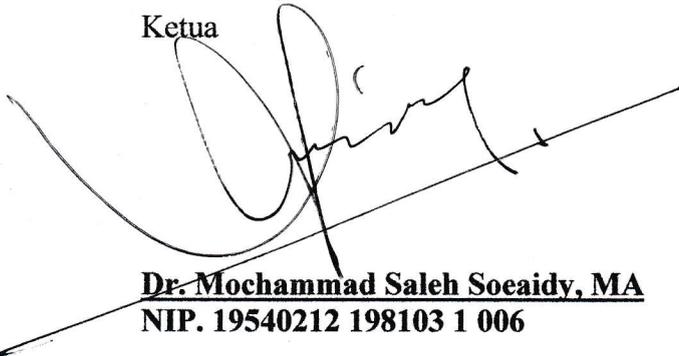
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juni 2014
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Rischi Agustina
Judul : Peran *Stakeholder* Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Studi pada Dinas Petindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Mochammad Saleh Soeaidy, MA
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



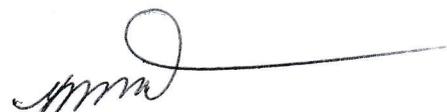
Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 01 002

Anggota



Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran *Stakeholder* Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Suherman dan Ibu Misiyem, selaku kedua orang tua peneliti.
2. Bapak Dr. Mochammad Saleh Soeaidy, MA, selaku ketua pembimbing skripsi.
3. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS, selaku anggota pembimbing skripsi
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi
7. Seluruh pegawai dan staff Disperindagtamben dan Direktur Yayasan Bina Mandiri dan HRD Hotel Grand Surya
8. Pemilik dan pegawai Industri Kecil Tenun Ikat ATBM Medali Mas, Tenun Ikat ATBM Kurniawan, Tahu Mikimos
9. Teman-teman FIA Publik, khususnya keluarga BABO (Devi, Febe, Tiwi, Rizka) yang sudah memberikan semangat tiada henti, dan teman seperjuangan dari SMA (Tischa, Dewi, Ummi, Qori, Novita, Kiki, Risky)
10. Keluarga besar peneliti yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
11. Dan semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 22 April 2014

Penulis.

RINGKASAN

Rischi Agustina, 2014, **Peran *Stakeholder* Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri**, Dr. Mochammad Saleh Soeaidy, MA., Drs. Heru Ribawanto, MS.

Untuk meningkatkan perekonomian Kota Kediri diperlukan adanya Industri Kecil dan Menengah (IKM) dimana IKM ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan perekonomian Kota Kediri yang sangat tergantung kepada industri besar seperti Gudang Garam. Oleh karena itu pemberdayaan IKM diperlukan dan untuk itu diperlukan peran dari *stakeholder* untuk mengembangkan IKM di Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan teori *Stakeholder*, Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya adalah peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal Kota Kediri melalui pemberdayaan IKM, yang meliputi peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pemberdayaan IKM untuk meningkatkan perekonomian Kota Kediri, selanjutnya peningkatkan perekonomian lokal yang dilihat dari perluasan kesempatan kerja dan berusaha, perluasan peningkatan pendapatan, keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran, dan keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Fokus yang kedua adalah faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian Kota Kediri melalui IKM. Lokasi penelitian Industri Kecil dan Menengah, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Situs penelitian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri, Industri Tenun Ikat ATBM Medali Mas dan Kurniawan, Industri Tahu Mikimos Kota Kediri. Sumber data terdiri dari data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan metode Miles dan Hubberman.

Penelitian ini membahas bagaimana peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan IKM. Peneliti membahas tentang bagaimana peran pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memberdayakan IKM, sinergi antara ketiga *stakeholder* dalam memberdayakan IKM sehingga mampu meningkatkan perekonomian lokal Kota Kediri. Kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa peran pemerintah dalam memberdayakan IKM kurang maksimal, dikarenakan saat ini pemerintah kurang berperan aktif dalam memberdayakan IKM. Peran swasta dalam dukungan keuangan sangat kurang dan swasta kurang berperan aktif dalam memberdayakan IKM, ada bentuk kemitraan keagenan antara swasta dan pelaku IKM. LSM memang sudah berperan namun kurang dapat dirasakan oleh pelaku IKM. Sinergi antartetiga *stakeholder* sangatlah kurang, mereka cenderung berjalan sendiri-sendiri, sehingga dalam memberdayakan IKM kurang maksimal, yang berdampak terhadap perekonomian lokal.

SUMMARY

Rischi Agustina, 2014, **Role of Stakeholders in Improving Local Economy Through Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Studies in the Department of Industry, Trade, Mining and Energy Kediri**, Dr. Mochammad Soeaidy Saleh, MA., Drs. Heru Ribawanto, MS.

To boost the economy is necessary to Kediri Industri Kecil dan Menengah (IKM). IKM which is one of the solutions to overcome the problems of Kediri economy highly dependent on industries such as Gudang Garam. It is therefore necessary empowerment of IKM and it is necessary for stakeholders to develop the role of IKM in Kediri.

This study uses Stakeholder theory, Community Empowerment, Partnership, and Industri Kecil dan Menengah (IKM). Researchers used a descriptive research method qualitative approach. The focus of his research is the role of stakeholders in improving the local economy through the empowerment of IKM Kediri, which includes the role of government, private sector, and communities in empowering IKM to boost the economy Kediri, further peningkatkan local economy as seen from the expansion of employment opportunities and strive, expansion increased revenue, empowerment of micro and small organizations in the process of production and marketing, and institutional empowerment working relations between government, private sector and local communities. The second focus is supporting and inhibiting factors increase the role of stakeholders in Kediri economy through IKM. Location of research Industri Kecil dan Menengah Kediri, District Mojoroto. Research sites of Departement of Industry, Trade, Mining and Energy Kediri, Industry tenun ikat Medali Mas and Kurniawan, Industry Tahu Mikimos Kediri. The data source consists of primary data and secondary data. The technique of collecting data through interviews, observation and documentation. Methods of analysis using the method of Miles and Hubberman.

This study discusses how the role of local stakeholders in improving perkonomian pemeberdayaan through HPI. Investigators discuss how the role of government, private sector and communities to empower IKM, synergies between the three stakeholders in IKM so as to empower the local economy to greater Kediri. The conclusion that can be drawn is that the government's role in empowering IKM less than the maximum, because the government is less active role in empowering IKM. The role of the private sector financial support is very less and less private sector plays an active role in empowering IKM, there is a form of partnership between the private agency and the perpetrator IKM. NGOs already play a role, but less can be perceived by the perpetrator IKM. Synergy between the third stakeholders is lacking, they tend to walk on their own, resulting in less than the maximum empower IKM, which have an impact on the local economy.

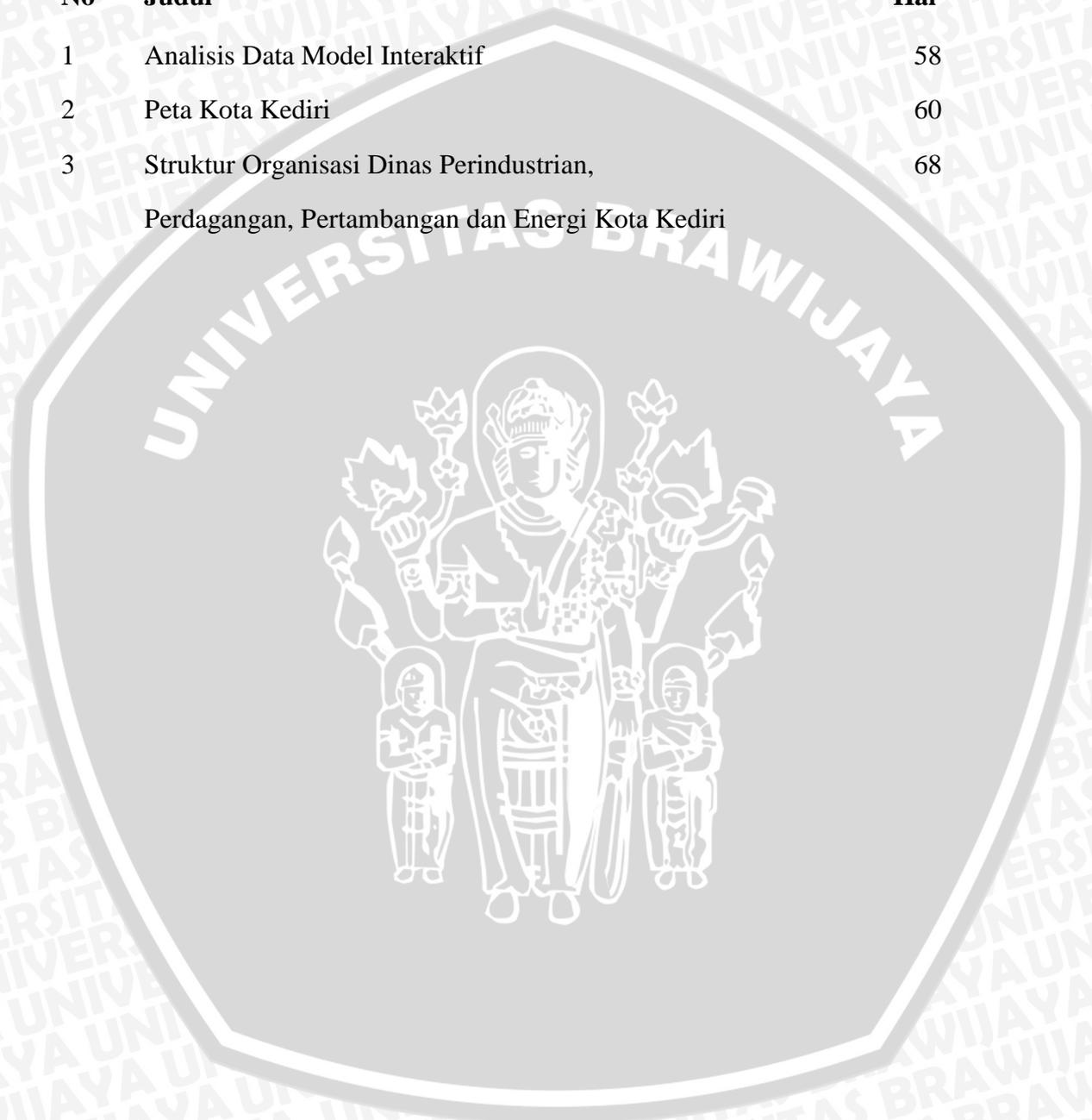
DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Kondisi Aktual Sektor Perindustrian di Kota Kediri Menurut Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Produksinya Tahun 2011-2012	6
2	Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat	24
3	Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Hasil Registrasi Peduduk Tahun 2012	63



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1	Analisis Data Model Interaktif	58
2	Peta Kota Kediri	60
3	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir semua bangsa di dunia menghendaki adanya otonomi, banyak negara bahkan telah melakukan perubahan struktur organisasi pemerintahan ke arah desentralisasi. Minat terhadap desentralisasi ini juga senada dengan kepentingan yang semakin besar dari berbagai badan pembangunan internasional (Conyers, 1983:97 dalam Muluk, 2009). Negara memerlukan otonomi, ketika ada kecenderungan berlangsungnya intervensi ekonomi maupun politis dari negara lain. Tetapi bukan negara saja, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota pada suatu negara juga memerlukan otonomi. Dalam batasan tertentu, mereka menginginkan atau menuntut untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan, menyelenggarakan kepentingan, dan mengatasi permasalahan publik masyarakat lokal, dengan intervensi yang kecil dari pemerintah pusat (Samodra dalam Dwiyanto, 2008:45).

Pada hakikatnya otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Suparmoko, 2002: 18). Banyak pihak yang menaruh harapan besar terhadap keberhasilan otonomi daerah terutama dalam mendorong terwujudnya *good governance*. Kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan serta penguatan fungsi dan peran legislatif di daerah diharapkan mampu memotivasi terjadinya perbaikan

kualitas proses kebijakan, dari formulasi sampai dengan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan menjadi lebih partisipatif, transparan, responsif, dan akuntabel terhadap semua *stakeholder* di daerah (Samodra dalam Dwiyanto, 2008: 62).

Salah satu wujud otonomi daerah adalah kewenangan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006: 3). Untuk mengembangkan perekonomian suatu daerah bisa melalui perindustrian, baik industri besar, menengah dan kecil.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perizinan Dibidang Perindustrian Dan Perdagangan, tujuan dari pembangunan industri adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup; meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya; memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri; meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa

melalui pengutamaan. Berdasarkan tujuan dari pembangunan industri menunjukkan betapa pentingnya peran industri bagi suatu negara.

Dalam rangka membangun masyarakat yang menyeluruh dari segi sosial ekonomi dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia memegang penyerapan tenaga kerja yang cukup besar yaitu 97,85% pada tahun 2010 (BPS, 2010). Jika IKM mendapat perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah daerah maka IKM juga dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli dan Daerah (PAD). Industri kecil yang ada di Indonesia diartikan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan. IKM bertujuan memproduksi barang dan jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta dan mempunyai nilai penjualan per tahun tidak lebih dari Rp 1 milyar. Sedang industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dengan nilai penjualan pertahun lebih dari Rp 50 milyar (UU RI No. 9 Tahun 1995). Batasan mengenai skala usaha menurut BPS yaitu berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu: industri kecil sebanyak 5-19 orang dan industri menengah sebanyak 20-99 orang (Prawirokusumo, 2010).

Adanya otonomi daerah, kota Kediri diharapkan mampu mengelola perekonomiannya sendiri. Dengan kedudukannya sebagai kawasan perkotaan yang sedang berkembang, di Kota Kediri terdapat banyak unit-unit usaha industri dengan skala usaha yang bervariasi, meliputi industri besar, menengah dan kecil.

Industri-industri besar yang ada di Kota Kediri bergerak di bidang industri gula dan rokok. Sedangkan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagian besar bergerak dalam produksi makanan serta pengolahan hasil pertanian. (Pemerintah Kota Kediri, 2013)

Berdasarkan hasil empirik yang dipaparkan oleh Awan Santoso, SE, MSc (Mubyarto Institute). Pertama, tingkat pengangguran terbuka (sebesar 14,4%), partisipasi warga dalam proses produksi daerah (31% bekerja di sektor jasa, dengan *share* PDRB hanya 1,1%, sebaliknya 4,1% di sektor pertanian dengan *share* senilai 0,2%). Ia menengarai belum layaknya struktur pekerjaan warga kota bagi kemanusiaan. Kedua, jumlah penduduk miskin sebanyak 45.000 orang (11.000KK) atau 17,3% dari total penduduk pada tahun 2009 sebanyak 260.000 orang. Dominasi sektor industri dengan serapan tenaga kerja yang belum kompatibel. Ketiga, tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap PT Gudang Garam yang sebesar Rp. 12,7 Trilyun atau setara 70,5% PDRB Kota Kediri. Kondisi ini beriringan dengan tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi pula, di mana DAU meliputi 71,3% APBD, DBHBP sebesar 6,8%, sedangkan PAD adalah sebesar 12,8%. Dalam hal ini perekonomian belum sepenuhnya mandiri dan di bawah pimpinan dan atau penilikan anggota-anggota masyarakat Kota Kediri. Keempat, kapasitas fiskal terbatas, di mana nilai APBD tahun 2009 sebesar Rp. 572,1 M sebesar 48,5% dialokasikan untuk belanja pegawai, 17,9% untuk belanja barang dan jasa, sedangkan untuk belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja modal sebesar 30,1%. Kelima, Jumlah koperasi 285 unit, hanya 185 unit (64,91%) yang menjalankan

usahanya, dari 185 unit tersebut yang masuk klasifikasi sehat hanya 100 unit (54,05%). Jumlah UMKM adalah sebanyak 14.125 unit; 7.622 atau 53,96% masuk kategori tangguh; dan hanya 47,35% berkategori mandiri (Mubyarto, 2010)

Dari data empirik diatas terlihat bahwa industri di kota Kediri sangat bergantung pada industri besar yakni PT. Gudang Garam yang menjadi salah satu penyumbang PDRB tertinggi serta industri yang menyerap tenaga kerja yang tinggi di kota Kediri. Hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat perekonomian lokal kota Kediri, jika hanya bergantung pada PT. Gudang Garam. Serta adanya ketergantungan yang besar terhadap Dana Alokasi Umum dari pusat, yang membuat kota Kediri yang memiliki hak otonom menjadi tidak mandiri.

Ketergantungan perekonomian Kota Kediri terhadap PT. Gudang Garam juga diperkuat dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang banyak dari PT. Gudang Garam. Hal tersebut dapat dilihat dalam klasifikasi subsektor industri nonmigas yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI, kondisi aktual sektor perindustrian di Kota Kediri menurut jumlah unit usaha, tenaga kerja dan nilai produksinya disajikan dalam tabel berikut menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri (Disperindagtamben):

Tabel 1

Kondisi Aktual Sektor Perindustrian Di Kota Kediri Menurut Jumlah Unit

Usaha, Tenaga Kerja Dan Nilai Produksinya Tahun 2011-2012

No.	Subsektor	Unit Usaha		Jumlah Tenaga Kerja (Orang)		Nilai Produksi (Rp)*	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	Industri Logam dan Mesin	122	126	1.231	1.268	21.316	21.955
2	Industri Kimia	18	19	139	143	10.461	10.775
3	Industri Aneka	79	82	860	894	256.561	264.258
4	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	60	62	41.630	42.879	5.187.913	5.343.550
5	Industri Makanan dan Minuman	179	186	1.716	1.785	51.492	53.552
6	Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	48	50	373	384	9.517	9.801
7	Industri Kertas dan Percetakan	57	59	299	307	10.297	10.606
J U M L A H		563	584	46.248	47.660	5.547.557	5.714.477

*) dalam juta

(Sumber : Disperindagtamben Kota Kediri, 2011-2012)

Berdasarkan klasifikasi di atas, diketahui bahwa subsektor industri hasil pertanian dan kehutanan menyerap jumlah tenaga kerja dan nilai produksi yang dominan jika dibandingkan dengan subsektor industri lainnya di Kota Kediri. Dalam hal ini, PT. Gudang Garam Tbk. sebagai salah satu industri pengolahan hasil tembakau terbesar di Indonesia memegang peranan yang cukup penting dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Kediri dan sekitarnya. Fakta ini akan menimbulkan masalah perekonomian Kediri jika suatu ketika PT. Gudang Garam memiliki permasalahan ekonomi. Permasalahan ini selain berdampak terhadap PAD kota Kediri, juga dapat berdampak terhadap tingkat pengangguran yang tinggi.

Todaro (2006:2) menyebutkan bahwa kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Pemerintah Kota Kediri telah mencanangkan Tri Bina Kota sebagai landasan pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, perdagangan serta jasa dan industri. Berdasarkan landasan tersebut, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk memajukan sektor perindustrian secara aktif dengan memperkuat daya dukung bagi pembangunan industri sebagai salah satu basis penguatan ekonomi lokal yang handal.

Pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian daerah, meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan daya tahan perekonomian daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta memanfaatkan keunggulan kompetitif dengan selalu memperhatikan dampaknya bagi stabilitas ekonomi rakyat Kota Kediri, sehingga sektor industri

yang dimiliki mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (kediri.go.id). Pengembangan industri ditekankan pada industri kecil menengah (IKM) dan industri rumah tangga melalui peningkatan dan pengembangan teknologi maupun manajemen secara terpadu. Disisi lain terus diupayakan penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal dan penyebaran pembangunan industri terutama dikawasan yang sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan pola tata ruang daerah. Berry, Rodriquez & Sandeem, 2001 dalam Lestari (2010:147) menyebutkan ada tiga alasan mengapa keberadaan IKM sangat diperlukan.

“Ada tiga alasan mengapa keberadaan IKM sangat diperlukan, Pertama, kinerja IKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, IKM sering meningkatkan produktivitasnya melalui investasi dan aktif mengikuti perubahan teknologi. Ketiga, IKM diyakini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dibandingkan usaha besar”

Berdasarkan pendapat Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian , Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri, Industri kecil menengah di Kota Kediri ada sejak tahun 1984, pertumbuhan IKM di Kota Kediri cenderung signifikan, terbukti saat krisis moneter tahun 1998 melanda Indonesia IKM di Kediri masih menunjukkan eksistensinya sekitar 2% pertumbuhannya. Sedangkan daerah lain mengalami penurunan hingga minus. Hingga saat ini jumlah unit usaha formal di Kota Kediri sebanyak 560 unit usaha, sedangkan yang non formal sekitar 1.300 unit usaha. IKM merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan perekonomian suatu negara dan daerah.

Usaha-usaha untuk meningkatkan daya saing IKM perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kenyataan

mengatakan bahwa suatu perekonomian yang didukung oleh keberadaan IKM terbukti tahan terhadap guncangan-guncangan yang mengganggu stabilitas perekonomian. Pada beberapa negara maju seperti Jepang dan Italia, perhatian pemerintah terhadap keberadaan IKM sangat besar. Dukungan yang diberikan pemerintah terhadap IKM terbukti memperkuat sistem perekonomian mereka. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya pengaruh krisis ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut (Lestari, 2010:148).

IKM perlu dikembangkan di Kota Kediri karena untuk mengantisipasi permasalahan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh industri besar (Gudang Garam) dimana perekonomian dan penyerapan tenaga kota Kediri sangat bergantung dengan industri besar. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini banyak regulasi yang dibuat cenderung menekan perusahaan rokok, karena rokok sendiri memiliki dampak bukan hanya bagi perokok aktif tapi juga perokok pasif. Hal ini yang masih menjadi perdebatan, tentang posisi pabrik rokok itu sendiri. Dan pemerintah kota Kediri harus pandai mencari alternatif untuk meningkatkan perekonomian dan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap industri besar, dengan mengembangkan program IKM di Kota Kediri. IKM sendiri berdiri sejak tahun 1984 tapi sampai detik ini masih sangat terlihat bahwa perekonomian Kota Kediri masih bergantung dengan industri besar.

Ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi IKM di Indonesia yaitu kelemahan-kelemahan IKM di Indonesia yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan IKM. Permasalahan permodalan, manajemen usaha, dan kontiyuitas bahan baku merupakan permasalahan yang harus diperhatikan oleh

pemerintah, sehingga permasalahan itu dapat diatasi dan IKM di Indonesia juga semakin berkembang. Karena saat ini jumlah IKM di Indonesia sudah banyak dan perlu diperhatikan dan dibina sehingga dapat memberikan manfaat yang positif bagi perekonomian di Indonesia. Pendapat tersebut diperkuat oleh Gati dalam Saptowalyono (2013), yang menjelaskan bahwa:

"IKM di Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan, antara lain dalam mengakses modal kerja atau unit usaha dan hak kekayaan intelektual atau paten. Kelemahan juga dialami IKM dalam hal manajemen usaha atau administrasi pembukuan, serta kontinuitas bahan baku. Terkait penguatan IKM, Gati mengatakan bahwa langkah pemerintah antara lain melalui pelatihan calon wirausaha baru IKM. Ada 2.362 wirausaha baru IKM yang dibina hingga triwulan IV tahun 2012. Pembinaan IKM juga ditempuh melalui pendekatan *one village one product* di 127 sentra yang terdapat di 114 kabupaten/kota di Indonesia"

Kelemahan IKM di Indonesia dapat diatasi dengan pembinaan IKM salah satu cara yang dapat ditempuh adalah *one village one product (OVOP)*, tujuan dari OVOP tersebut adalah mengangkat citra produk budaya lokal menjadi produk yang memiliki daya saing global, sehingga setiap daerah memiliki produk unggulannya yang dapat mengembangkan IKM, dan meningkatkan perekonomian lokal. Dalam rangka menyongsong otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mempunyai produk unggulan yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Hal inilah yang masih dikembangkan Pemkot Kediri dalam rangka menciptakan produk unggulan yang berkualitas melalui pengembangan IKM. Dalam usaha pembangunan sektor industri, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan program pengembangan industri. Program pengembangan industri adalah untuk mengembangkan usaha industri dan meningkatkan kapasitas produksinya, khususnya bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta keanekaragaman usaha

produksi, sehingga muncul banyak variasi produk yang bisa dijual ke pasar lokal maupun regional.

Pengembangan IKM selalu diupayakan oleh pemerintah Kota Kediri, dalam rangka menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan mengembangkan produk-produk yang akan diproduksi, serta untuk meningkatkan pertumbuhan IKM di Kota Kediri agar tetap stabil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak D, selaku Kepala bidang industri Disperindagtamben pada Selasa, 8 Oktober 2013, menyebutkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan IKM di Kota Kediri, yaitu:

- “1. Segi Pemasaran, IKM di Kota Kediri mengalami kendala dari segi pemasaran dikarenakan pengusaha itu sendiri yang masih memiliki kemampuan yang rendah dalam segi pemasaran. Jangkauan pemasaran produk IKM Kota Kediri yakni skala lokal dan nasional. Sebenarnya kesempatan menembus pasar internasional juga sudah didapat dengan mudah oleh IKM di Kediri, tapi lagi-lagi terdapat kendala yang dihadapi oleh pengusaha IKM untuk memenuhi target yang diberikan oleh pasar internasional. Seperti manajemen lemah dimana waktu dan target jumlah produksi yang diharapkan pasar internasional tidak dapat dipenuhi oleh pelaku IKM sehingga terlepaslah kerjasama dengan pasar internasional.
2. Banyak industri informal di Kota Kediri, IKM sudah diberi kemudahan dalam bentuk perizinan, tapi faktanya masih saja banyak industri yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat.
3. Kurangnya kesadaran dari pelaku IKM tentang pentingnya arti promosi. Pelaku IKM sulit diajak untuk mengikuti pameran. Tujuan dari pameran sendiri sebenarnya ada dua yakni berjualan dan mengenalkan produk terhadap masyarakat luas”

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas masalah terbesar adalah kesadaran masyarakat yang masih lemah dalam berwirausaha serta peran *stakeholder* yang masih kurang. Meski pembinaan sudah dilakukan, kemudahan-kemudahan dalam mengembangkan industri sudah diberikan, tapi tetap saja

pengusaha IKM masih lemah dalam berwirusaha. Memang sulit mengubah cara berfikir seseorang, kecenderungan masyarakat Kediri adalah bertani sangat sulit mengubah menjadi masyarakat industri. Permasalahan ini hendaknya bukanlah dijadikan alasan untuk melemahkan IKM di Kediri, tapi dijadikan salah satu pendorong untuk menguatkan IKM di Kediri.

Untuk mewujudkan peningkatan perekonomian melalui IKM keterlibatan *stakeholder* sangat diperlukan. Dalam konsep *governance* paling dasar, disebutkan ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (Hetifah, 2009:29).

Kerjasama dengan *stakeholder* selalu diupayakan untuk mengembangkan IKM di Kota Kediri. Kerjasama dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri dengan daerah lain, lembaga swadaya masyarakat yaitu Yayasan Bina Negeri sebagai Klinik UMKM, dan pihak *swasta* seperti Hotel Grand Surya Kota Kediri, dan kerjasama dengan agen. Peran aktif pemerintah dalam meningkatkan IKM adalah memfasilitasi dan memberikan bantuan-bantuan pelatihan, menggali potensi dengan mengembangkan produk, melakukan pembinaan, pengawasan dari produksi sampai pemasaran, menumbuhkan industri dan menciptakan kondisi

yang kondusif. Menjalin kerjasama dengan daerah lain dan memfasilitasi untuk melakukan pameran, menjalin kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dari pengusaha agar lebih paham tentang teknologi. Serta kemudahan dalam mendapatkan standarisasi atau sertifikasi produk.

Pihak swasta juga memiliki peran yang penting dalam pengembangan IKM, seperti Bank Jatim atau Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) yang bekerjasama dengan pemerintah dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada IKM untuk mendapatkan pinjaman. Selain LKP kerjasama dengan swasta juga dilakukan oleh Hotel Grand Surya dalam rangka kemitraan. Serta kerjasama dengan agen-agen toko dalam program kemitraan. Selain pemerintah dan swasta kerjasama juga dilakukan dengan masyarakat dalam hal ini kita sebut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) /Akademisi juga memiliki peranan dalam meningkatkan IKM di Kota Kediri. LSM yang bekerjasama dengan IKM Kota Kediri adalah Yayasan Bina Negeri yang memiliki peran untuk penciptaan teknologi baru untuk meningkatkan kapasitas produksi dan juga efisiensi. Selain itu juga perlunya bimbingan dan penyuluhan manajemen produksi, manajemen keuangan dan penanganan limbah. Namun, kerjasama antara *stakeholder* dalam mengembangkan IKM kurang berjalan sesuai dengan harapan, mereka cenderung memiliki perannya masing-masing.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, untuk mewujudkan penguatan IKM yang dapat meningkatkan perekonomian lokal dibutuhkan kerjasama antar *stakeholder* melalui program-program pembinaan IKM. Hal ini

sejalan dengan konsep *governance* dalam mewujudkan peningkatan perekonomian lokal diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak agar pemberdayaan IKM terlaksana sesuai dengan harapan. Dengan adanya keterlibatan *stakeholder* dalam hal ini akankah mampu memberikan dampak yang positif untuk keberlangsungan pemberdayaan IKM dalam meningkatkan perekonomian lokal kota Kediri. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti mengambil judul **Peran *Stakeholder* dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal melalui Industri Kecil Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri).**

B. Rumusan Masalah

Berawal dari pentingnya peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal kota Kediri melalui Industri Kecil dan Menengah, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal kota Kediri melalui Industri Kecil dan Menengah?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal Kota Kediri melalui Industri Kecil dan Menengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah diatas adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal kota Kediri melalui Industri Kecil dan Menengah.

2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor penghambat dan pendukung peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal kota Kediri melalui Industri Kecil dan Menengah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi sektor-sektor yang terlibat terutama sektor industri kecil dan menengah, sektor swasta dan pemerintah daerah setempat yang nantinya dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk melihat dan menilai hasil pendayagunaan dalam rangka mengembangkan budaya organisasi yang ada dan sebagai acuan bagi pembinaan lebih lanjut.

2. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan masukan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

3. Bagi Peneliti Sendiri

Sebagai sarana untuk melatih diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir ilmiah dan logis.

4. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi bagi para peneliti yang berminat meneliti permasalahan disekitar IKM yang berkaitan dengan peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam pembahasan sehingga lebih terarah dan sistematis maka dalam skripsi ini disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang pembahasan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Merupakan uraian teori-teori atau landasan atau tinjauan beberapa pengertian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai pertumbuhan ekonomi dan peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal yang berkaitan dengan pemberdayaan IKM.

BAB III METODE PENELITIAN

Mengemukakan jenis penelitian yang digunakan yang terdiri dari fokus penelitian, pemilihan lokasi, dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

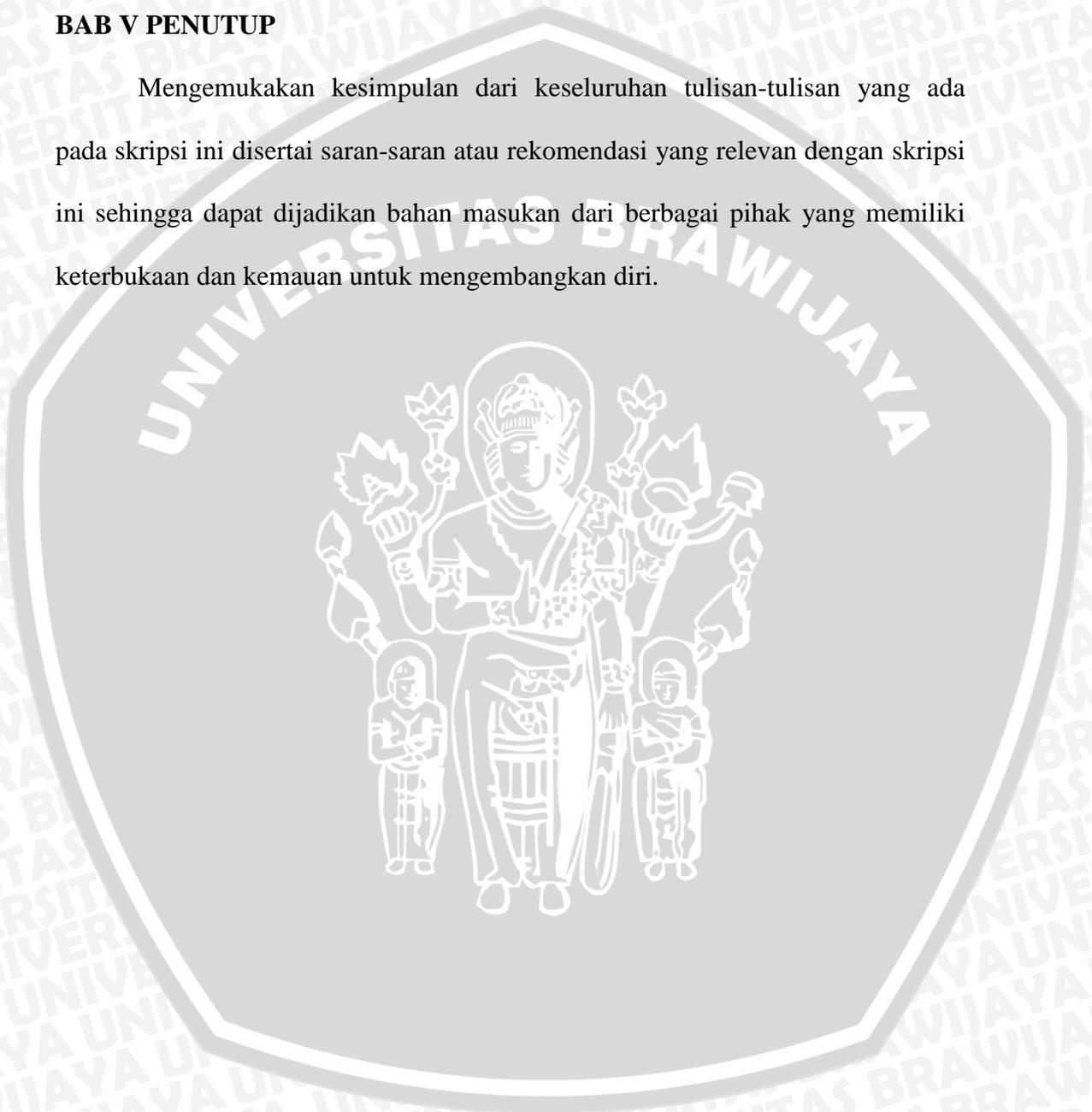
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang gambaran umum Kota Kediri, beserta keunggulannya di Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mojoroto, serta data-data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian tentang beberapa masalah dan

fokus penelitian. Selanjutnya data yang telah diolah akan dianalisis, analisis dari data tersebut disusun sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan tulisan-tulisan yang ada pada skripsi ini disertai saran-saran atau rekomendasi yang relevan dengan skripsi ini sehingga dapat dijadikan bahan masukan dari berbagai pihak yang memiliki keterbukaan dan kemauan untuk mengembangkan diri.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Administrasi Publik

Pengertian administrasi adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian administrasi publik sendiri menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam Indradi (2006:115) menyebutkan bahwa administrasi publik itu adalah :

- a. Usaha kelompok bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik;
- b. Meliputi seluruh tiga cabang pemerintahan: eksekutif, yudikatif, legislatif, serta pertalian diantara ketiganya;
- c. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan publik (*public policy*) dan merupakan bagian proses politik;
- d. Berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Amat berbeda dengan administrasi privat;

Kerjasama antara dua orang atau lebih dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan suatu negara. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...” Memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan dari negara Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan

administrasi publik yang merupakan sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga merupakan alat untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pelayanan dan kesejahteraan yang diberikan suatu negara kepada masyarakat diberikan melalui pembangunan, untuk mewujudkan tujuan pembangunan suatu negara diperlukan administrasi pembangunan.

B. Pengertian Administrasi Pembangunan

Dalam perkembangannya administrasi publik sangat berkaitan dengan administrasi pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan suatu negara. Administrasi pembangunan adalah administrasi publik yang mendukung usaha-usaha dalam memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan. Berdasarkan pendapat Kartasmita (1996:9) administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Sedangkan Siagian (2008:4) mendefinisikan pengertian administrasi pembangunan sebagai berikut,

“Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Secara umum yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Jadi definisi dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir”

Dalam mewujudkan tujuan akhir suatu negara dalam administrasi pembangunan tidak pernah terlepas dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak (Irawan dan Suparmoko, 2002: 8-9). Pembangunan ekonomi menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian disamping kenaikan output. Jadi pada umumnya pembangunan selalu disertai pertumbuhan. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006:9).

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan kualitas manusia. Salah satu cara untuk pembangunan masyarakat seutuhnya baik di bidang politik, sosial dan ekonomi adalah melalui pemberdayaan. Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan kemampuan dalam menganalisa potensi yang ada, pembangunan ekonomi saat ini bukan hanya ditentukan oleh negara saja tapi juga daerah. Dengan adanya kewenangan daerah untuk mengelola potensi yang dimilikinya, maka akan mempermudah dalam memberdayakan masyarakat. Kewenangan daerah untuk mengelola daerahnya sendiri disebut otonomi daerah.

C. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Suparmoko, 2002:18). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas pada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Prinsip otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 adalah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerjasama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Dengan undang-undang otonomi daerah itu berarti bahwa ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi. Tujuan desentralisasi adalah mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah,

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan PAD dengan maksud agar subsidi dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban APBN (Suparmoko, 2002:16). Untuk mendorong adanya pembangunan daerah diperlukan adanya sumber daya manusia (masyarakat), masyarakat merupakan faktor utama dalam pembangunan oleh karena itu pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembangunan antara lain kemampuan, kebersamaan, kekuasaan pemberdayaan (*empowerment*), ketahanan kemandirian dan saling ketergantungan. Menurut Mubyarto (1993) pemberdayaan lebih berupa tindakan-tindakan yang konkrit yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan. Jika dikaji secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berlandaskan pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kemampuan/kekuatan dan atau proses pemberian daya/kemampuan/kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

“Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan resultante dari kegagalan arus utama model pengembangan ekonomi yang berupa ketidakmampuan memecahkan masalah kemiskinan dan keberlangsungan lingkungan,

sehingga membutuhkan sebuah alternatif pembangunan yang lain. Alternatif pembangunan tersebut harus dipusatkan pada manusia dan lingkungan daripada produksi, laba dan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan asumsi-asumsi perusahaan sebagai dasar ekonomi neoklasik. Oleh karena itu, model alternatif pembangunan yang mampu memberdayakan manusia tersebut harus didasarkan pada lingkungan kehidupan sosial dari sudut pandang mikro yaitu aspek kerumah tanggaan” (Friedman, 1992 dalam Suryono, 2010:260-261).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh seseorang semakin baik pula kemampuan berpartisipasinya (Hikmat, 2010).

Aktor-aktor dalam pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuannya, aktor-aktor tersebut yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sulistiyani (2004:97) merancang peran ketiga aktor tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 2

Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat

No	Aktor	Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat	Bentuk Output Peran
1	Pemerintah	Formulasi dan penetapan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi serta mediasi	Berbagai macam kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, penetapan indikator, pembuatan juklak, penyelesaian sengketa
2	Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan dan pemeliharaan
3	Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Saran, kritik, input, partisipasi, menghidupkan fungsisosial control, menjadi objek

Sumber: Sulistiyani (2004)

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat diatas, bahwa pemberdayaan masyarakat itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan meningkatkan kualitas SDM itu sendiri diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang terbaik disuatu negara ataupun daerah. Dalam konsep otonomi daerah saat ini, daerah memiliki hak atau

kewenangan untuk mengatur pembangunannya sendiri dan untuk meningkatkan perekonomiannya melalui peningkatan PAD, dengan memanfaatkan potensi yang ada didaerahnya melalui aspirasi masyarakat.

E. Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Apabila perekonomian daerah menjadi semakin maju, maka akan semakin banyak macam objek pajak yang dapat di kenai pajak maupun retribusi daerah. Dengan kata lain agar PAD yang berupa pajak dan retribusi daerah dapat meningkat, mau tidak mau perekonomian daerah yang bersangkutan harus didorong agar dapat berkembang dengan pesat. Perkembangan perekonomian daerah dapat terjadi karena peningkatan produktivitas dan pendapatan pada kegiatan ekonomi yang sudah ada (*intensifikasi*), tetapi dapat pula karena peningkatan produktivitas dan pendapatan sebagai akibat munculnya kegiatan usaha yang baru (*ekstensifikasi*), atau pula dapat terjadi ada perkembangan secara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Suparmoko (2002:99-100) menjelaskan tentang strategi pengembangan potensi yang ada didaerah, langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3. Selanjutnya mengidentifikasi sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumber daya manusianya dan yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.

4. Dengan menggunakan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan subsektor, maka akan ditemukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
5. Akhirnya menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang akan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh hingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Adanya strategi pengembangan potensi yang ada di daerah dapat berdampak terhadap pengembangan sektor-sektor yang ada di daerah tersebut sehingga mampu meningkatkan perekonomian di daerah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara yang dijelaskan oleh Irawan dan Suparmoko (2002:5-6), bahwasannya faktor-faktor tersebut yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi (seperti sistem hukum, pendidikan, kesehatan, agama, pemerintahan dan lain sebagainya).

Sejalan dengan tujuan pengembangan potensi daerah yakni potensi daerah dapat meningkatkan pengembangan ekonomi lokal. Dimana pengembangan ekonomi lokal ini dapat meningkatkan PAD dan kemandirian dari suatu daerah. Dan dengan pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat merangsang investasi dan munculnya industri-industri baru yang berwawasan kewirausahaan.

F. Pengembangan Perekonomian Lokal

Pengembangan perekonomian lokal merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994 dalam Susanti, :33). *Local economic development* sebagai model, menekankan pada bagaimana merumuskan *endogeneous development* atau pembangunan yang didasarkan pada kemampuan lokal yang semakin berkembang. Dengan sebanyak mungkin menggunakan aspek lokalitas dalam pembangunan, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan kelembagaan.

Indikator yang sering digunakan adalah besarnya kesempatan kerja di daerah tersebut. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan ekonomi lokal adalah sumber daya alam, tenaga kerja, modal investasi, skala ekonomis, pasar, situasi ekonomi, kemampuan pemerintah pusat dan daerah, serta situasi yang kondusif. Pengembangan ekonomi lokal (PEL) yang mendasari konsepnya pada pengembangan kewirausahaan lokal serta tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan lokal, kerja sama pemerintah lokal dengan swasta dan lembaga-lembaga lainnya dalam mengelola sumber-sumber yang potensial untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Supriyadi (2007:108-109) menjelaskan bahwa PEL bertujuan memberdayakan orang-orang lokal, pemerintah lokal, dan industri-industri lokal. Berdasarkan tujuan PEL tersebut maka keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

1. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan berusaha.
2. Perluasan kesempatan bagi si miskin untuk meningkatkan pendapatan
3. Keberdayaan lembaga usaha ‘mikro dan kecil’ dalam proses produksi dan pemasaran
4. Keberdayaan ‘kelembagaan jaringan kerja’ kemitraan antara pemerintah, usaha swasta dan masyarakat lokal.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan ekonomi lokal dan kerjasama dari berbagai aktor untuk mendorong aktivitas ekonomi, hal ini memperlihatkan bahwa dalam pengembangan ekonomi lokal diperlukan peran-peran dari aktor-aktor yang terlibat. Untuk mengembangkan ekonomi lokal tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, tetapi juga diperlukan adanya lembaga yang terlatih untuk mengelola sumber daya manusia yang sudah maju, dan memerlukan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan lembaga ekonomi lokal tersebut berkembang. Pengembangan ekonomi lokal juga memerlukan kerjasama antara aktor-aktor yang terlibat. Aktor-aktor ini disebut *stakeholder* yang memiliki kepentingan atau dengan kata lain pemangku kepentingan. *Stakeholder* terlahir karena adanya konsep *governance*, *governance* lahir karena adanya otonomi daerah yang diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintah dalam otonomi daerah.

G. Pengertian Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah

sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut (Hetifah, 2009:1-2).

Governance menurut definisi dari UNDP dalam Sedarmayanti (2003:4-5) adalah “*the exercise of political, economic, administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*” yang artinya adalah pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, administrasi untuk mengelola urusan suatu negara melalui semua tingkatan. Berdasarkan definisi ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu:

1. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty, dan quality of live*.
2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Institusi dari *governance* meliputi 3 domain, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Negara, sebagai satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor informal lain di pasar, sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu

sendiri. Masyarakat (*society*) terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun informal. *Society* meliputi lembaga swadaya masyarakat organisasi profesi dan lain-lain. Wujud *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid & bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

H. Stakeholder

Stakeholder adalah individu atau kelompok organisasi perempuan dan laki-laki yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan. Ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (Hetifah, 2009:29).

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Kuncoro (2006:8) bahwasannya *stakeholder* adalah semua individu, kelompok dan organisasi yang mempunyai kepentingan (*stake*) pada kinerja organisasi, termasuk pemilik (pemegang saham pada perusahaan publik), karyawan, pemasok, masyarakat umum, dan lain-lain. *stakeholder* juga dapat diartikan sebagai individu atau kelompok, baik didalam

maupun diluar perusahaan, yang mempunyai kepentingan terhadap hidup dan matinya perusahaan dan sekaligus dapat mempengaruhi kinerja organisasi.

Dengan kata lain *stakeholder* adalah pemegang kepentingan.

Sedangkan dalam UNDP para stakeholder yang berperan sebagai pelaku *good governance* yaitu:

1. Negara atau Pemerintah (*government*)

- a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
- b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- c. Menyediakan publik servis yang efektif dan *accountable*
- d. Menegakkan hak asasi manusia
- e. Melindungi lingkungan hidup
- f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

2. Sektor Privat (*privat sector*)

- a. Menjalankan industri
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Menyediakan insentif bagi pegawai
- d. Meningkatkan standar hidup masyarakat
- e. Memelihara lingkungan hidup
- f. Menaati peraturan
- g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
- h. Menyediakan kartu kredit bagi pengembangan UKM atau IKM

3. Masyarakat Madani (*civil society*)

- a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
- b. Mempengaruhi kebijakan publik
- c. Sebagai sarana *chek and balance* pemerintah

- d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
- e. Mengembangkan sumber daya manusia
- f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. (Sinambela, 2006),

Dalam penelitian ini pemerintah adalah Disperindagtamben berperan dalam menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dengan membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan publik demi mensejahterakan masyarakat. Sedangkan sektor swasta dalam penelitian ini adalah Hotel Grand Surya Kota Kediri yang memiliki hubungan kerjasama dengan IKM Kota Kediri, selain itu juga terdapat agen (toko-toko) yang menjadi agen pelaku IKM untuk mendistribusikan barangnya. Masyarakat dalam penelitian ini adalah LSM yaitu Yayasan Bina Negeri dimana peran mereka adalah penciptaan teknologi baru untuk meningkatkan kapasitas produksi dan juga efisiensi. Selain itu juga perlunya bimbingan dan penyuluhan manajemen produksi, manajemen keuangan dan penanganan limbah pada proses pembuatan produk di daerah penelitian.

I. Peran Stakeholder dalam Mengembangkan IKM

Peran *stakeholder* didalam mengembangkan IKM sangat diharapkan, seperti yang disampaikan Euis Saedah (Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian RI) menyampaikan bahwa peran *stakeholder* dalam mengembangkan IKM yaitu:

- a. Pemerintah, peran pemerintah dalam mengembangkan IKM meliputi:
 - 1) Pengembangan Produksi meliputi Arahan Pengembangan Mutu, Arahan Pengembangan Manajemen, Dukungan Terhadap Kegiatan *Research (R) & Development (D)*, Jasa Pengujian Mutu dan HKI, Layanan Teknologi (Balai Litbang, UPT).
 - 2) Pengembangan Pemasaran yaitu Pelayanan informasi dan promosi serta fasilitasi pameran / temu bisnis.

- 3) Fasilitasi Keuangan memberikan Skim kredit yang mendukung
 - 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan (sistim kelas maupun magang dan studi banding).
 - 5) Pengembangan Teknologi melauai Penguatan lembaga pembina/pendukung teknologi (unit pelayanan teknis) di daerah dan Bantuan sertifikasi (ISO 9000 dan ISO/TS 16949) atau standar terpilih lainnya.
- b. Asosiasi berperan dalam Menyediakan Informasi Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Promosi / Pameran / Temu Bisnis, Dukungan Untuk Kontak Bisnis.
 - c. Perusahaan Produsen IKM berperan dalam Pengembangan produksi, Pengembangan sumber daya manusia, Pengembangan pemasaran, Memperkuat aspek permodalan, Pengembangan organisasi dan manajemen.
 - d. Perusahaan *Assembler* memiliki peran dalam Membuka peluang pesanan, Memberikan arahan teknis dan manajemen, Dukungan keuangan, Pelatihan, Pembinaan ke IKM bersama dengan Sub Kontraktor, Penyediaan Informasi dan Peluang Usaha, Dukungan terhadap Pemasaran

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat didalam pembangunan ekonomi suatu daerah, sangat diperlukan program pemberdayaan yang mampu meningkatkan perekonomian suatu daerah dengan melibatkan *stakeholder*. Di Kota Kediri terdapat program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di kota Kediri. Dengan melibatkan *stakeholder* diharapkan tujuan dari pembangunan di kota Kediri dapat terwujud. Program pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu Industri Kecil dan Menengah (IKM).

J. Pengertian Industri Kecil dan Menengah

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, atau bahan setengah jadi bahan yang lebih tinggi untuk penggunaanya, termasuk kegiatan merancang bangun dan perekayasaan industri. Sementara pengertian industri

dalam kamus bahasa indonesia berarti perusahaan atau pabrik yang menghasilkan barang-barang. Dari pengertian diatas industri merupakan pabrik atau perusahaan yang mengolah bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi menjadi sesuatu yang bermanfaat (barang) dan memiliki daya jual dan daya guna yang sangat tinggi.

Pertumbuhan Industri Besar dan Menengah sangat cepat sejak tahun 1970-an melampaui pertumbuhan Industri Kecil dan Rumah Tangga. Meski demikian Industri Kecil dan Rumah Tangga memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan jumlah perusahaan, dan menopang pendapatan rumah tangga. Menurut BPS, Industri Besar adalah perusahaan dengan lebih dari 99 pekerja, industri menengah merupakan perusahaan dengan tenaga kerja 20-99 pekerja, industri kecil didefinisikan sebagai perusahaan yang mengkaryakan 5-19 pekerja, dan industri rumah tangga didefinisikan sebagai perusahaan yang memperkerjakan kurang dari 5 pekerja (Kuncoro, 2006:32).

Dalam PERDA Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2011, batasan industri kecil didefinisikan sebagai berikut:

“Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar Rp. 1 Milyar atau kurang”.

Industri kecil selama ini masih mengalami kekaburan definisi dan batasan dikalangan masyarakat. Sementara acuan dan penggolongan yang biasanya dipakai adalah menekankan pada aspek jumlah tenaga kerja dan modal. Berdasarkan definisi dan batasan yang dipaparkan diatas, bahwa industri kecil

adalah usaha perorangan atau rumah tangga maupun badan yang memiliki tenaga kerja antara 5 sampai 9 orang, mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta dan nilai penjualan pertahun Rp. 1 Milyar atau kurang.

Untuk mempertegas definisi tentang industri kecil di Indonesia, Saleh (1986) menjelaskan terdapat tiga industri kecil yaitu:

“a. Industri lokal, yaitu kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pasar setempat yang terbatas, secara relatif tersebar dari segi lokasinya. Skala usahanya sangat kecil dan mencerminkan pola perusahaan yang bersifat subsistem. Target pemasaran sangat terbatas, sehingga pada umumnya mempergunakan sarana transportasi yang sederhana (misalnya: sepeda, gerobak, dan pikulan). Adapun karena pemasaran hasil produknya ditangani sendiri, maka jasa pedagang perantara boleh dikatakan kurang menonjol.

b. Industri yang terkelompok atau sentra industri kecil adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan atau kawasan produksi yang terdiri dari segi kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari segi tempat pemasarannya kategori yang kedua ini umumnya menjangkau pasar yang lebih luas dari pada kategori yang pertama. Sehingga peranan pedagang atau pengumpulan menjadi cukup menonjol.

c. Industri mandiri yaitu kelompok jenis industri yang mempunyai sifat-sifat industri kecil, namun telah mempunyai kemampuan mengadaptasi teknologi produksi yang canggih. Pasaran hasil produksi kelompok ini relatif tidak tergantung pada peranan pedagang perantara. Dimaksudkan dengan sifat-sifat industri kecil yang masih dipunyai oleh kelompok industri ini adalah skala unit usaha yang relative kecil atau sistem manajemen yang digunakan masih sederhana. Pada dasarnya kelompok industri mandiri ini tidak sepenuhnya dapat dinisbahkan sebagai bagian dalam mengakomodasi berbagai aspek modernisasi. Dan sesungguhnya hanya dasar skala penyerapan tenaga kerja semata, maka kelompok ini menjadi termasuk ke dalam bagian dari sub sektor industri kecil.”

Dengan adanya pengelompokan tersebut akan mudah mendeskripsikan peranan dari industri kecil. Pemantaun pengembangan industri juga harus diperhatikan untuk menciptakan kondisi industri yang kondusif berdasarkan klasifikasi dan tujuannya. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas industri

yang terkelompok atau terbagi menjadi sentra industri kecil yang produknya merupakan produk lokal yang unggulan.

K. Pentingnya Pengembangan Industri

Pengembangan industri diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Dengan pengembangan industri kecil ini pula maka partisipasi masyarakat dapat menghadapi perubahan besar yang terjadi pada proses industrialisasi. Pembinaan industri kecil pada dasarnya dilakukan melalui pembinaan sentral-sentral industri kecil. Banyaknya masalah yang terjadi pada industri kecil, menurut data BPS, industri kecil tahun 2003 mengalami masalah permodalan, bahan baku, keahlian teknis, pemasaran, keahlian manajerial dan persaingan (Arsyad, 2004). Untuk menciptakan kondisi yang stabil dan mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peran aktif dari *stakeholder* demi perkembangan industri kecil disuatu daerah. Implikasi dari terselesaikannya masalah tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari industri kecil, yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian, serta pembinaan berkesinambungan sangat diperlukan sehingga dapat memberikan kontribusi pada masyarakat dari segi pengetahuan maupun dari segi materi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam PERDA Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan pengembangan industri adalah:

- a. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan atau hasil budidaya

- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap
- c. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi tepat guna
- d. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan masyarakat dalam pembangunan industri
- e. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja serta meningkatkan peran koperasi.
- f. Meningkatkan devisa melalui export
- g. Membangun pusat-pusat industri yang menunjang pembangunan daerah
- h. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional.

Sedangkan peran industri kecil adalah sebagai berikut:

1. Perluasan tenaga kerja yang tiap tahun bertambah jumlahnya
2. Peningkatan pengahsilan masyarakat secara merata
3. Industri kecil dalam meningkatkan nilai ekspor (Irianto, 1996),

Dari pendapat diatas sangat terlihat bahwa industri kecil memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya industri kecil diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pada daerah itu sendiri. Daerah yang terlalu mengantungkan perekonomian pada industri besar akan mengalami permasalahan yang krusial jika industri besar mengalami permasalahan manajemen keuangan, sehingga mengharuskan untuk memberhentikan pekerjanya. Hal semacam ini perlu diantisipasi dengan adanya industri kecil sehingga masyarakat bisa mandiri dalam menciptakan industrinya sendiri. Banyaknya pemutusan hubungan kerja pada industri besar telah memperburuk permasalahan yang ada sebelumnya, seperti kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut dipertegas oleh Saleh (1986), yaitu:

“Harapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas ternyata masalah ada pada rentang perjalanan yang panjang. Bertitik tolak dari kenyataan inilah maka eksistensi industri kecil telah mengambil tempat penting dalam masalah kesempatan kerja dan ketenagakerjaan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia”.

Hal ini merupakan penguatan bahwa industri kecil dinilai sebagai sektor terpenting untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi suatu daerah, yakni pengangguran dan kemandirian daerah dalam perekonomian. Karena industri kecil tersebar di seluruh Indonesia, khususnya didaerah pedesaan, pengembangan industri kecil merupakan cara yang paling tepat, sebab tidak hanya untuk memperbesar lapangan kerja dan kesempatan kerja, tetapi juga mendorong pembangunan daerah dan pedesaan di suatu wilayah. Oleh karena itu pengembangan industri kecil sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di daerah setempat.

L. Bentuk Pengembangan Industri Kecil

Bentuk pengembangan industri kecil dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, adapun bentuk-bentuk pengembangan industri kecil yang dijelaskan oleh Syarief (1991: 3), meliputi:

- a. Perangkat lunak meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
 - 2) Pembinaan usaha.
 - 3) Bantuan promosi dagang
 - 4) Keringanan dan kemudahan yang diberikan pada pengusaha kecil dalam rangka mendorong berkembangnya usaha.
- b. Perangkat Keras meliputi:
 - 1) Penyediaan fasilitas bersama, misalnya koperasi sentra usaha pada sentra-sentra industri kecil

- 2) Bantuan langsung pada pengusaha industri kecil seperti penyediaan tempat usaha dan bantuan permodalan.

Adanya pengembangan industri kecil melalui bentuk-bentuk pengembangan baik lunak maupun keras diharapkan mampu memberikan dukungan bagi industri kecil di Indonesia. Pengembangan industri di Indonesia diharapkan mampu bersaing dan berkembang semakin pesat, dan mampu menghasilkan produk-produk yang *go international*. Selain itu bentuk-bentuk pengembangan industri kecil ini merupakan salah satu alternatif dari permasalahan-permasalahan industri di Indonesia. Selain bentuk-bentuk pengembangan industri kecil juga terdapat strategi pengembangan industri kecil yang diharapkan mampu memberi dukungan bagi industri kecil supaya lebih berkembang dan bisa bersaing serta dapat mewujudkan tujuan dari industri kecil itu sendiri.

Strategi pengembangan industri kecil menciptakan keunggulan-keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan usaha lain. Hatten dalam Suseno T.W,dkk (2005), keunggulan kompetitif adalah aspek dari suatu usaha yang dilakukan secara lebih baik dibandingkan usaha lainnya. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif dalam pengembangan industri terdapat strategi yang perlu diperhatikan.

Ada beberapa strategi dalam mengembangkan industri kecil, seperti yang disampaikan oleh Sjaifudin (1995: 66-75), strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan industri kecil adalah:

- “1. Strategi peningkatan kemampuan *financial*

Berkembangnya beberapa model penguatan financial bagi usahawan kecil akhir-akhir ini telah menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan mambantu pengembangan usaha kecil melalui “penyertaan modal sementara”.

2. Pengembangan Pemasaran

Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi industri kecil. Terdapat tiga cara strategi pengembangan pemasaran, yaitu: a) Meningkatkan akses usaha kecil pada pasar, caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi. Pola keterkaitan subkontrak lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri. Pola subkontrak ini memberikan manfaat positif bagi usaha kecil karena secara ekonomis usaha-usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh jaminan pasar kontinuitas produksi. Pola ini juga memecahkan masalah kelangkaan bahan baku, kadang-kadang juga modal; b) Proteksi pasar; c) Menggeser struktur pasar monopoli menjadi bersaing, langkah ini sangat strategis mengingat kendala utama usaha kecil untuk berkembang selama ini ialah pasar, modal bukanlah kendala utama mereka. Alternatif yang ditawarkan antara lain penghapusan proteksi *infant industries* (industri kecil) mendorong terciptanya iklim persaingan dalam konteks ini fungsi kontrol sangat diperlukan”

Dalam mewujudkan pengembangan IKM diperlukan peran-peran *stakeholder* didalamnya, oleh karena itu kemitraan sangat diharapkan untuk mewujudkan tujuan IKM dalam meningkatkan perekonomian lokal. Kemitraan merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana mereka memiliki tujuan tertentu, yang saling menguntungkan. Keberadaan IKM selalu memiliki nilai tambah bagi pihak yang bermitra dari berbagai aspek.

M. Pengertian Kemitraan

Kemitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal hubungan sebagai mitra, selanjutnya Hafsah (2000:43-46) menjelaskan bahwasanya kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak

atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Selain itu pemerintah yang mempunyai andil besar dalam memacu keberhasilan kemitraan terutama dalam menciptakan iklim yang kondusif serta meregulasi peraturan-peraturan yang menghambat baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan upaya-upaya menumbuh kembangkan kemitraan. Keberpihakan pemerintah pada pengusaha kecil, petani, nelayan, dan pengrajin dalam mempermudah arus investasi merupakan suatu keharusan untuk membuat keseimbangan dengan perusahaan besar atau pihak swasta.

Kemitraan sebenarnya diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*, yang diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh atau sekutu. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan. Bertolak dari hal ini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004:129). Berdasarkan pengertian kemitraan diatas, dapat diartikan bahwa kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik kelompok ataupun badan hukum. Adapun pihak-pihak tersebut memiliki status yang setara, memiliki kesamaan visi dan misi berbeda tetapi saling mengisi/melengkapi secara fungsional, yang bekerjasama untuk mewujudkan tujuan.

Tujuan dari terjadinya kemitraan adalah untuk tercapainya hasil yang disepakati bersama dengan baik dan dengan saling memberikan keuntungan bagi

setiap pihak yang ikut bermitra atau berperan dalam kemitraan. Dengan adanya kemitraan ini, bukan menjadikan pihak mitra yang lemah menjadi sasaran untuk menjatuhkan atau mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat, saling menguntungkan dan memperbesar manfaat kemitraan memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya. Ditambahkan oleh Hafsah (2000:62-63) yang mengatakan bahwa:

“pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah *“Win-Win Solution Partnership”*. Kesadaran dan saling menguntungkan di sini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional, di sinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha. Selain itu Hafsah juga menjelaskan dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional
- e. Memperluas kesempatan kerja
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional”

Rohmad (2009: 3) menjelaskan bahwa kebijakan kelembagaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, swasta merupakan sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah disepakati. Dan kemitraan ini dikembangkan dalam rangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra. Syahrir dalam Rohmad (2009: 4) menunjukkan bahwa kemitraan tersebut terjalin karena masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. Demikian juga

secara keseluruhan relasi ketiga pihak akan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi daerah. Kemitraan antara pemerintah, swasta dan komunitas (masyarakat) akan memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam hubungan kemitraan tersebut masing-masing pihak memiliki peran dan manfaat sendiri-sendiri:

- a) Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan swasta maka pemerintah berperan menyusun kebijakan dan aturan main serta menyediakan pelayanan perizinan, dan pengembangan kerjasama antara daerah di mana memungkinkan pelaku bisnis di daerah masing-masing bisa saling mengembangkan investasi. Sedangkan dari pihak swasta, kemitraan akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif daerah sebagai daerah tujuan investasi, melibatkan departemen terkait (industri, tenaga kerja, dan sebagainya), serta kebutuhan untuk transparansi dalam hubungan perizinan dan nilai tambah yang dapat diperoleh dari kegiatan ekonomi lokal.
- b) Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan komunitas (IKM) maka pemerintah berperan menyusun kebijakan yang memihak kepada kepentingan IKM, serta melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Sedangkan bagi IKM sendiri kemitraan menjadi peluang bagi IKM untuk mendapatkan kesempatan usaha, dan memperoleh ruang untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan

N. Pola Kemitraan

Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan IKM, pembinaan maupun pelaksanaan operasional yang dimitirakan dengan menciptakan iklim yang kondusif, melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat dan kondisi tujuan. Menurut Salim (1965) berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 terdapat enam pola kemitraan yaitu:

1. Pola Kemitraan Inti-Plasma, sesuai dengan konsep ini maka usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti. Sebagai perusahaan inti maka perusahaan menengah atau besar harus melaksanakan pembinaan produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi. Sedangkan perusahaan kecil bertugas untuk meningkatkan produksi baik mutu maupun jumlah.
2. Pola Kemitraan Sub-Kontrak, berdasarkan pola ini suatu unit produk yang diproduksi oleh usaha menengah atau besar sebagai suatu barang jadi akan terdiri atas komponen akan diproduksi oleh usaha kecil dengan spesifikasi teknis dan standar mutu yang ditentukan oleh usaha menengah atau besar. Harga dari komponen itu biasanya ditentukan oleh yang memberi pekerjaan.
3. Pola Kemitraan Dagang Umum, dalam pola ini terdapat dua kemungkinan, yaitu usaha menengah dan usaha besar memasarkan barang yang dihasilkan oleh usaha kecil. Konsep ini untuk beberapa hal sama dengan pola inti-plasma, dimana usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil. Untuk lebih mengefektifkan pola ini maka

perlu dipikirkan suatu bentuk dagang umum dimana hasil produksi usaha kecil diberi merk dari usaha menengah atau usaha besar agar konsumen mendapat jaminan barang yang dibeli itu akan dapat memuaskan kebutuhan mereka.

4. Pola Kemitraan Waralaba, berdasarkan polai ini usaha kecil diberikan hak oleh usaha menengah atau besar untuk menggunakan lisensi, merk dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada usaha kecil dengan disertai bantuan manajemen.
5. Pola Kemitraan Keagenan, dalam pola ini usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dilihat dari kacamata konsep manajemen pemasaran, maka usaha menengah dan usaha besar meletakkan usaha kecil dalam strata atau tingkat distribusi dari pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha menengah atau usaha besar. Secara konseptual dalam manajemen pemasaran dikenal adanya strata distribusi, yaitu 0 tingkat dan 1 tingkat.
6. Pola Kemitraan bentuk-bentuk lain, dalam pola ini undang-undang memberikan kebebasan bagi usahawan untuk mengadakan hubungan kemitraan diluar pola-pola sebagaimana diutarakan diatas. Secara konseptual maka undang-undang memperoleh marginal penghasilan yang lebih besar dari marginal penghasilan yang lebih besar dari marginal biaya atau pengorbanan yang diberikan dalam siklus distribusi barang yang dipasarkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Untuk menerapkan suatu metode ilmiah dalam praktek penelitian maka diperlukan sesuatu desain penelitian, yang sesuai kondisi, seimbang dengan dalam atau dangkalnya penelitian yang akan dilakukan. Rancangan atau penelitian merupakan rencana atau pola yang akan diikuti dalam melaksanakan penelitian, termasuk analisisnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini dikarenakan peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, untuk melihat situasi dan kondisi dalam peningkatan perekonomian lokal Kota Kediri melalui pemberdayaan IKM melalui peran *stakeholder*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sugiyono (2009:8) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi. Diperkuat dengan pernyataan dari Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara

fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya.

Selain itu metode yang digunakan oleh peneliti dipandang tepat dan sesuai antara karakteristik penelitian kualitatif dengan fenomena yang dikaji. Penggunaan metode kualitatif oleh peneliti diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dua fenomena, yaitu tentang peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian melalui IKM di Kota Kediri, yang menyangkut tentang peningkatan perekonomian lokal Kota Kediri melalui IKM, serta peran *stakeholder* dalam pemberdayaan IKM di Kota Kediri.

Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, hal ini dikarenakan penelitian ini lebih peka dalam menangkap berbagai fenomena informasi, khususnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu melalui jenis penelitian ini, maka peneliti dapat menyajikan bentuk yang holistik atau menyeluruh dalam menganalisis suatu fenomena sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Widodo dan Mukhtar dalam Harsono (2006:109) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian suatu saat tertentu.

Penggunaan metode deskriptif adalah merupakan upaya untuk menggambarkan apa yang terjadi termasuk siapa, kapan, dimana, atau hubungan dengan karakteristik suatu gejala masalah sosial, baik pola, bentuk, ukuran, maupun distribusi objek penelitian. Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan,

peneliti memperoleh penjelasan, dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena peran *stakeholder* dalam meningkatkan perokonomian lokal Kota Kediri melalui pemberdayaan IKM.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian dengan mengkaji permasalahan. Sejalan dengan pendapat Sanapiah dalam Sugiyono (2008:207) menjelaskan bahwa fokus penelitian adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum dalam penelitian kualitatif. Ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti dengan menetapkan fokus penelitian yaitu: pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk menentukan kriteria inklusi-exklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Peran *Stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal Kota Kediri melalui pemberdayaan IKM, yang meliputi:
 - a) Pemerintah, yang dimaksud pemerintah dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perindustrian dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri, berperan dalam memberikan pengembangan produksi, pengembangan pemasaran, fasilitas keuangan.
 - b) Swasta, yang dimaksud swasta dalam penelitian ini adalah perusahaan di Kota Kediri yang bermitra dengan IKM, seperti

Hotel Grand Surya Kota Kediri. Pihak swasta ini berperan untuk, Dukungan Pemasaran dan Dukungan Keuangan.

c) Masyarakat, yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Kediri seperti Yayasan Bina Negeri dan Asosiasi tenun ikat. LSM berperan dalam Pelatihan, Konsultasi Bisnis, Pendampingan UMKM dan Informasi.

2. Peningkatan perekonomian lokal dilihat dari:

- a) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha
- b) Perluasan Peningkatkan pendapatan
- c) Keberdayaan lembaga usaha ‘mikro dan kecil’ dalam proses produksi dan pemasaran
- d) Keberdayaan ‘kelembagaan jaringan kerja’ kemitraan antara pemerintah, usaha swasta dan masyarakat lokal.

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian Kota Kediri melalui IKM, yang meliputi:

- a. Faktor pendukung peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian Kota Kediri melalui IKM
- b. Faktor penghambat peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian Kota Kediri melalui IKM

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Bogdan dan Taylor (1992:34) menyatakan bahwa lokasi yang layak dipilih untuk diteliti adalah lokasi yang didalamnya terdapat persoalan substantif dan teoritik. Disamping itu menurut Lofland and lofland ada 4 (empat) alasan situasi menarik untuk diteliti, yaitu: Pertama, situasi menarik minat peneliti dan secara nyata terlokasi di suatu tempat. Kedua, terdapat pengalaman sosial yang memiliki pola tidak tetap. Ketiga adanya keunikan pada individu-individu dan jenis setting yang tidak pasti serta banyaknya bentuk pengalaman sosial. Keempat, adanya masalah yang diteliti belum mendapat solusi.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kota Kediri, dikarenakan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan aset daerah melalui Industri Kecil Menengah (IKM) dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD Kota Kediri dan menjadi salah satu bentuk kemandirian perekonomian daerah. Selain itu produk yang dihasilkan ini juga memiliki kualitas yang baik dan karakteristik produk yang unik sehingga diyakini mampu bersaing dengan produk serupa yang dihasilkan oleh daerah lain.

Sedangkan situs penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Kediri, Industri Tahu Takwa Jalan Patimura, Industri Tenun Ikat ATBM (Alat Tangan Bukan Mesin) Kelurahan Bandarkidul, Yayasan Bina Negeri Kota Kediri dan Hotel Grand Surya Kediri. Penelitian situs ini dikarenakan pada lokasi tersebut terdapat data dan informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan peran *stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan IKM. Selain itu alasan

penulis melakukan penelitian di situs tersebut karena situs tersebut merupakan produk unggulan yang dimiliki oleh Kota Kediri.

D. Sumber Data

Sumber data memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Menurut Arikunto (2006:129) “sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh”. Dalam penelitian ini karena menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti tidak menggunakan kuesioner, namun menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer, sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan. Sedangkan untuk data sekunder peneliti langsung mendatangi situs penelitian yang menurut peneliti bisa memberikan data-data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada lokasi dan situs penelitian di atas.

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, menurut Sugiyono (2009:225) sumber data dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan yang berkaitan serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Dengan kata lain data primer didapat melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan dan observasi langsung terhadap kajian yang akan diteliti. Adapun sumber data informan yang terkait dengan penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Industri, Dinas Indangtamben Kota Kediri
- b. Hotel Grand Surya Jalan Dhoho, Kota Kediri
- c. Pelaku IKM sentra Tahu Takwa Jalan Patimura, Kota Kediri
- d. Pelaku IKM sentra Tenun Ikat ATBM (Alat Tangan Bukan Mesin) kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri
- e. Business Development Services (BDS) Yayasan Bina Negeri Kediri

2. Data Skunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data skunder diperoleh melalui dokumen-dokumen atau file-file yang sudah ada dan dapat diperoleh di lokasi dan situs yang hendak diteliti. Data skunder yang diperlukan serta dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Gambaran umum mengenai Kota Kediri dan IKM meliputi kondisi geografis, kependudukan, pemerintahan dan perekonomian.
- b. Gambaran khusus mengenai peran stakeholder dalam meningkatkan perekonomian melalui IKM.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang bahkan merupakan pendukung utama dalam suatu penelitian. Menurut Arikunto (2006:243) “Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”. Oleh karena itu, untuk memperoleh

data yang valid dan relevan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan narasumber atau informan serta pihak-pihak yang terkait dan berkompeten dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2009:231), “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung pada informan tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian hasil wawancara bisa diolah dan dikembangkan lebih lanjut selama dan setelah wawancara berlangsung. Dalam penelitian lapangan dilapangan bisa jadi informan bertambah karena perkembangan hasil wawancara untuk memperoleh informasi yang dianggap berkaitan dengan penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan segenap fenomena serta peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang aktual dan relevan. Selama melakukan penelitian, peneliti melakukan obesrvasi langsung sebanyak enam kali, baik sebelum membuat laporan maupun setelah membuat laporan, namun data yang dibutuhkan kurang.

Observasi merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan dengan menggunakan seluruh alat indera.

3. Dokumentasi

Metode ini bertujuan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Penggunaan teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen tertulis (peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan ketentuan lain) sebagai bahan referensi dan komparasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2007:223) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah:

1. Peneliti, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama (Moleong, 2006:4). Selama menjalankan proses penelitian, peneliti tidak pernah diwakili oleh orang lain, dan selalu melakukannya sendiri baik wawancara maupun observasi. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2010:306) bahwa penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Dengan berperan sebagai peneliti utama diharapkan peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang ada di lapangan dan peneliti menguasai semua data yang diperoleh dari lapangan.
2. Pedoman-pedoman wawancara (*interview guide*), hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya.
3. Peralatan Penunjang, yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Alat penunjang lainnya adalah alat rekaman dan foto melalui HP peneliti.

G. Analisa Data

Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang muncul dibenak peneliti, dan juga untuk menjawab dan mengungkapkan fenomena sosial. Oleh karena itu dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, maka peneliti

harus mengadakan analisis data terhadap data yang diperoleh. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sugiyono (2009:244);

“Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Miles and Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2009:246), mengemukakan bahwa: Aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data interaktif karena peneliti dalam mendapatkan data bertatapapan langsung dengan informan. Aktifitas dalam analisis data, yaitu Pengumpulan Data, Data *Reduction* (Reduksi Data), Data *Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing* (Kesimpulan). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tiga teknik yaitu :

Observasi (pengamatan), *Interview* (wawancara) dan Dokumentasi. Hal ini dikarenakan data yang diinginkan oleh peneliti dilapangan berbeda dan tidak selalu berbentuk dokumen akan tetapi bisa berbentuk pernyataan maupun gambar. Oleh karena itu peneliti melakukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari beberapa informan terhadap pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maupun

dokumen yang didapatkan oleh peneliti. Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukannya berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan data dan kejenuhan data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian ini.

2. Reduksi Data

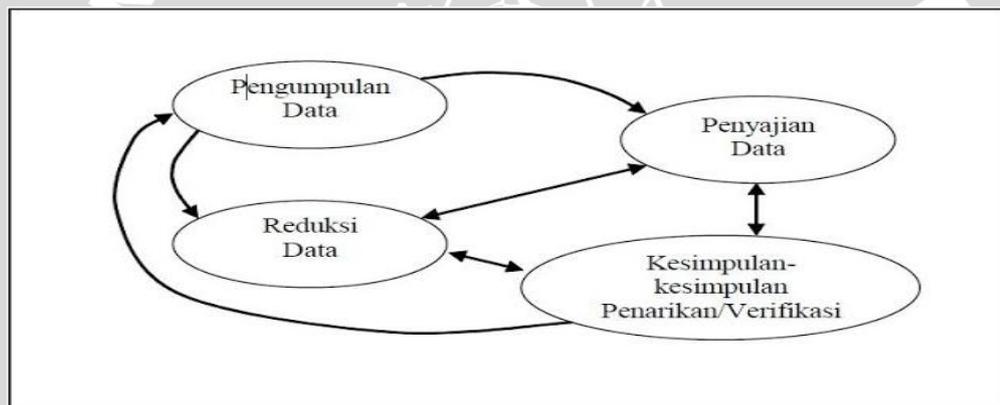
Setelah melakukan pengumpulan data proses selanjutnya adalah reduksi data. Dalam langkah ini peneliti melakukan penelaahan terhadap semua data yang diperoleh berbagai sumber dan berbagai metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas. Peneliti melakukan proses reduksi data terhadap data yang dikumpulkan dengan cara membuat tabelisasi dan abstraksi, yaitu berusaha membuat rangkuman dan tabelisasi pada masing-masing fokus.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi oleh peneliti, maka peneliti melakukan display data dalam bentuk laporan, penyajian data yang bersumber dari situs dan lokasi penelitian disajikan sesuai dengan format yang telah diatur oleh Fakultas Ilmu Administrasi sehingga data tersebut dapat diperelajari oleh berbagai pihak. Penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi diintegrasikan oleh peneliti dan juga dibubungkan dengan fokus penelitian sehingga tersaji laporan yang memiliki kekayaan informasi dan pengetahuan.

4. Penarikan Kesimpulan

Sejak semula sebelum data disajikan dan dianalisis peneliti berusaha mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, kemudian setelah data tersebut difahami dan disajikan. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data yang didasarkan pada berbagai teori yang terkait. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



Gambar 1: Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles & Hubberman dalam Sugiyono (2011:247)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

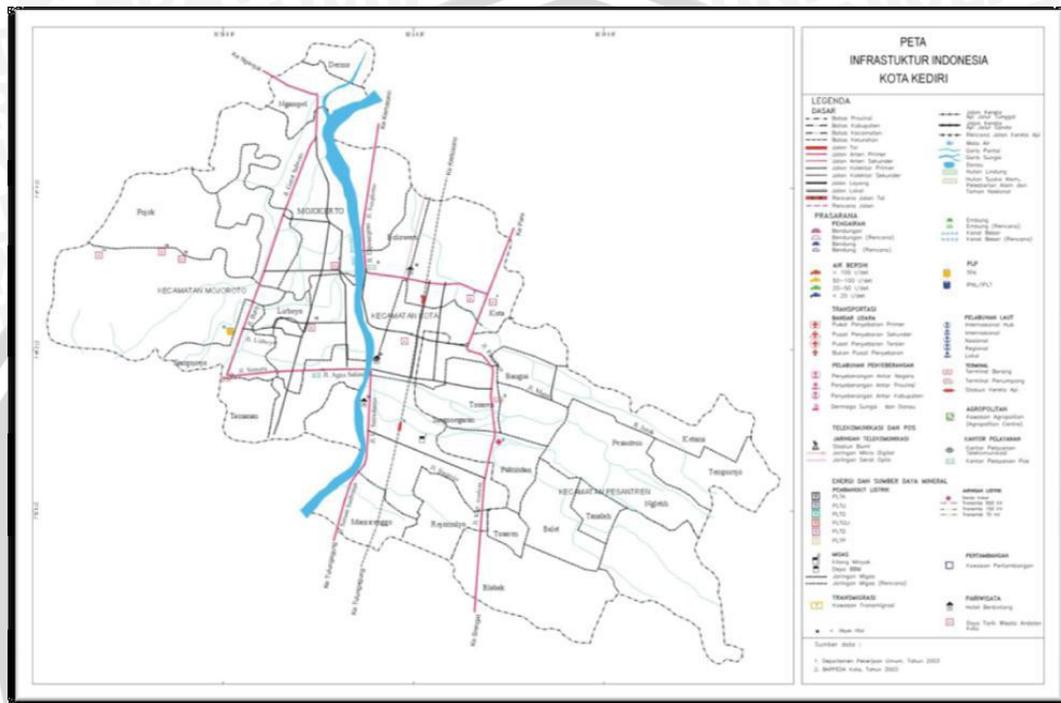
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Kediri

Kota Kediri mempunyai ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut serta terletak pada 111o05' hingga 112o03' Bujur Timur dan 7o45' hingga 7o55' Lintang Selatan, terbelah oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara menjadi dua wilayah, yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai. Luas Wilayah Kota Kediri yang mencapai 63,40 km² terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Wilayah barat sungai secara keseluruhan termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,6 km², dan timur sungai sebagian termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren masing-masing dengan luas wilayah 14,9 km² dan 23,9 km².

Seluruh wilayah Kota Kediri berbatasan dengan wilayah Kecamatan-Kecamatan yang termasuk wilayah Pemerintah Kabupaten Kediri baik batas utara, timur, selatan maupun barat, dengan kondisi wilayah yang relatif datar, meskipun di bagian barat dibatasi oleh Gunung Klotok dengan ketinggian 672 meter dan Gunung Maskumambang setinggi 300 meter. Sebanyak 7 (tujuh) sungai mengalir di Kota Kediri, yaitu Sungai Kresek sepanjang 9,00 km, Sungai Parang 7,50 km, Sungai Kedak 8,00 km, Sungai Brantas 7,00 km, dan Sungai Ngampel

4,50 km, sungai Tawang 21,20 km dan sungai Bruno 30,25 km. Dari ke tujuh sungai tersebut yang terbesar dan terkenal sampai saat ini adalah Sungai Brantas, dan menjadi legenda bagi masyarakat Kediri dan Propinsi Jawa Timur



Gambar 2: Peta Kota Kediri

Sumber : www.kedirikota.go.id

a) Visi dan Misi Kota Kediri

Sehubungan dengan program daerah sebagai pedoman bagi SKPD dalam merencanakan program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka disusunlah kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Kediri telah menyusun kebijakan pembangunan Kota Kediri yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri tahun 2010 – 2014, dimana didalamnya telah ditetapkan komponen-komponen



perencanaan pembangunan selama 5 tahun yang meliputi visi, misi, strategi, arah dan strategi kebijakan daerah serta prioritas daerah sebagai berikut :

1. Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Pemerintah Kota Kediri harus dibawa dan dapat berkarya secara konsisten serta dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang masa depan Pemerintah Kota Kediri, yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh stakeholder.

Seperti yang telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2010 – 2014 bahwa Visi Kota Kediri adalah : “Tewujudnya Masyarakat Kota Kediri yang Makmur, Mandiri dan Berakhlak Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Makna dari pernyataan visi tersebut mengandung arti terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kota dan seluruh *stakeholder* dalam merealisasikan pembangunan Kota Kediri secara terpadu.

2. Misi, didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi, dan berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan *aksesibilitas* pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan bermutu untuk peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.
- b) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang mampu mendukung penciptaan dan perluasan lapangan kerja
- c) Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d) Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan prima dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good governance*) yang didukung oleh profesionalisme aparatur pemerintah.
- e) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, peran pemuda, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib berlandaskan moral agama.

b) Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Kediri pada Tahun 2012 sebanyak 260.297 jiwa atau menurun dibanding jumlah penduduk Tahun 2011 sebanyak 302.672. jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mojoroto sebesar 99.624, dan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Pesantren sebesar 75.731, sedangkan jumlah

penduduk di Kota sebesar 84.942. Jumlah penduduk Kota Kediri pada Tahun 2012 menurut jenis kelamin per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
Hasil Registrasi Penduduk Tahun 2012

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Mojoroto	51.447	48.177	99.624
2 Kota	42.521	42.421	84.942
3 Pesantren	38.446	37.285	75.731
Jumlah	132.414	127.883	260.297
2011	152.244	150.428	302.672
2010	146.301	144.690	290.991

Sumber : Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

c) Produk Unggulan

Kota Kediri sangat dikenal sebagai penghasil makanan yang bercita rasa khas, antara lain tahu kuning, stik tahu, gethuk pisang, emping mlinjo, rokok, jamu, kecap, kopi serta produk-produk hasil kerajinan bordir, tenun ikat, sarung, sulak, kerajinan bambu. Merupakan potensi yang tidak kecil artinya bagi Bergeraknya roda perekonomian Kota Kediri. Produk-produk unggulan diproduksi pelaku usaha industri kecil/rumah tangga di seluruh wilayah Kelurahan yang ada di Kota Kediri, pengelolaannya dilakukan dalam sentra industri kecil maupun non sentra.

Beberapa produk unggulan Kota Kediri : gethuk pisang, tahu kuning, tenun ikat, kopi bubuk, sarung, sulak, sapu dan kerajinan bambu. Dari beberapa sentra yang ada, sebagian besar bergerak di sektor industri dan perdagangan. Di Kota Kediri terdapat 14 sentra IKM yang memiliki aneka ragam produk, antara lain : tahu, tempe, tenun ikat, meubelair, makanan, minuman, buah-buahan, sayuran, emping mlinjo, sulak, jahitan, kaca hias, tusuk sate, kue basah, jamu gendong dan opak gambir.

2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri

a) Visi dan Misi Disperindagtamben

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri adalah Terwujudnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang handal dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri, sebagai berikut:

1. Meningkatkan skala usaha IKM melalui peningkatan kemampuan Teknologi Industri, penataan struktur industri pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sistem produksi menjadi industri besar yang tangguh.
2. Mendorong berkembangnya kegiatan sektor perdagangan, barang dan jasa yang mampu bersaing secara sehat dan didukung tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta terciptanya suasana yang kondusif.

3. Mendukung terwujudnya kegiatan penambangan pasir tradisional (non mekanik) yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan pemberdayaan penambangan pasir (yang bersifat legal)
5. Terwujudnya kesadaran masyarakat pengguna air bawah tanah dan kelistrikan non PLN untuk mengajukan izin.

b) Kedudukan, Tupoksi Disperindagtamben Kota Kediri (Peraturan Walikota No. 65 tahun 2008)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugasnya, maka Disperindagtamben mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program pembangunan industri perdagangan, pertambangan dan energi atas dasar keterpaduan dengan instansi lain;
- b. Penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Bimbingan dan pengawasan kegiatan dibidang perlindungan konsumen;

- d. Koordinasi dengan instansi / unit kerja terkait dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan dunia usaha;
- e. Pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan, pembinaan dan pengembangan industri dan pertambangan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- g. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan / peralatan, anggaran keuangan, ketatalaksanaan dan pembinaan organisasi dinas;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) **Susunan Organisasi Disperindagtamben Kota Kediri**

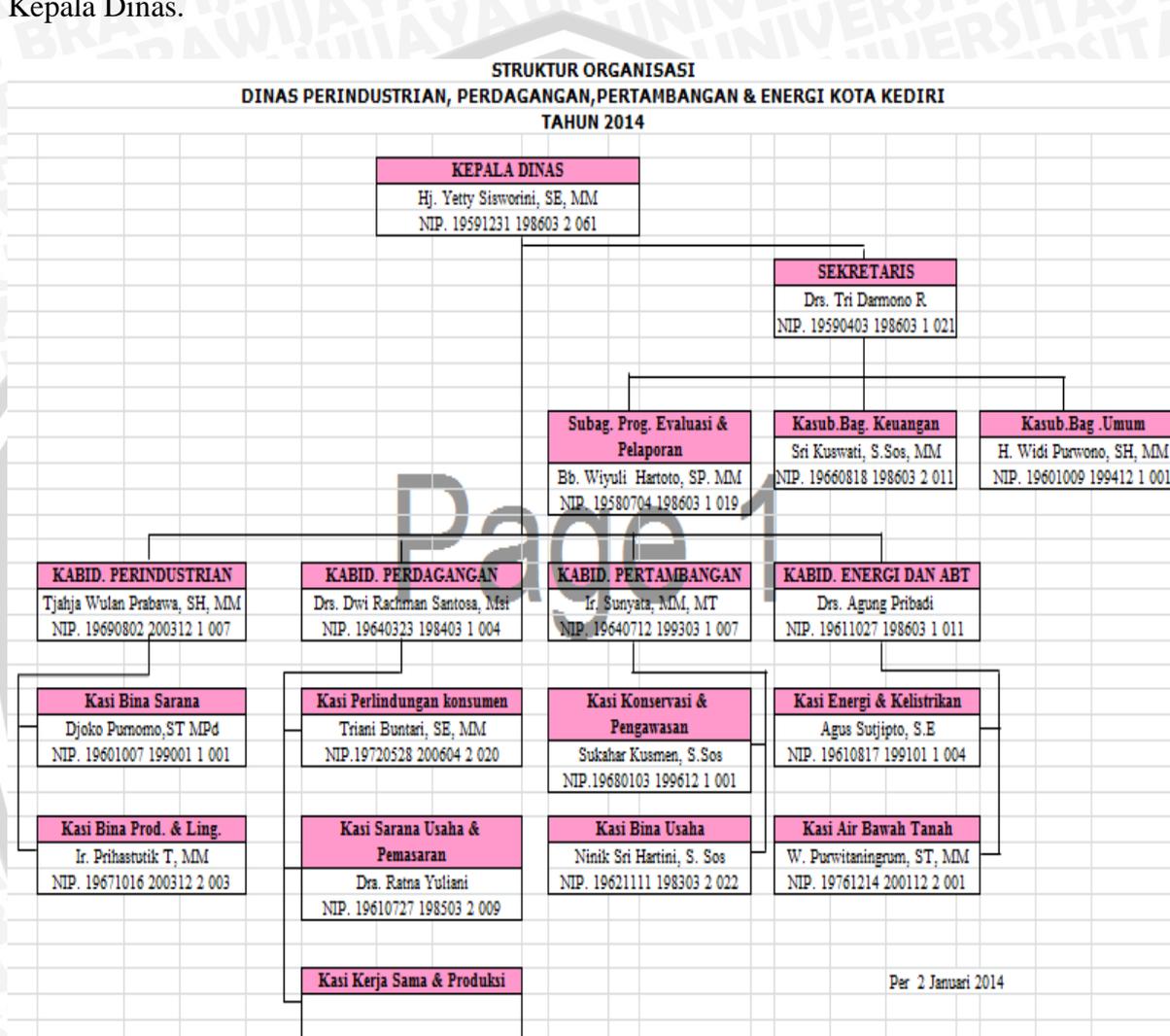
Susunan organisasi Dinas Prindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Sarana ;

2. Seksi Bina Produksi dan Lingkungan.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Sarana, Usaha dan Pemasaran ;
 2. Seksi Kerja Sama dan Produksi ;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Pertambangan, membawahi :
 1. Seksi Bina Usaha ;
 2. Seksi konservasi dan Pengawasan.
 - f. Bidang Energi dan Air Bawah Tanah, membawahi :
 1. Seksi Energi dan Kelistrikan ;
 2. Seksi Air Bawah Tanah.
 - g. UPTD, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing–masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat senior yang ditunjuk yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Gambar 3: Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kota Kediri

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kota Kediri



3. Gambaran Umum IKM (Industri Kecil dan Menengah) Kota Kediri

Dengan kedudukannya sebagai kawasan perkotaan yang sedang berkembang, di Kota Kediri terdapat banyak unit-unit usaha industri dengan skala usaha yang bervariasi, meliputi industri besar, menengah dan kecil. Industri-industri besar yang ada di Kota Kediri bergerak di bidang industri gula dan rokok. Sedangkan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagian besar bergerak dalam produksi makanan serta pengolahan hasil pertanian.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era global, para pelaku IKM dituntut untuk mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki karakteristik yang khas sehingga memiliki keunggulan dibandingkan produk-produk kompetitor. Beberapa komoditas unggulan yang dihasilkan IKM di Kota Kediri pada dasarnya telah memenuhi kriteria dasar di atas sehingga memiliki peluang yang cukup besar dan kompetitif untuk menarik minat konsumen baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Namun, masyarakat umum terutama di luar daerah belum banyak mengetahui jenis-jenis komoditas unggulan yang belakangan semakin tumbuh dan berkembang.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa sebagian besar unit usaha IKM di Kota Kediri bergerak dalam produksi makanan dan pengolahan hasil pertanian. Hal ini dikarenakan wilayah-wilayah penyangga (*greater area*) di sekitar Kota Kediri, seperti Kediri Kabupaten, Nganjuk, Tulungagung dan Blitar, merupakan penghasil berbagai komoditas pertanian sehingga banyak pihak yang melihatnya sebagai peluang usaha yang prospektif dan kemudian diolah menjadi produk yang

memiliki nilai tambah. Produk-produk unggulan kreasi para pelaku IKM Kota Kediri. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran para pelaku IKM tentang pentingnya mutu produk dan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), maka sudah selayaknya tidak lagi muncul keragu-raguan terhadap kualitas dan kemampuan produk-produk IKM untuk bersaing di tataran lokal, regional dan nasional.

B. Penyajian Data

1. Peran *Stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal Kota Kediri melalui pemberdayaan IKM

a) Peran Pemerintah

Pemerintah dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben), dalam pemberdayaan IKM Disperindagtamben memiliki peran untuk:

1) Pengembangan Produksi

Pengembangan produksi merupakan suatu langkah yang digunakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas produk melalui pemberian arahan dalam pengembangan mutu, arahan pengembangan manajemen. Selain itu pengembangan produksi ini juga berkaitan dalam pemberian jasa pengujian mutu dimana pemerintah juga memberikan fasilitas untuk produk IKM dalam mendapatkan sertifikasi halal ataupun standar terpilih lainnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak D selaku Kepala Seksi Bidang Industri Disperindagtamben, bahwa:

“Pengembangan produksi yang telah kami lakukan melalui pembinaan, baik pembinaan manajemen melalui pelatihan pembukuan dan pengembangan mutu yang dapat dilihat dari standarisasi dari produk IKM. Kami memberikan pembinaan agar produk-produk yang ada terjamin kualitasnya. Pembinaan yang sudah dilakukan oleh bidang industri adalah memberikan kemudahan-kemudahan yang didapat oleh pengusaha IKM untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman. Dan produk-produk harus memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk meningkatkan kualitas produk kita juga sudah memberikan pelatihan-pelatihan kemasan yang baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Memberikan konsultasi gratis masalah pengemasan itu sendiri. Dulu kita juga bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi seperti ITS dalam pembinaan dalam hal pengemasan dan lain-lain”. (wawancara, pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 09.00 WIB di Bidang Industri Disperindagtamben Kediri)

Senada dengan yang telah dijelaskan Bapak D, pengrajin tenun ikat Bandar Kidul dengan merk Medali Mas yakni Ibu S (44 tahun) selaku pemilik industri tenun ikat juga menjelaskan, bahwa:

“Pembinaan-pembinaan dari pemerintah memang selalu diberikan seperti pembinaan teknik melalui teknik pencelupan, packing, pembukuan, manajemen, dulu juga ada pembinaan pewarnaan alami, dan adanya pembinaan izin serta hak paten. Saya juga sudah memiliki surat-surat yang seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)” (wawancara, pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 11.00 WIB di Medali Mas Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Bapak R selaku pemilik Industri Tahu dengan merk Mikimos menjelaskan, bahwa:

“Pemerintah selalu melakukan pemeriksaan rutin setiap produksi, dan memberikan sertifikasi halal dari MUI, pemerintah hanya sebagai kontrol saja, memantau harga kedelai, kalau pembinaan dan pemeriksaan produksi tidak ada. (Majelis Ulama Indonesia) yang selalu diperbarui setiap 3 tahun sekali” (wawancara, pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 10.10 WIB di Mikimos tahu takwa Kota Kediri)

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Bapak A selaku pemilik Industri Tenun Ikat ATBM Kurniawan tentang pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, bahwa:

“Dulu sering dan aktif perannya, ada pelatihan-pelatihan tapi dulu kalau sekarang udah jarang ada pelatihan” (wawancara, pada tanggal 6 Maret 2014 pukul 16.15 WIB di Kurniawan Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

2) Pengembangan Pemasaran

Pengembangan pemasaran ini dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pameran untuk mengenalkan produk lebih luas. Pameran-pameran yang telah dilakukan oleh Disperindagtamben adalah memberikan kesempatan bagi para pengusaha IKM untuk mengikuti pameran di tingkat nasional, provinsi, dan Kediri. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak D selaku Kepala Bidang Industri Disperindagtamben, bahwasannya:

“Untuk meningkatkan pemasaran itu sendiri kita sudah melakukan pameran-pameran ditingkat nasional seperti Jakarta Fair. Dan setiap ada pameran di provinsi kita juga rutin mengikuti. Di Kediri juga pameran setiap minggu selalu kita lakukan di belakangnya Pasaraya Sri Ratu. Saat ini produk-produk tenun ikat kita yang sudah dikenal luas sampai nasional” (wawancara dengan Bapak Djoko pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 09.00 WIB di Kantor Bidang Industri Disperandagtamben)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu S selaku pemilik industri tenun ikat Medali Mas yang aktif mengikuti pameran yang diadakan oleh Disperindagtamben, bahwa:

“Saya sendiri sangat aktif mengikuti pameran yang diadakan oleh pemerintah baik pameran regional maupun nasional, setiap ada

undangan saya selalu ikut. Adanya pameran itu sendiri sangat berpengaruh terhadap pemasaran produk saya. Saat ini produk saya sudah dikenal di nasional tidak hanya di lokal saja. Saat ini pelanggan saya juga ada yang dari Jakarta, Palembang dan Kalimantan” (wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 11.00 WIB di Medali Mas Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

Dampak positif dari diadakannya pameran yang diungkapkan oleh Ibu S tersebut didukung oleh pendapat Bapak A selaku pemilik industri tenun ikat Kurniawan beliau menjelaskan bahwa:

“pemerintah memfasilitasi pameran-pameran yang ada di tingkat regional, menggunakan sistem *rolling*. Pamerannya gantian dengan industri tenun lainnya, kan disini ada sekitar 11 industri jadi ya harus gantian kalau mau ikut pameran, kemarin yang terakhir ikut JCC (*Jakarta Convention Center*). Pameran memiliki manfaat untuk promosi, meskipun saat pameran tidak terjual tapi saat pameran kita nyebar brosur sama kartu nama sebagai bentuk promosi. Sampai saat ini pelanggan juga sudah ada yang dari luar kota, kemarin juga sempat dapat pesanan dari Timika, Aceh dan Palembang. Selain pameran kita juga menggunakan sistem *online* sudah 1 tahun kami menggunakan sistem *online*” (wawancara pada tanggal 6 Maret 2014 pukul 16.15 WIB di Kurniawan Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

Tujuan diadakannya sebuah pameran adalah produk yang dipamerkan bisa dikenal oleh masyarakat luas selain itu dengan adanya pameran diharapkan dapat memperluas tingkat penjualan, tapi tujuan pameran ini tidak dirasakan oleh pengusaha tahu takwa dimana Bapak R menjelaskan dikarenakan produk tahu takwa ini sifatnya adalah produk oleh-oleh, jadi pameran tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Tingkat penjualan dipengaruhi karena adanya hari libur, meski setiap pameran produk dari tahu takwa milik Bapak R selaku pemilik industri tahu Mikimos selalu diikutsertakan dalam pameran tapi tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan yang ada. Bapak R selaku pemilik industri tahu

Mikimos memiliki pendapat yang berbeda tentang dampak dari pameran, beliau menjelaskan bahwa:

“kami selalu ikut pameran kalau ada undangan pameran karena saya adalah ketua asosiasi pengusaha tahu di Kota Kediri, jadi setiap ada pameran tahu kami yang diikutsertakan pameran baik didala kota maupun luar kota, tapi pameran itu tidak memberi pengaruh pada penjualan kami, soalnya ya itu sifatnya oleh-oleh jadi gak ada pengaruhnya sama sekali. Yang membuat penjualan meningkat itu ya pas musim liburan” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 10.10 WIB di Mikimos tahu takwa Kota Kediri)

3) Permodalan (Fasilitas Keuangan)

Permodalan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh para pengusaha. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah memberikan bantuan permodalan dengan memberikan kredit bagi para pengusaha. Kemudahan dalam pinjaman permodalan ini diungkapkan oleh Ibu S selaku pemilik industri tenun ikat Medali Mas, bahwa:

“saat ini memang permodalan bukan menjadi permasalahan lagi, karena pemerintah telah memberikan pinjaman permodalan dengan bunga yang sangat ringan, adanya pinjamin bergulir yang diberikan kepada IKM dengan bunga 6% pertahun” (wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 11,00 WIB di Medali Mas Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

Pendapat Ibu S didukung oleh Bapak A selaku pemilik industri tenun ikat Kurniawan tentang permodalan yang diberikan oleh Pemkot (Pemerintahan Kota) Kediri, bahwa:

“Pemkot menyediakan modal dengan jangka maksimal 2 tahun, dengan bunga 6% pertahun. Tidak ada permasalahan dalam mencairkan bantuan yang penting perizinan harus lengkap, kalau tidak lengkap ya tidak bisa cair. Mungkin karena bunganya yang kecil jadi lebih diperketat seleksinya” (wawancara pada tanggal 6 Maret 2014 pukul 16.15 WIB di Kurniawan Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

Bapak R selaku pemilik industri tahu juga menambahkan bahwa adanya pinjaman permodalan bagi pengusaha IKM dari pemerintah, beliau menjelaskan bahwa:

“adanya pembinaan kredit yang diberikan pemerintah kepada pengusaha IKM” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 10,10 WIB di Mikimos tahu takwa Kota Kediri)

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak D selaku Kepala Bidang Industri Disperindagtamben bahwa Pemerintah Kota Kediri telah memberikan bantuan permodalan berupa kredit bergulir dengan bunga yang sangat kecil yang dikhususkan untuk IKM.

“Saat ini pemerintah Kota Kediri memberikan bantuan kredit bagi para IKM melalui Dinas Koperasi & UMKM sebagai penyalur modal, kalau dari bidang industri sendiri hanya memberikan surat pengantar kepada Dinas Koperasi & UMKM bahwa perusahaan itu berhak diberi bantuan modal. Dengan bunga yang sedikit maka tidak akan menyusahkan pengusaha IKM” (wawancara pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 09.00 WIB di Bidang Industri Disperindagtamben Kota Kediri)

b) Peran Swasta

Swasta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Kediri yang bermitra dengan IKM Kota Kediri, seperti Hotel Grand Surya Kediri. Dalam meningkatkan pemberdayaan IKM swasta juga memiliki perannya sehingga meskipun banyak perusahaan besar di Kediri namun tidak akan mematikan produksi IKM. Peran swasta dalam pemberdayaan IKM adalah:

1) Dukungan Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu hal yang terpenting didalam strategi penjualan produk. Dengan strategi pemasaran yang baik dapat meningkatkan penjualan serta mengenalkan produk terhadap masyarakat luas. Untuk meningkatkan dukungan pemasaran diperlukan dukungan dari pihak swasta agar produk IKM lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dukungan swasta terhadap IKM Kota Kediri dalam bentuk kemitraan terdapat dalam PERDA Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 22 yang berisi “Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan”

Berlandaskan pada PERDA tersebut maka dalam rangka kemitraan pusat perbelanjaan di Kediri memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil, tapi hal ini tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan pendapat dari Bapak R selaku pemilik industri Tahu Takwa menyatakan bahwa sangat sulit untuk menjual tahu di pusat perbelanjaan. Kembali pada sifat tahu yang dijual bersifat oleh-oleh dan skala industri tahu adalah home industri sehingga sangat sulit untuk menjual di pusat perbelanjaan. Selain itu ada kendala dalam masa berlaku produk, dimana produk tahu yang dijual di pusat perbelanjaan seharusnya bisa bertahan lama, tapi produk tahu yang dijual oleh Bapak Rudi hanya bertahan satu hari saja, hal semacam inilah yang dapat mempengaruhi sulitnya menjual di pusat perbelanjaan. Sangat disadari bahwa jika dapat

berjualan di pusat perbelanjaan dapat meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran, tapi karena kurangnya teknologi dari industri milik Bapak R selaku pemilik industri tahu ini sehingga tidak bisa menjual di pusat perbelanjaan, beliau menjelaskan bahwa:

“Dari industri kami sebenarnya mau-mau saja menjual di pusat perbelanjaan, tapi ya itu kami tidak mau ambil resiko juga. Karena skala perusahaan kami ini adalah home industri jadi sulit buat berjualan di supermarket atau mall. Kan biasanya kalau di mall itu harus bisa berbulan-bulan produknya bisa bertahan, dan untuk mempertahankan produk biar tidak cepat kadaluarsa itu perlu teknologi yang lebih canggih. Kebetulan perusahaan kami ini sistem pembuatannya masih tradisional sehingga tidak bisa berbulan-bulan bertahan, cuma satu hari bertahannya” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 10.10 di Mikimos tahu takwa Kota Kediri)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu S pemilik Industri Tenun Ikat, menurut Ibu S ada banyak kendala jika harus menjual tenun ikat di pusat perbelanjaan. Proses perizinan yang terlalu berbelit-belit sehingga dianggap menyusahkan, hal tersebut dijelaskan oleh Ibu S bahwa:

“kalau di kasih kesempatan untuk berjualan di mall saya mau, tapi kalau izinnya tidak berbelit-belit. Pembuat tenun ikat seperti saya ini sukanya yang simpel-simpel saja, kalau berbelit-belit dan susah itu gak bisa. Biasanya kalau di mall izinnya yang sulit, dan masih ada persyaratan-persyaratan lainnya yang diajukan sehingga kalau industri kecil seperti saya tidak ada waktu untuk mengurus hal semacam itu. Lebih baik begini saja sudah laku, alhamdulillah. Tapi kalau kerjasama dengan Hotel Grand Surya hotel terbesar di Kediri saya pernah, biasanya kain tenun kita titipkan di hotel untuk dijual dalam bentuk souvenir bagi tamu-tamu hotel, nanti kalau mereka pengen liat-liat proses pembuatannya bisa langsung kesini. Biasanya kalau udah ada satu yang beli souvenir dan puas, mereka biasanya pesen lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Kemarin juga dapat pesanan dari Jakarta dengan jumlah yang lebih banyak. Selain bekerjasama dengan hotel grand surya kami juga pernah diajak pameran oleh PT. Pesantren (pabrik gula)” (wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 11.00 di Medali Mas Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

Didukung juga dengan pendapat Bapak A selaku pemilik industri tenun ikat Kurniawa dimana industrinya juga bekerjasama dengan hotel yang ada di Kediri dan toko-toko Kediri lainnya dalam bentuk keagenan, beliau menjelaskan bahwa:

“Selain kita menjual kain tenun ikat di toko sendiri, biasanya kami juga menitipkan di hotel-hotel yang ada di Kediri, hampir semua hotel besar yang ada di Kediri sudah bekerjasama dengan kita. Ada juga yang ngambil sendiri di toko seperti pedagang gede, toko-toko, suplier, butik busana muslim hampir semua toko di Kediri ini masuk semua” (wawancara pada tanggal 6 Maret 2014 pukul 16.15 WIB di Kurniawan tenun ikat ATBM Kota Kediri)

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan Ibu SR bagian HRD Hotel Grand Surya Kota Kediri. Berdasarkan program CSR yang dimiliki hotel Grand Surya memberi kesempatan bagi pengusaha UMKM untuk pameran di Hotel, tempatnya di lobby hotel.

“saat ini kami juga menjalin kerjasama dengan pengusaha UMKM yang tergabung dalam asosiasi UMKM Kota Kediri dengan mengadakan pameran di lobby hotel waktu pameran tidak lama cuma sekitar satu bulan saja, sebagai salah satu program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Selain salah satu program CSR dari hotel kami, tujuan kami mendukung adanya pameran ini maka dapat mendorong dan meningkatkan produk unggulan kota Kediri sehingga lebih dikenalkan banyak orang” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 13.15 di Lobby Hotel Grand Surya Kediri)

Selain bekerjasama dalam bentuk pameran, untuk mendukung produk unggulan Kota Kediri salah satunya adalah IKM tenun ikat Bandar Kidul, maka pihak hotel Grand Surya juga melakukan kerjasama dengan Tenun Ikat Medali Mas dalam bentuk kemitraan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu SR(HRD) hotel Grand Surya, bahwa:

“kita juga bekerjasama dengan IKM tenun ikat bandar kidul Medali Mas, kerjasama sudah sekitar 1 tahun. Kerjasama ini merupakan bentuk kemitraan tujuannya sharing profit. Dimana kami memiliki butik di hotel dan produk tenun ikat ditaruh di butik. Penjualan untuk souvenir ya 1-2 tergantung eventnya, kalau rame ya penjualannya banyak. Selain itu kita juga memiliki tujuan untuk mengenalkan tenun ikat kediri ke kalangan menengah ke atas, tenun ikat kediri ini kan sudah lama ada tapi masalahnya belum dikenal luas, karena itu dengan kerjasama ini diharapkan bisa lebih mempromosikan tenun ikat kepada masyarakat luas. Kalau pengunjung hotel mau melihat proses pembuatannya kami juga mengantarkannya ke perusahaan IKM tenun ikat untuk melihat proses pembuatannya” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 13.15 di Lobby Hotel Grand Surya Kediri)

2) Dukungan Keuangan

Dalam pengembangan IKM sangat diperlukan dukungan keuangan dari semua pihak baik pemerintah maupun swasta sebagai pengusaha besar. Dukungan keuangan yang harus diberikan oleh pihak swasta terhadap IKM di Kediri sehingga dapat meningkatkan kemampuan produksi bagi IKM. Berdasarkan pendapat Bapak Rudi dan Ibu Siti tidak ada sama sekali bantuan modal dari pihak swasta, bantuan modal didapat dari pemerintah melalui skim kredit dan modal pribadi. Bapak R selaku mengatakan bahwa pihak swasta tidak memberi bantuan sama sekali, beliau menjelaskan bahwa:

“bantuan dari swasta selama ini tidak ada sama sekali, kalau modal kami modal pribadi” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 10.10 WIB di Mikimos Industri Tahu Kota Kediri)

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu S selaku pemilik industri tenun ikat medali mas dimana pihak swasta tidak pernah memberi bantuan modal sama sekali.

“pihak swasta seperti Gudang Garam selama ini tidak pernah memberi bantuan dalam bentuk modal. Modal selama ini modal pribadi dan terkadang juga memanfaatkan kredit dari pemerintah, meski tidak ada bantuan modal dari swasta tapi permodalan bukan menjadi permasalahan bagi industri saya. Bantuan permodalan kalau dari bank biasanya dalam bentuk pinjaman, banyak bank-bank yang menawarkan untuk pinjaman, tapi kalau pinjaman saya belum begitu perlu. Mungkin kalau pinjam itu digunakan untuk beli lahan untuk showroom dan butuh renovasi, tapi kalau untuk modal jalan tidak usah. Biasanya orang pesenkan sudah pakek uang DP jadi ya tidak ada masalah” (wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 11.00 WIB di Medali Mas tenun ikat ATBM Kota Kediri)

Pendapat dari Ibu S tersebut didukung oleh pendapat dari Bapak A pemilik industri tenun ikat Kurniawa yang menjelaskan bahwa:

“Belum ada dukungan keuangan dari swasta seperti Gudang Garam dan pabrik gula santren. Kalau dari Bank ya bentuknya pinjaman bukan diberikan secara cuma-cuma. Dulu banget saya pernah pinjam ke Bank BRI tahun 2000’an kalau tidak salah bunganya dulu 1,5% perbulan” (wawancara pada tanggal 6 Maret 2014 pukul 16.15 WIB di Kurniawan tenun ikat ATBM Kota Kediri)

3) Peran Masyarakat

Masyarakat dalam penelitian ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk meningkatkan pemberdayaan IKM tidak hanya peran swasta dan pemerintah saja yang diperlukan tapi bagaimana LSM juga dapat memberi dukungan terhadap pengembangan IKM. Lembaga Swadaya Masyarakat yang dimaksud adalah Yayasan Bina Negeri, Asosiasi Industri Tenun Ikat, Asosiasi Industri Tahu. Peran masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan IKM adalah:

1) Pendidikan dan Pelatihan

Yayasan Bina Negeri merupakan lembaga swadaya masyarakat dimana memiliki program kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM yang bertugas membantu menyelesaikan masalah pengusaha mikro, kecil dan menengah melalui serangkaian pembinaan yang profesional dan terpadu. Yayasan Bina Negeri juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Disperindagtamben dalam memberikan pelatihan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak B selaku direktur Yayasan Bina Negeri dimana beliau menjelaskan, bahwa:

“Yayasan Bina Negeri merupakan LSM yang memberikan pelatihan terhadap UMKM, melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Disperindagtamben dalam memberikan pelatihan manajemen usaha dari masalah pemasaran, menentukan harga pokok produk, pembukuan yang sederhana. Pelatihan dilakukan rutin dalam setahun paling tidak ada 3 kali pelatihan. Sebelum melakukan pelatihan kita selalu memberikan motivasi terlebih dahulu supaya mereka lebih memiliki semangat dalam berwirausaha. Pelatihan untuk wirausaha baru atau calon wirausaha, pelatihan dimulai dari menggali ide bisnis sampai dengan membuat *business plan* (rencana bisnis)” (wawancara pada tanggal 21 Maret 2014 pukul 9.30 WIB di Yayasan Bina Negeri)

Dalam membuat tenun ikat ATBM dan Tahu bukan suatu yang mudah dilakukan oleh semua orang. Pembuatan produk ini tidak menggunakan mesin dan dibuat secara tradisional sehingga dibutuhkan skill dari pegawai. Untuk memperkuat skill dari pegawai ini diperlukan pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat produk. Inovasi-inovasi dalam pembuatan motif yang lebih bagus dan menarik juga diperlukan keterampilan, oleh karena itu dibentuklah asosiasi tenun ikat, sehingga pelaku IKM tenun ikat dapat

saling bekerjasama untuk mengatasi permasalahan yang ada dan merupakan salah satu tempat *sharing* inovasi dan kreatifitas bersama sehingga tenun ikat akan tetap bertahan dan berkembang. Seperti yang telah diungkapkan Ibu S selaku ketua asosiasi tenun ikat dan pemilik tenun ikat medali mas, beliau menjelaskan bahwa:

“Dengan adanya asosiasi dan perkumpulan ini maka jika ada permasalahan kita bisa selesaikan bersama, kadang kita juga melakukan perkumpulan dan kadang hanya berbagi cerita melalui sms atau telepon. Asosiasi juga merupakan tempat untuk *sharing* berbagai pengetahuan tentang inovasi dalam mengembangkan tenun ikat. Jika ada yang tidak mengerti maka saling membantu dan memberitahu sehingga menjadi lebih mengerti. Dulu kita juga memiliki koperasi dan paguyuban tenun ikat, tapi karena pengurus yang dulu sudah tidak ada jadinya koperasi juga tidak berjalan. Dan anggota koperasi yang masih kurang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinak Koperasi bahwa setidaknya koperasi memiliki 20 anggota, tapi saat ini anggota belum mencapai 20 orang. Saat ini masih difikirkan untuk menambah pegawai lagi dan dalam waktu dekat ini kami memiliki rencana untuk menjalankan koperasi lagi. Jika ada koperasi maka akan mudah untuk mendapat bantuan dari pemerintah, untuk memperoleh bantuan dari pemerintah biasanya diperlukan koperasi sebagai sarannya”

Menurut Bapak A selaku pemilik industri tenun ikat Kurniawa Asosiasi tenun ikat dulu aktif ada paguyuban juga ada koperasi tapi sekarang sudah tidak aktif lagi seperti dulu. Saat ini asosiasi menurut beliau hanya berperan dalam memberikan informasi teknis mengenai undangan pameran yang diadakan pemerintah dan pembinaan-pembinaan yang diadakan pemerintah saja.

“permasalahannya asosiasi sudah tidak aktif lagi seperti dulu, jadi saat ini kurang kerjasama antara industri yang satu dengan yang lainnya. Adanya asosiasi bisa ngajarin yang gak bisa akhirnya jadi bisa” (wawancara tanggal 6 Maret 2014 pukul 16.15 WIB di Kurniawan tenun ikat ATBM Kota Kediri)

2) Memberikan Konsultasi Bisnis

Yayasan Bina Negeri memberikan konsultasi bisnis secara gratis untuk UMKM. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak B selaku direktur Yayasan Bina Negeri, menjelaskan bahwa:

“yayasan kami memberikan konsultasi bisnis untuk pelaku UMKM jika ada masalah berkaitan dengan usahanya bisa menghubungi kami. Dulu sebelum berganti nama menjadi Yayasan Bina Negeri, LSM ini dulunya adalah klinik UMKM. Seperti arti klinik sesungguhnya bahwa klinik merupakan tempat untuk berkonsultasi, mencari permasalahan dan memecahkannya dengan konsultasi yang berpengalaman dibidangnya. Begitu juga klinik UMKM ini merupakan sarana yang seharusnya dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengkonsultasikan masalah usahanya dan memecahkannya. Tapi sayangnya sampai sekarang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM”

Adanya Konsultasi Bisnis yang diberikan oleh Yayasan Bina Negeri dirasakan oleh Bapak A selaku pemilik industri tenun ikat Kurniawan beliau menjelaskan bahwa:

“adanya Yayasan Bina Negeri sangat membantu, kita bisa konsultasi permasalahan industri dan dibantu untuk mencari pemecahan masalahnya, saya juga kadang kalau ada masalah tentang industri konsultasi dengan yayasan bina negeri”

3) Pendampingan UMKM

Pendampingan UMKM ini merupakan program pendampingan terhadap UMKM yang dilakukan oleh konsultan dari Yayasan Bina Negeri. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak B selaku Direktur Yayasan Bina Negeri, bahwa:

“pendampingan umkm ini konsultan turun langsung ke lapangan mendatangi UMKM mengidentifikasi masalah dan mencarikan solusinya.

Pelaku UMKM diajak observasi ke perusahaan yang sudah maju sehingga memiliki motivasi untuk berkembang”

Hal tersebut didukung oleh Ibu S selaku pemilik industri Medali Mas bahwa:

“Yayasan Bina Negeri biasanya mengajaka kita untuk studi banding ke perusahaan yang lebih besar sehingga kita juga ada motivasi lebih untuk berkembang”

4) Informasi

Dalam pengembangan IKM peran LSM melalui asosiasi tenun ikat dan tahu adalah pengembangan produksi dimana dengan adanya asosiasi tersebut diharapkan produk yang dihasilkan lebih bervariasi dan inovatif.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti selaku ketua Asosiasi tenun ikat dan pemilik industri tenun ikat Medali Mas, bahwa:

“dengan adanya asosisasi dan perkumpulan ini maka jika ada permasalahan kita bisa selesaikan. Dan sharing berbagai pengetahuan tentang inovasi dalam mengembangkan tenun ikat. Jika ada yang tidak mengerti maka saling membantu dan memberitahu sehingga menjadi lebih mengerti. Asosiasi tenun ikat ini juga berperan dalam memberikan informasi kepada pengusaha tenun ikat lainnya jika ada event pelatihan dan pameran” (wawancara pada tanggal 7 Maret 2014 pukul 10.30 WIB di Medali Mas Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

Pendapat tersebut didukung oleh Bapak A selaku pemilik industri tenun ikat Kurniawan bahwa:

“asosiasi meski sekarang sudah tidak aktif seperti dulu namun masih tetap menjaga komunikasi dengan pengrajin tenun ikat lainnya jika ada informasi tentang event pameran selalu dikabari dan diajak” (wawancara pada tanggal 6 Maret 2014 pukul 16.15 WIB di Tenun Ikat Kurniawan ATBM Kota Kediri)

2. Peningkatan perekonomian lokal

Perekonomian lokal merupakan salah satu aspek dalam pembangunan daerah, dengan adanya perekonomian lokal dapat terlihat seberapa besar pembangunan daerah tersebut dapat berjalan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, tenaga kerja, dan modal investasi sehingga mampu menumbuhkan kewiraswastaan yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Keberhasilan pengembangan perekonomian lokal dapat dilihat dari beberapa indikator:

1) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha

Peningkatan perekonomian lokal terlihat dengan adanya perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan berusaha di Kota Kediri. Semakin meningkatnya jumlah industri di Kota Kediri merupakan wujud tumbuhnya kewiraswastaan lokal di Kota Kediri. meningkatnya industri ini dapat merangsang pertumbuhan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak D selaku Kepala Seksi Bidang Industri Disperindagtamben bahwa pertumbuhan IKM di Kota Kediri semakin meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini jumlah IKM formal di Kota Kediri sebanyak 560 industri/unit usaha, sedangkan IKM non formal kurang lebih sebanyak 1.300 industri/unit usaha. Perkembangan IKM selalu meningkat karena selalu ada industri baru hal ini terlihat dari izin dan survey lapangan. Meningkatnya jumlah IKM memiliki pengaruh terhadap peluang kerja bagi

masyarakat sekitar, yang berarti dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di Kediri, beliau menjelaskan bahwa:

“industri kecil menengah saat ini jumlahnya yang formal sekitar 560 industri/unit usaha, sedangkan yang non formal sekitar 1300 industri/unit usaha. Meskipun begitu jumlah IKM selalu mengalami peningkatan dan selalu ada industri baru yang terlihat dari izin pembangunan industri dan survey lapangan. Dengan pertumbuhan industri yang selalu meningkat ini berpengaruh pada pekerja yang dipekerjakan di industri, semakin banyak industri di Kediri maka pengangguran juga semakin sedikit” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2013 pukul 9.00 WIB, Kantor Kepala Bidang Industri Disperindagtamben)

Berdasarkan data yang didapat dari Bidang Industri Disperindagtamben Kota Kediri data IKM Kota Kediri tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan jumlah. Jumlah IKM pada tahun 2012 keseluruhan mencapai 614 industri/unit usaha. Sedangkan jumlah IKM pada tahun 2013 keseluruhan mencapai 635 industri/unit usaha. Berdasarkan data tersebut bahwa IKM mengalami peningkatan dalam setiap tahun, dan ini berarti meningkatkan jumlah wiraswasta di Kota Kediri. Dengan meningkatnya jumlah IKM maka implikasi yang terjadi adalah terbukanya lapangan kerja untuk masyarakat sekitar IKM.

Hal ini didukung dengan pendapat Ibu S pemilik tenun ikat, dimana dulunya pekerja yang bekerja hanya beberapa pekerja saja. Seiring berkembangnya industri yang dimiliki beliau saat ini pegawai di tempat Medali Mas sudah mencapai 70 orang pegawai. Selain itu dulunya IKM tenun ikat di Kediri berdiri hanya beberapa industri saja, namun saat ini sudah mencapai 19 industri di Kota Kediri. Semakin banyak industri tenun ikat maka dijadikanlah sentra industri tenun ikat, dengan harapan industri ini

dapat merangsang jiwa kewiraswastaan masyarakat sekitar dalam peningkatan perekonomian lokal.

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak A selaku pemilik IKM tenun ikat Kurniawan mengenai jumlah pegawai yang meningkat setiap tahunnya, beliau menjelaskan bahwa:

“Jumlah pegawai tahun lalu sekitar 20 pekerja, sekarang meningkat menjadi 25 pekerja yang bekerja di tenun. Dan yang dibawa pulang seperti kegiatan mengikat itu kami tidak tahu jumlahnya berapa. Seperti ibu-ibu yang punya waktu luang itu yang mengambil” (wawancara 6 Maret 2014 pukul 16.15 WIB di Kurniawan Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

Tumbuhnya kewiraswastaan di Kediri tidak hanya berkembang di sentra industri tenun ikat saja, melainkan juga berkembang di industri tahu takwa, begitupun industri yang ada di Kediri lainnya. Industri tahu takwa sendiri di Kediri sudah mencapai jumlah 30 industri tahu, dengan meningkatnya jumlah industri tahu di Kediri sangat terlihat bahwa semakin banyak perusahaan lokal dan meningkatkan tumbuhnya kewiraswastaan di Kota Kediri. Dampak positif yang terlihat dari tumbuhnya industri adalah menurunnya pengangguran dan memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar, yang berdampak pula terhadap perekonomian suatu daerah.

Dampak negatif juga dirasakan oleh Bapak R pemilik perusahaan tahu Mikimos ini, beliau mengungkapkan bahwa:

“dikarenakan semakin banyak industri tahu yang ada di Kediri membuat pendapatan dari tahun ke tahun semakin menurun, apalagi kalau hari biasa seperti ini. Persaingan juga semakin ketat karena semakin banyak industri tahu non formal yang berdiri di Kediri. Dengan kondisi seperti ini jadinya pegawai yang bekerja disini juga tidak banyak selain penjualan semakin menurun maka kami juga tidak bisa memperkerjakan pegawai banyak. Kalau lagi liburan, kami baru

menambah pegawai dan menambah jumlah produksi tahu” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 10.10 WIB di Industri Tahu Mikimos Kota Kediri)

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak M selaku pegawai tenun ikat dimana beliau menjelaskan, bahwa:

“adanya tenun ikat bandar kidul ini memberikan kesempatan kerja bagi saya dan teman-teman saya yang lainnya. Jika tidak ada tenun ikat ini saya juga tidak tau harus bekerja dimana lagi” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.15 WIB di pabrik tenun ikat Kurniawan Kota Kediri)

Pendapat Bapak M ini didukung oleh pendapat dari Bapak R yang bekerja sebagai pengrajin tenun ikat Bandar Kidul dimana beliau menjelaskan, bahwa:

“dengan adanya industri tenun ikat ini sangat memberikan kesempatan kerja bagi saya, tempatnya juga dekat dengan rumah jadi lebih enak. Dan karena saya juga tidak memiliki keahlian yang lain jadi saya ikut kerja disini dan berlatih terlebih dahulu” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.15 WIB di pabrik tenun ikat Kurniawan Kota Kediri)

Adanya kesempatan kerja juga dirasakan oleh S penjaga toko tahu Mikimos beliau juga menjelaskan bahwa:

“saya sangat bersyukur bisa bekerja di toko mikimos ini karena dengan adanya toko mikimos saya jadi memiliki pekejaan, meski hanya menjaga toko tapi ini sangat bermafaat bagi saya, yang hanya lulusan smp” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 15.00 di toko tahu Mikimos Kota Kediri)

Selain memberi kesempatan bekerja bagi masyarakat sekitar, ikm ini juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk membuka usahanya sendiri. Seperti mitra binaan dari tenun ikat medali mas, dulunya merupakan pegawai dari medali mas namun saat ini sudah memiliki usaha tenun ikatnya

sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu S selaku pemilik industri medali mas, bahwa:

“saya sudah memiliki mitra binaan dimana ada 3 orang yang dulunya merupakan pegawainya sekarang sudah memiliki Industri sendiri yaitu Munasir (Prambon – Kras), Mulyadi (Juwet – Ngrongot Nganjuk), Munari (Jabang – Ngrongot Nganjuk)” (wawancara pada tanggal 7 Maret 2014 pukul 10.30 WIB di Medali Mas tenun ikat ATBM Kota Kediri)

2) Perluasan Peningkatan pendapatan

Selain memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar IKM Kota Kediri juga memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pendapatannya. Seperti yang dijelaskan Bapak M selaku pegawai tenun ikat, bahwa:

“meski pendapatan yang saya dapat belum sesuai standar UMR tapi sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun bisa dibilang masih kurang. Karena sistem pengupahan borongan jadi semakin banyak produk yang dihasilkan maka upahnya ya ditambah. Biasanya sehari saya menghasilkan 2 potong. Kalau hari-hari biasa gak ada pesanan yang upahnya sedikit, tapi kalau ada pesanan upahnya lebih banyak lagi” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.15 WIB di pabrik tenun ikat Kurniawan Kota Kediri)

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak R selaku pegawai tenun ikat badar kidul Kurniawan mengatakan, bahwa:

“upah yang diberikan berdasarkan produk yang dihasilkan kalau produk yang dihasilkan sedikit maka upah yang diberikan sedikit. Upah yang diberikan kalau buat makan saja cukup tapi kalau buat yang lain-lain kurang” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.15 WIB di pabrik tenun ikat Kurniawan Kota Kediri)

3) Keberdayaan lembaga usaha ‘mikro dan kecil’ dalam proses produksi dan pemasaran

Keberdayaan lembaga usaha “mikro dan kecil” dalam proses produksi dan pemasaran ini dapat dilihat dari sejauhmana produksi yang sudah dihasilkan dan terjual dalam perharinya atau pertahunnya. Untuk melihat perkembangan dari IKM di Kediri Disperindagtamben selalu melakukan evaluasi setiap akhir tahun apakah perusahaan berjalan dengan baik atau tidak, yang dilihat dari laporan produksi. Evaluasi juga dilakukan untuk melihat apakah perusahaan juga bisa menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak R dimana pemerintah selama ini memberikan kontrol untuk perusahaan tahu yang dikelola oleh beliau setiap tahunnya. Beliau menjelaskan, bahwa:

“ Kontrol yang diberikan pemerintah ini seperti kontrol harga kedelai supaya perusahaan tidak terlalu berat dalam mendapatkan bahan baku, selain itu juga dilakukan kontrol lingkungan melihat apakah membuang limbah pada tempatnya atau tidak. Setiap harinya perusahaan tahu milik Bapak Rudi ini mampu memproduksi sekitar 600 tahu dalam perhari, dan kalau kondisi sedang sepi maka yang laku hanya sekitar 400-500 tahu dalam perhari”. (wawancara tanggal 22 Januari 2014 pukul 10.10 WIB di Mikimos Tahu takwa Kota Kedri)

Meski Bapak R menyadari pendapatan yang diterima dari tahun ketahun mengalami penurunan dikarenakan jumlah industri tahu yang semakin banyak di Kediri dan industri non formal yang semakin banyak pula membuat persaingan semakin meningkat, namun perusahaan beliau masih mampu bertahan dalam persaingan yang ketat setiap tahunnya. Penurunan

pendapatan yang dialami industrinya bukan menjadi halangan, dengan memberikan kualitas yang baik dari segi produk dan pemasaran maka industrinya mampu memiliki pelanggan tersendiri. Terbukti dengan jumlah tahu yang mampu terjual setiap harinya.

Kemampuan dalam mengembangkan usaha bukan hanya dimiliki oleh industri tahu saja, namun industri tenun ikat milik Ibu S selaku pemilik industri tenun ikat medali mas ini juga merupakan industri yang mampu berkembang dalam setiap tahunnya. Beliau menjelaskan, bahwa:

“Dalam satu hari tenun ikat yang dihasilkan kurang lebih 30-35 tenun dalam sehari, dengan jumlah karyawan kurang lebih 70 orang, kain tenun ikat dijual dengan harga rata-rata Rp 130.000,- per tenun. Bahan baku import dari India, Polandia, Jerman yang beliau dapat dari Surabaya, dengan bahan baku yang terbaik maka menjadi jaminan kain tenun yang dihasilkan oleh industrinya adalah yang terbaik. Menjaga kualitas merupakan strategi utama dari perusahaan kami” (wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 11.00 WIB di Medali Mas tenun ikat ATBM Kota Kediri)

Dengan memberikan kualitas yang terbaik maka industrinya juga memiliki pelanggan tersendiri. Selain memberikan kualitas produk yang baik, beliau juga memberi kemasan yang menarik dan diberikan alamat yang lengkap dalam kemasannya, sehingga pelanggan yang merasa puas dapat kembali lagi. Memberikan kualitas yang baik diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi industri beliau, selain mempertahankan pelanggan yang sudah ada diharapkan dapat menambah pelanggan baru.

Industri tenun ikat kurniawan setiap hari menghasilkan kurang lebih 25 tenun ikat, setiap pegawai menghasilkan satu tenun ikat. Masalah jumlah

terjual tidak pasti dalam sehari bisa terjual berapa potong, biasanya kita juga menerima pesanan, kalau ada pesanan akan terlihat pasti berapa yang terjual.

Pemasaran produk dapat terlihat dari pelanggan dari IKM itu sendiri pemasaran masih ditingkat lokal atau sudah nasional. Perkembangan perusahaan tidak hanya diharapkan mampu berkembang ditingkat lokal, tetapi juga diharapkan mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. Berkembangnya perusahaan keluar lokalitas dapat dilihat dari pelanggan-pelanggan yang dimiliki dari perusahaan tersebut.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak D selaku Kepala Bidang Industri Disperindagtamben dimana saat ini IKM di Kediri diharapkan tidak hanya mampu berkembang di tingkat lokal namun juga harus mampu menembus pasar nasional bahkan internasional, langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengikuti pameran nasional.

“IKM di Kediri kami harap mampu menembus pasar nasional bahkan kalau bisa menembus pasar internasional. Kami memfasilitasi IKM yang ingin mengikuti pameran di tingkat nasional, kemarin kami juga mengikuti pameran yang diadakan oleh Jakarta Fair. Diharapkan dengan mengikuti pameran tersebut produk-produk IKM yang ada di Kediri dapat dikenal oleh daerah-daerah lainnya. Saat ini produk IKM di Kediri yang sudah dikenal ditingkat nasional adalah tenun ikat. Dulu juga hampir ada pesanan dari internasional tapi tidak jadi dikarenakan pesanan yang terlalu banyak dengan deadline waktu yang terbatas sehingga sulit untuk memenuhi pesanan tersebut akhirnya gagal” (wawancara pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 09.00 WIB di Kantor Bidang Industri Dipserindagtamben)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Siti, dimana beliau saat ini juga tidak hanya menerima pesanan dari lokal saja tapi juga dari daerah lain yaitu Jakarta, Palembang, Kalimantan. Dengan meluasnya jaringan pemasaran tenun ikat maka dapat dikatakan bahwa industri tenun ikat sudah dapat

berkembang keluar lokalitas. Namun hal ini tidak serupa dengan perusahaan tahu yang memiliki sifat oleh-oleh dengan batas waktu yang hanya sehari saja. Sulit untuk menembus pasar nasional selama ini skala penjualan hanya ditingkat lokal. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak R selaku pemilik industri tahu sebagai berikut:

“karena skalanya adalah home industri dan sifatnya oleh-oleh maka sulit untuk menembus pasar nasional. Dikarenakan batas waktu dari tahu yang kami jual hanya sehari maka akan sulit bertahan lama, sedangkan pengiriman dari daerah ke daerah lain tidak mungkin hanya satu hari sampai. Jadi selama ini penjualan hanya terbatas di tingkat lokal saja. Dan kami juga tidak mau ambil resiko” (wawancara pada 22 Januari pukul 10.10 WIB di Mikimos tahu takwa Kota Kediri)

Produk pemasaran dari tenun ikat Kurniawan juga sudah ditingkat nasional, selain menggunakan pameran sebagai sarana promosi, tenun ikat kurniawan juga memanfaatkan teknologi internet dengan menggunakan penjualan dengan sistem *online* sehingga pembeli tidak hanya dari tingkat lokal kediri saja tapi dari daerah lain juga. Seperti Timika, Aceh dan Palembang. Akhir-akhir ini tenun ikat Kurniawan juga mendapat pesanan dari Flores yang memesan tenun ikat dalam jumlah yang banyak dan akan dijual lagi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak A selaku pemilik industri tenun ikat kurniawan, bahwa:

“selain promosi melalui pameran kami juga menggunakan sistem *online* untuk menjual produk lebih luas lagi. Sampai saat ini sudah 1 tahun kami menggunakan sistem penjualan *online*, dan sudah banyak pesanan dari luar daerah kemarin juga baru ada pesanan dari Aceh, Palembang, dan Timika. Kami juga menjalin kerjasama dengan pelanggan yang memesan produk dalam jumlah banyak dan hendak dijual kembali, kemarin kami juga mendapat pesanan dari orang Flores yang memesan tenun ikat dalam jumlah yang lumayan banyak dan jika hasilnya memuaskan kerjasama ini akan berlangsung lama”

4) Keberdayaan ‘kelembagaan jaringan kerja’ kemitraan antara pemerintah, usaha swasta dan masyarakat lokal

Adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat (LSM), merupakan salah satu wujud keberhasilan dari pengembangan perekonomian lokal. Kemitraan anatara ketiga aktor terlihat dari adanya kerjasama dari masing-masing aktor untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui pengembangan IKM. Kerjasama dapat terjalin antara pemerintah dengan IKM melalui pengembangan produksi, pameran, dan permodalan yang diberikan pemerintah. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan LSM yaitu Yayasan Bina Negeri, seperti yang dijelaskan oleh Bapak B selaku Direktur Yayasan Bina Negeri bahwa:

“untuk meningkatkan produk-produk UMKM yayasan juga bekerjasama dengan pemerintah, dan lebih banyak berinteraksi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri, Kementerian Koperasi, Disperindagtamben Kota Kediri, selain itu pemerintah juga memfasilitasi klinik UMKM dan membayar konsultan. Namun koordinasi antara pemerintah kurang bagus, Disperindagtamben dan Dinas Koperasi cenderung berjalan sendiri-sendiri, dan memiliki fokus masing-masing terhadap pengembangan UMKM. Seandainya mereka dapat bekerjasama dan berjalan beriringan maka akan lebih baik” (wawancara tanggal 21 Maret 2014 pukul 9.30 di Kantor Yayasan Bina Negeri)

Pemerintah juga berusaha untuk menumbuhkan industri dan menghasilkan produk unggulan daerah. Dengan dimilikinya produk-produk unggulan yang berbeda dan mampu bersaing dengan daerah lain. Hal ini yang selalu diusahakan oleh pemerintah. Seperti yang disampaikan Bapak D selaku Kepala Bidang Industri Disperindagtamben, berikut:

“dengan memberikan fasilitas dan bantuan pelatihan terhadap industri, menumbuhkan industri dan menciptakan kondisi yang kondusif, serta menggali potensi dengan mengembangkan produk. Diharapkan dapat menumbuhkan industri andalan, unggulan dan ekspor. Yang artinya menumbuhkan industri sebanyak-banyaknya dan diseleksi menjadi unggulan dan kita ekspor. Dan mengembangkan OVOP (*One Village One Product*) dimana sudah kita lakukan, satu kelurahan satu produk, yang dapat dilihat dari sentra industri tenun ikat yang menjadi salah satu produk unggulan Kota Kediri” (wawancara pada tanggal 20 Maret 2014 pukul 09.00 WIB di Kantor Kepala Bidang Industri Kota Kediri)

Dengan dimilikinya produk unggulan Kota Kediri dan melakukan pendekatan OVOP diharapkan dapat mengangkat citra produk budaya lokal menjadi produk yang memiliki daya saing global. Selain bekerjasama dengan pemerintah dan LSM, juga terdapat kerjasama antara pihak IKM dengan swasta. Kerjasama dilakukan melalui kemitraan maupun CSR. Kerjasama ini dilakukan dengan Hotel Grand Surya dimana IKM tenun ikat sudah bekerjasama dengan hotel ini sejak lama kurang lebih satu tahun. Tujuan kerjasama selain *sharing profit* adalah untuk mempromosikan produk unggulan tenun ikat kepada kalangan menengah ke atas, sehingga akan lebih dikenal banyak orang. Pameran juga dilakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengenalkan produk ke masyarakat luas.

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran stakeholder dalam meningkatkan perekonomian Kota Kediri melalui IKM, yang meliputi:

a. Faktor pendukung

1) Pembinaan Melalui Pelatihan

Faktor pendukung yang pertama yaitu adanya pembinaan dari pemerintah untuk pengusaha IKM dalam bentuk pelatihan-pelatihan baik pelatihan dalam bentuk kemasan (*packing*) dan pembukuan. Dengan adanya pelatihan yang diberikan pemerintah ini maka akan membantu pengusaha IKM untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengemas produknya sehingga dapat menarik minat pelanggan. Pemerintah juga menyediakan konsultasi kemasan secara gratis di kantor Bidang Industri Disperindagtamben. Adanya pelatihan pembukuan juga dapat membantu pengusaha IKM dalam mengelola industrinya. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan ini dibenarkan oleh Ibu S selaku pemilik inudstri tenun ikat Medali Mas, bahwa:

“selama ini pemerintah telah memberikan pelatihan-pelatihan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan produksi, selain memberi pelatihan *packing* dan pembukuan. Pemerintah juga memberikan pelatihan bagaimana menggunakan pewarnaan secara alami, tujuannya adalah agar lebih ramah lingkungan” (wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 11,00 WIB di Medali Mas Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

Pendapat Ibu S ini juga didukung oleh pendapat Bapak A selaku pemilik tenun ikat kurniawan dimana beliau menjelaskan , bahwa:

“pelatihan yang diberikan pemerintah sangat berguna bagi kelangsungan usaha saya. Pemerintah dulu memberikan pelatihan teknis seperti pewarnaan alami, menggunakan bahan-bahan alami. Dan pelatihan pembukuan sederhana” (wawancara pada tanggal 6 Maret pukul 16.15 WIB di Kurniawan tenun ikat ATBM Kota Kediri)

Kerjasama untuk meningkatkan pengembangan IKM dilakukan dengan pelatihan-pelatihan yang bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi dan daerah lain. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak D selaku

Kepala Bidang Industri Disperindagtamben tentang kerjasama pelatihan dengan lembaga perguruan tinggi dan daerah lain, bahwa:

“Pelatihan untuk kemasan minuman dan makanan kami bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi seperti ITS dan daerah lain seperti Sidoarjo” (wawancara pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 09.00 WIB di Kantor Kepala Bidang Industri Disperindagtamben)

2) Kualitas Produk

Kualitas produk yang baik merupakan unsur utama dalam memperthankan IKM di Kediri. Menggunakan bahan-bahan yang terbaik dan mengemas produk sebaik mungkin sehingga menarik pelanggan dan dengan kualitas yang baik juga dapat mempertahankan pelanggan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu S selaku pemilik industri tenun ikat Medali Mas, bahwa:

“kualitas produk harus diutamakan baik dari design, kemasan yang baik, kualitas warna yang baik tidak mudah luntur dan warna yang dapat bertahan lama, serta kualitas benang yang terbaik dan tidak mudah rusak” (wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 11.00 WIB di Medali Mas Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

Begitu juga pendapat dari Bapak R selaku pemilik industri tahu yang mendukung pendapat Ibu S tentang kualitas produk, beliau menjelaskan, bahwa:

“kita harus jaga kualitas, dalam pemasaran dan penjualan agar pembeli tidak kecewa” (wawancara pada tanggal 22 Maret 2014 pukul 10.10 WIB di Mikimos tahu takwa Kota Kediri)

Pelayanan yang terbaik yang patut diberikan untuk pelanggan, sehingga pelanggan akan merasa dihargai dan senang yang berdampak

positif terhadap penjualan produk. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak R selaku pemilik industri tahu, bahwa:

“untuk menjaga kepercayaan pelanggan maka diperlukan pelayanan yang baik, sehingga mereka dapat kembali lagi karena merasa puas” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 10.10 WIB di Mikimos tahu takwa Kota Kediri)

3) Adanya event kegiatan di Kediri

Seperti yang telah di ungkapkan Bapak R selaku pemilik industri tahu dimana adanya event-event yang ada di Kediri dapat meningkatkan penjualan produksi tahu, beliau menjelaskan, bahwa:

“dengan adanya event di Kediri seperti event pariwisata dan pameran di Kediri dapat meningkatkan hasil penjualan dari hari biasanya” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 10.10 WIB di Mikimos tahu takwa Kota Kediri)

Pendapat Bapak R ini juga didukung oleh Bapak A selaku pemilik industri tenun ikat Kurniawan beliau berpendapat bahwa:

“adanya event pameran yang diadakan oleh PEMKOT seperti pameran sangat mendukung promosi bagi produk kami, dan produk kami lebih dikenal oleh masyarakat luas” (wawancara pada tanggal 6 Maret 2014 pukul 16.15 WIB di Kurniawan tenun ikat ATBM Kota Kediri)

4) Kerjasama pameran dengan pihak swasta dan daerah lain

Kerjasama dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta yang dimaksud adalah Pamerindo selaku (Event Organizer) EO penyelenggara event pameran di Kediri, selain itu juga kerjasama pameran dengan daerah lain yang ada di Jawa Timur dimana disana terdapat showroom produk unggulan, sehingga produk unggulan dapat

ditaruh disana, yang bertujuan untuk mengenalkan produk di daerah lain.

Hal tersebut berdasarkan pendapat dari Bapak D selaku Kepala Bidang

Industri Disperindagtamben yang menjelaskan bahwa:

“kerjasama dengan pihak swasta juga kita lakukan seperti kerjasama dengan pihak Pamerindo selaku EO pameran di Kediri, dan kerjasama dengan Jatim, Jatim kan punya showroom unggulan jadi kita bisa menaruh produk unggulan kita disana” (wawancara pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 09.00 WIB di Kantor Kepala Bidang Industri Disperindagtamben)

Selain pameran kerjasama untuk pemasaran produk juga dilakukan dengan pihak swasta seperti kerjasama antara IKM dengan hotel-hotel yang ada di Kediri dan toko-toko yang ada di Kediri, selain itu juga kerjasama dengan provinsi JATIM untuk mempromosikan dan memasarkan produk IKM Kediri. Penjelasan tersebut berdasarkan pendapat Ibu S selaku pemilik industri tenun ikat Medali Mas, wawancara pada tanggal 7 Maret 2014 pukul 09.30 WIB di Medali Mas tenun ikat ATBM Kota Kediri, beliau menjelaskan bahwa:

“biasanya masalah pemasaran produk pelanggan ada yang membeli sendiri kesini (toko), tapi kami juga kerjasama dengan pihak Hotel yang ada di Kediri yaitu Hotel Grand Surya hotel terbesar di Kediri, disana barang kami taruh disana dan dijual pada pengunjung sebagai souvenir, selain itu barang juga ada di Dinas Koperasi & UMKM JATIM, dan Gedung Diskranada JATIM”

b. Faktor penghambat

Peran stakeholder dalam meningkatkan perekonomian Kota Kediri melalui IKM dalam perkembangannya pasti mengalami hambatan. Faktor penghambat tersebut yaitu:

1) Keterampilan Pegawai

Keterampilan pegawai yang rendah juga menjadi salah satu penghambat dalam mengembangkan suatu produk, yang dibuat secara tradisional yang masih mengandalkan kemampuan manusia bukan mesin. Dari pendapat para pengusaha IKM mereka sama-sama mengungkapkan bahwa faktor penghambat yang paling utama adalah keterampilan pegawai. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak A selaku pemilik industri tenun ikat Kurniawan, bahwa:

“faktor penghambatnya adalah pegawai, karena butuh keterampilan jadi proses mengajarnya yang lama, butuh waktu yang lama sampai bisa. Dan kurangnya keterampilan pegawai menghambat produksi, karena dalam 1 hari 1 pegawai menghasilkan 1 produk jadi akan susah untuk menghasilkan produk dengan jumlah banyak. Jumlah alat saat ini 25 alat, jumlah yang menenun hanya 20 orang, jadi dalam 1 hari kurang lebih kami hanya memproduksi 20 produk (tenun ikat)” (wawancara pada tanggal 6 Maret 2014 pukul 16.15 WIB di Kurniawan tenun ikat ATBM Kota Kediri)

Pendapat Bapak A tersebut juga didukung oleh pendapat dari Ibu S selaku pemilik industri Medali Mas, dimana beliau juga mengungkapkan tentang kendala keterampilan dari pegawai yang menjadi permasalahan. Beliau menjelaskan, bahwa:

“pegawai disini tidak semuanya memiliki keterampilan dalam menenun, jadi ada yang datang kesini memang sudah berpengalaman dan ada yang datang gak bisa sama sekali jadi harus mengajari dari 0, permasalahannya setiap orangkan beda-beda jadi ada yang diajari 2 minggu saja sudah bisa tapi ada juga yang sampai 1 bulan belum bisa-bisa” (wawancara pada tanggal 7 Maret 2014 pukul 09.30 WIB di Medali Mas Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak R sebagai pengusaha tahu dimana beliau juga menjelaskan bahwa untuk membuat tahu dengan cara

tradisional jadi pegawai harus memiliki keterampilan. Beliau menjelaskan selain keterampilan yang menjadi kendala tapi juga adanya kesulitan dalam mencari karyawan, bahwa:

“Kendalanya adalah skill karyawan untuk membuat tahu yang baikkan gak asal-asalan dan menjaga kualitas itu juga sulit, apalagi kalau apa yang kita harapkan tidak dapat dipenuhi oleh karyawan, jadi karyawan juga harus punya skill yang baik untuk memenuhinya” ” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 10.10 WIB di Mikimos tahu takwa Kota Kediri)

Dengan keterampilan yang terbatas yang dimiliki pegawai akan berdampak pada keterbatasan kapasitas produk. Untuk menghasilkan produk dengan jumlah yang banyak diperlukan kapasitas produksi yang mencukupi. Adanya kendala dalam berupa teknologi yang dapat membantu menghasilkan produk lebih cepat. Jumlah pegawai yang masih terbatas sehingga tidak mampu memenuhi pesanan yang banyak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu S:

“kendalanya adalah adanya pesanan yang banyak tapi kapasitas produksi yang masih terbatas” (wawancara pada tanggal 7 Maret 2014 pukul 09.30 WIB di Medali Mas Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

2) Teknologi yang kurang

Kurangnya teknologi yang dimiliki dikarenakan sifat home industri sehingga sulit untuk membuat produk dalam jumlah banyak dan bertahan lama. Yang berdampak negatif pada sulitnya menembus pusat perbelanjaan dan pasar nasional. Teknologi yang kurang dirasakan oleh Bapak Rudi untuk menghasilkan produk tahu yang tahan lama diperlukan

teknologi yang canggih, tapi itu yang menjadi kendalanya, untuk memiliki teknologi tersebut diperlukan modal yang tidak sedikit. Sedangkan modal yang diberikan pemerintah kurang mencukupi jika digunakan untuk menambah peralatan yang berteknologi. Bapak rudi menjelaskan, bahwa:

“mau maju gimana kan kita sistemnya tradisional jadi ya pembuatannya tradisional, untuk menghasilkan tahu dengan tingkat kadaluarsa yang lama itu juga diperlukan teknologi, tapi untuk teknologi itu perlu modal yang banyak, dan modal yang diberikan pemerintah maksimal 50 juta jadi kurang kalau buat modal nambah teknologi, ya akhirnya penjualan hanya tingkat lokal saja”

Pendapat dari Bapak R ini juga didukung oleh Bapak D selaku Kepala Bidang Industri Disperindagtamben, adanya teknologi yang kurang mempengaruhi hasil produksi IKM saat ini, beliau menjelaskan bahwa:

“teknologi yang kurang yang dimiliki oleh pelaku IKM berdampak pada produksi yang kurang maksimal, meski begitu untuk meningkatkan teknologi pemerintah selalu berupaya untuk memberikan pelatihan-pelatihan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi, namun masih belum maksimal dipergunakan oleh pelaku IKM, meskipun bersifat home industri namun dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan hasil produksi dan penjualan produk itu tidak masalah”

3) Faktor Cuaca

Adanya faktor cuaca menjadi faktor penghambat tersendiri bagi produksi tenun ikat, seperti yang diungkapkan oleh Ibu S , bahwa:

“Kendalanya faktor cuaca, kalau musim hujan itu ada masalah dalam proses pengeringan. Kan benangnya itu perlu dicelup ke zat pewarna, dan pengeringan saat musim kemarau itu bisa satu hari sudah kering tapi karena musim hujan jadi butuh waktu yang lebih lama hingga 3 hari” (wawancara pada tanggal 7 Maret 2014 pukul 09.30 WIB di Medali Mas Tenun Ikat ATBM Kota Kediri)

Pengaruh cuaca juga dirasakan oleh Bapak A selaku pemilik industri tenun ikat ATBM beliau menjelaskan bahwa:

“kendala yang dirasakan ya saat musim penghujan begini karena teknologi yang dimiliki terbatas dan proses pengeringan juga masih memanfaatkan sinar matahari jadi kalau musim penghujan juga akan menghambat produksi karena belum keringnya benang” (wawancara pada tanggal 6 Maret 2014 pukul 16.15 WIB di Kurniawan tenun ikat ATBM Kota Kediri)

C. Analisa Data

1. Peran *Stakeholder* dalam meningkatkan perekonomian lokal Kota Kediri melalui pemberdayaan IKM

a) Peran Pemerintah

1) Pengembangan Produksi

Pemerintah selalu berupaya untuk mengembangkan produksi IKM dalam rangka meningkatkan kualitas produk. Pengembangan produksi yang telah dilakukan oleh Disperindagtamben adalah pengembangan mutu yang dapat dilihat dari kualitas produk, produk yang berkualitas dapat dilihat dari standar sertifikasi yang dimiliki oleh setiap produk. Dalam mendapatkan kualitas produk yang terbaik pemerintah memberikan sertifikat halal untuk makanan, dan diberikannya hak merk dagang bagi para pengusaha. Adanya pengujian mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap produk-produk yang dimiliki oleh pengusaha. Selain itu pemerintah juga memberikan pelatihan pengemasan produk yang baik dan adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Pemerintah juga bekerjasama dengan LSM seperti lembaga perguruan tinggi untuk melakukan pembinaan dalam hal pengemasan dan lain-lain. Pemerintah juga memberikan sarana konsultasi gratis terhadap pelaku IKM yang memiliki permasalahan baik dalam produksi maupun dalam usahanya. Pengembangan produksi yang diberikan pemerintah ini juga dirasakan oleh pengrajin tenun ikat dan pengusaha tahu di Kota Kediri.

Namun berdasarkan data yang didapat diatas menyatakan bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah itu dilakukan dulu sekali namun saat ini sudah tidak lagi. Pemerintah dulu sangat aktif mengembangkan IKM tenun ikat namun saat ini peran pemerintah sudah berkurang. Selain itu peran pemerintah dirasa hanya sebagai kontrol saja, pelatihan-pelatihan dari pemerintah tidak ada. Dari pendapat pelaku IKM tersebut terlihat bahwa pemerintah dulu sangat aktif mengembangkan produksi IKM, namun saat ini peran pemerintah terlihat menurun dan cenderung melepaskan IKM yang sudah dirasa mampu bertahan sendiri.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, pasal 8 menjelaskan pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang industri secara seimbang, terpadu, dan terarah untuk memperkuat struktur industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri. Pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang industri dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam arti yang seluas-luasnya terhadap kegiatan industri. Berdasarkan

peraturan tersebut pembinaan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, namun kenyataannya yang dirasakan pelaku IKM saat ini pemerintah Kota Kediri dalam hal ini Bidang Industri Disperindagtamben mengalami kemunduran peran, dimana saat ini bidang industri dirasa kurang memberikan pelatihan yang rutin seperti dulu, dan hal ini juga akan menghambat perkembangan industri.

Peran pemerintah dalam pengembangan produksi menurut Euis Saedah meliputi arahan pengembangan mutu, arahan pengembangan manajemen, dukungan terhadap kegiatan *Research (R) & Development (D)*, Jasa Pengujian Mutu, Layanan teknologi. Pemerintah telah memberikan arahan dalam pengembangan mutu, pengembangan manajemen melalui pelatihan, namun yang sangat disayangkan adalah arahan yang diberikan pemerintah sudah tidak seaktif dulu lagi. Meski saat ini pelaku IKM sudah bisa mandiri, setidaknya pemerintah tetap memberikan pendampingan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku IKM. Palsnya terkadang pelaku IKM sendiri tidak menyadari masalah yang sedang dihadapi, jika pemerintah hanya menunggu pelaku IKM datang untuk berkonsultasi itu sama saja tidak akan ada penyelesaian dan perkembangan IKM juga akan mengalami permasalahan. Paling tidak setahun sekali pemerintah mendatangi IKM dan mendata serta mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh IKM. Pemerintah juga tidak harus berjalan sendiri bisa juga bekerjasama dengan LSM seperti Yayasan Bina Negeri yang

berkecimpung dalam menangani permasalahan UMKM dengan begitu sinergi antar pemerintah dan LSM juga akan berjalan dengan baik. Pemerintah juga bisa bekerjasama dengan swasta yang notabene sudah ahli dalam bidang manajemen maupun mengatasi permasalahan produksi dan mengembangkan produksi. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, LSM dan Swasta akan berpengaruh positif pada pengembangan IKM.

2) Pengembangan Pemasaran

Salah satu aspek penting dalam pengembangan IKM adalah pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu cara dimana memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Salah satu strategi pemasaran menurut Sjaifudin (1995: 66-75) adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi. Sedangkan menurut Euis Saedah peran pemerintah dalam pengembangan pemasaran itu meliputi pelayanan informasi, promosi serta fasilitas pameran.

Pengembangan pemasaran melalui pameran sudah dilakukan oleh pemerintah. Tujuan pameran sendiri adalah mengenalkan produk kepada masyarakat luas, implikasi dari pameran sendiri diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk. Pameran-pameran yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan IKM adalah pameran ditingkat regional yang dilakukan saat ada event-event tertentu di Kota Kediri, dan ada yang dilakukan setiap minggu dibelakang Pasaraya Sri Ratu.

Selain mengikuti pameran ditingkat regional, pemerintah juga memfasilitasi pelaku IKM yang menginginkan mengikuti pameran ditingkat provinsi maupun nasional. Pameran ditingkat provinsi biasanya bekerjasama dengan Dinas Koperasi yang ada di JATIM tempatnya di showroom produk unggulan JATIM. Pemerintah juga memfasilitasi pelaku IKM untuk mengikuti pameran ditingkat nasional seperti Jakarta Fair, dengan mengikuti pameran ditingkat provinsi maupun nasional diharapkan tingkat pemasaran produk semakin meluas tidak hanya ditingkat lokal saja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaku IKM Tahu manfaat pameran kurang dirasakan. Hal ini dikarenakan penjualan tahu takwa kota kediri merupakan produk oleh-oleh, jadi kalau tidak ada event seperti liburan atau lebaran itu sepi. Sayangnya juga perusahaan ini tidak memiliki strategi khusus untuk meningkatkan penjualan dan berjalan apa adanya.

Berbeda dengan yang dirasakan oleh pelaku IKM tenun ikat. Bahwa dengan adanya pameran sangat berpengaruh terhadap hasil penjualan dan meluasnya tingkat pemasaran yang tidak hanya terjual di tingkat lokal saja tapi juga nasional. Meski saat pameran tidak memperlihatkan dampak yang memuaskan dengan menyebar kartu nama dan brosur maka jika ada yang memesan dari luar kota bisa kami layani. Adanya pameran sangat membantu memperkenalkan produknya ke masyarakat luas, dan memperbesar tingkat penjualan dan pemasaran yang

tidak hanya ditingkat lokal. Hal ini terlihat dari pemesanan yang diterima dari luar kota seperti Aceh, Palembang dan Timika.

Pemerintah telah memberikan kontribusi terbaiknya untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Kota Kediri dengan mengadakan pameran sebagai salah satu upaya promosi. Sehingga dapat dikenal diseluruh lapisan masyarakat baik tingkat lokal maupun nasional. Dampak yang terlihat dari pameran tersebut adalah meningkatnya jumlah penjualan dan tingkat pemasaran dari produk. Sayangnya manfaat pameran kurang dirasakan oleh IKM tahu, dimana penjualan tahu dirasa kurang mengalami peningkatan.

3) Permodalan (Fasilitas Keuangan)

Dalam membangun, mengembangkan dan mempertahankan sebuah industri diperlukan modal. Disinilah peran pemerintah yang memberikan bantuan terhadap para pelaku IKM untuk membangun, mengembangkan dan mempertahankan industrinya. Bantuan permodalan dari pemerintah ini berupa pinjaman kredit bergulir yang diberikan pada pelaku IKM dengan bunga yang sangat kecil yaitu 6% pertahun. Untuk mendapatkan pinjaman kredit ini tidak begitu rumit hanya diperlukan data-data yang lengkap atau memenuhi syarat yang diberikan.

Untuk permasalahan permodalan bukan dirasa masalah yang utama dalam mengembangkan IKM Kota Kediri saat ini. Seperti yang telah diungkapkan para pelaku IKM saat ini permasalahan permodalan sudah

bukan merupakan permasalahan yang utama. Hal ini dikarenakan kebanyakan pesanan sudah menyertakan uang muka, jadi tidak begitu mengalami permasalahan mengenai modal. Sedangkan pinjaman-pinjaman diperlukan hanya untuk memperluas pabrik atau untuk menambah alat-alat.

Untuk masalah produksi seperti biasanya tidak ada permasalahan modal dan selama ini beliau menggunakan modal pribadi. Permasalahan yang dihadapi adalah ketika membutuhkan alat teknologi yang dapat mempertahankan masa berlaku dari tahu itu dibutuhkan modal yang banyak, namun modal yang diberikan dari pemerintah dirasa kurang cukup untuk itu.

Peran pemerintah mengenai permodalan ini juga senada dengan strategi pengembangan industri kecil menurut Sjaifudin (1995 : 66-75), dimana berkembangnya model penguatan *financial* bagi usahawan kecil akhir-akhir ini menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen pemerintah, komitmen pemerintah itu terwujud melalui “penyertaan modal sementara”. Komitmen pemerintah Kota Kediri dalam memberikan bantuan modal kepada para pelaku IKM ini sangat dirasakan oleh pelaku IKM. Dimana pemerintah Kota Kediri telah menyediakan dana kredit bergulir dari PAD untuk diberikan kepada pelaku IKM melalui kredit bergulir. Sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan IKM akan terus berkembang, dan mampu menghasilkan produk-produk unggulan.

b) Peran Swasta

Peran swasta dalam mengembangkan IKM juga sangat diperlukan, bukan hanya peran pemerintah. Dengan terlibatnya swasta dalam pengembangan IKM diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang dirasakan IKM. Peran swasta dalam mengembangkan IKM ini dapat terwujud melalui kemitraan antara IKM dengan swasta. Dalam penelitian ini swasta yang dimaksud adalah Hotel Grand Surya dan agen-agen yang bekerjasama dengan IKM. Diharapkan dengan terlibatnya pihak swasta sehingga meskipun semakin banyak perusahaan besar yang tumbuh di Kota Kediri tidak akan mematikan produksi IKM.

1) Dukungan Pemasaran

Dukungan pemasaran dari pihak swasta ini dapat terlihat dari bantuan yang diberikan oleh pihak swasta untuk meningkatkan penjualan dan mengenalkan produk IKM kepada masyarakat luas. Dukungan pemasaran bisa melalui pameran. Seperti yang sudah dilakukan oleh Hotel Grand Surya Kota Kediri dimana mereka menyediakan tempat untuk pameran bagi pelaku UMKM sebagai salah satu wujud CSR yang diberikan oleh hotel.

Selain pameran Hotel Grand Surya juga bekerjasama dengan IKM tenun ikat bandar kidul melalui kemitraan. Tenun ikat bandar kidul merupakan produk unggulan Kota Kediri dan dengan tujuan untuk lebih mengenalkan produk terhadap masyarakat luas, maka hotel menyediakan tempat berupa butik dimana produk tenun ikat dapat dijual di butik hotel

sebagai souvenir para tamu. Tujuan dari kerjasama ini adalah *sharing profit*. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak hotel dengan tenun ikat bandar kidul ini sudah berlangsung kurang lebih satu tahun. Penjualan produk di hotel tidak begitu maksimal, hanya 1-2 produk saja terjual. Namun dengan adanya kerjasama ini lebih membuat produk semakin dikenal masyarakat, dan pihak hotel juga menyediakan jasa untuk mengantarkan pengunjung yang ingin melihat proses pembuatan tenun ikat secara langsung di pabriknya. Sehingga jika ada pengunjung yang ingin memesan dengan jumlah yang banyak bisa langsung memesan pada pengrajin tenun ikat.

Kerjasama antara IKM dengan pihak swasta ini juga terdapat dalam PERDA Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 22 yang berisi “Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan”. Namun kenyataan tidak seperti itu seperti yang dirasakan oleh pelaku IKM bahwa untuk menempatkan produk di tempat perbelanjaan prosesnya dirasa sedikit berbelit-belit dan pelaku IKM tidak ada waktu untuk mengurus masalah perizinan tersebut.

Selain bekerjasama dengan perusahaan besar IKM juga bekerjasama dengan agen-agen perusahaan. Berdasarkan pola kemitraan keagenan, dalam pola ini memberikan kesempatan untuk usaha kecil sebagai distributor dari pemasaran barang yang dihasilkan usaha

menengah atau IKM. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anis dimana biasanya ada agen yang mengambil barang untuk dijual kembali atau diolah kembali menjadi barang jadi seperti baju.

2) Dukungan Keuangan

Dukungan keuangan dari pihak swasta ini berupa pinjaman yang diberikan kepada pelaku IKM. Kebanyakan bantuan pinjaman ini datang dari bank. Namun bunga yang diberikan oleh bank dirasa terlalu besar jadi banyak pelaku IKM enggan menjalin kerjasama dengan swasta.

Seperti yang disampaikan oleh para pelaku IKM dimana kerjasama dengan pihak swasta saat ini masih sangat kurang. Apalagi dalam dukungan keuangan, tidak ada bantuan secara sukarela yang diberikan oleh perusahaan besar seperti Gudang Garam. Gudang Garam merupakan perusahaan besar yang ada di Kediri, seharusnya dengan hadirnya Gudang Garam di Kota Kediri mampu berperan penuh dalam mengembangkan IKM di Kediri.

3) Peran Masyarakat

Semakin diakuinya kesuksesan pembangunan bergantung tidak hanya pada sektor swasta yang dinamis dan sektor publik yang efisien, tetapi pada sektor swasta yang aktif. Organisasi yang ada dimasyarakat biasanya disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau non-governmental

organizations (NGO) dalam konteks pembangunan juga disebut organisasi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat atau organisasi masyarakat. Dalam hal ini peran LSM adalah mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. LSM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Yayasan Bina Negeri.

a) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan diberikan oleh Yayasan Bina Negeri untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam berwirausaha. Berdasarkan tujuh jenis keunggulan komparatif dari LSM menurut Todaro (2006: 46-47) salah satunya adalah pengetahuan teknis khusus, dimana LSM nasional atau internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus daripada pemerintah (atau perusahaan) lokal. Dengan dimilikinya pengetahuan teknis khusus ini maka Yayasan Bina Negeri melakukan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan memberikan pelatihan manajemen usaha dari masalah pemasaran, menentukan harga pokok produk, pembukuan yang sederhana. Dengan memberi pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku IKM ini diharapkan dapat mengembangkan IKM dan pelaku IKM tidak mengalami permasalahan dalam manajemen usaha.

Selain memberikan pelatihan terhadap pelaku IKM Yayasan Bina Negeri juga memberikan pelatihan terhadap wirausaha baru, pelatihan yang diberikan mulai dari menggali ide bisnis sampai dengan membuat *business plan*. Dengan diberikan pelatihan terhadap wirausaha baru ini diharapkan dapat memberikan motivasi usaha tersendiri, membuat

mereka semakin percaya diri dalam berwirausaha. Pelatihan terhadap pelaku IKM dilakukan 3 kali dalam setahun.

IKM kota Kediri juga memiliki asosiasi tenun ikat dan asosiasi tahu dimana asosiasi ini juga merupakan perkumpulan dari pengusaha tenun ikat dan tahu yang berperan untuk sharing pengetahuan yang dimiliki kepada pelaku IKM yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Eusi Saedah dimana peran stakeholder dalam mengembangkan IKM salah satunya adalah asosiasi yang berperan dalam pendidikan dan pelatihan, dalam hal ini adanya asosiasi ini mengajarkan kepada pelaku IKM yang tidak mengerti dan bisa saling mengajari masalah teknis pembuatan tenun ikat dengan motif-motif yang lebih berinovasi. Sayangnya asosiasi tenun ikat kurang berjalan dengan lancar, seperti yang disampaikan Bapak anis bahwa asosiasi tidak berjalan seperti dulu lagi. Seharusnya adanya asosiasi bisa membantu satu sama lain antar pelaku IKM, tapi saat ini pelaku IKM tenun ikat cenderung berjalan sendiri dan jarang mengadakan perkumpulan.

b) Memberikan Konsultasi Bisnis

Peran Yayasan Bina Negeri selain memberikan pelatihan dan pendidikan juga memberikan konsultasi bisnis yang sangat berguna bagi para pelaku IKM. Konsultasi bisnis dilakukan secara gratis dengan mendatangkan konsultan yang berkompeten dibidangnya. Pelaku IKM jika memiliki permasalahan bisa langsung mendatangi kantor dan bisa

mengkonsultasikan permasalahannya dengan konsultan, baik dari permasalahan produksi, keuangan dan permasalahan IKM lainnya.

Dengan adanya konsultasi yang diberikan oleh Yayasan Bina Negeri ini maka diharapkan IKM mampu menyelesaikan permasalahannya dan mampu bertahan dengan usahanya. Namun permasalahan muncul saat pelaku IKM sendiri tidak pernah menyadari masalah yang dihadapinya. Akhirnya klinik UMKM yang dibangun oleh Yayasan Bina Negeri ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku IKM. Padahal akan sangat baik mengkonsultasikan permasalahan dengan pihak-pihak yang sudah berkompeten dibidangnya, dengan mengkonsultasikannya maka akan muncul ide-ide baru yang lebih inovatif lagi.

c) Pendampingan IKM

Pendampingan IKM ini dilakukan oleh Yayasan Bina Negeri kepada pelaku-pelaku IKM, dengan mendatangi tempatnya langsung, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam industri tersebut, serta memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendampingan IKM ini dilakukan untuk memaksimalkan peran klinik UMKM yang kurang dimanfaatkan oleh pelaku IKM.

d) Informasi

Informasi teknis diberikan oleh asosiasi-asosiasi tenun ikat maupun tahu, informasi berkaitan dengan adanya undangan pameran dari pemerintah, ataupun pelatihan dimana peran asosiasi memberikan informasi pada pelaku IKM lainnya. Dengan adanya asosiasi diharapkan dapat membentuk koperasi yang dapat dijadikan sebagai wadah langsung bagi para pelaku IKM untuk saling bekerjasama dalam memecahkan masalah. Dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan fasilitas dari pemerintah ataupun sektor swasta lainnya.

Seperti yang diungkapkan Syarif (1991:3) ada 2 pengembangan industri kecil yaitu perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu bentuk pengembangan industri kecil perangkat keras adalah penyediaan fasilitas bersama, misalnya koperasi sentra usaha pada sentra-sentra industri kecil. Berdasarkan pendapat tersebut sangat dibutuhkan koperasi sebagai salah satu bentuk fasilitas bersama. Dengan adanya koperasi diharapkan menjadi salah satu sarana untuk mempromosikan produk IKM yang ada. Dan saling memberi informasi satu sama lain baik dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman produksi lainnya. Koperasi juga mewujudkan rasa persaudaraan yang kuat dari pelaku IKM. Sayangnya Koperasi yang dulunya dibangun oleh IKM tenun ikat sekarang sudah tidak berfungsi seperti dulu. Kurangnya anggota koperasi membuat koperasi tidak dapat berdiri lagi.

2. Peningkatan Perekonomian Lokal

Pengembangan perekonomian lokal adalah mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institusional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk mencapai lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dengan mengembangkan IKM Kota Kediri diharapkan mampu meningkatkan perekonomian lokal daerah. Dengan memanfaatkan sumber daya daerah baik sumber daya alam maupun manusia diharapkan dapat mengembangkan IKM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri. Keberhasilan pengembangan perekomian lokal dapat dilihat dari:

1) Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha

Mengembangkan perekonomian lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan perusahaan-perusahaan lokal dengan kerjasama antara pemerintah, swasta dan LSM. Dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan lokal ini maka implikasi yang diharapkan adalah tumbuhnya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar perusahaan. Dengan meningkatnya kesempatan kerja ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Kediri.

Mengembangkan IKM merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang dapat ditimbulkan dari ketergantungan perekonomian Kota Kediri terhadap Industri besar seperti Gudang Garam. Mewujudkan

kemandirian perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan dari mengembangkan IKM Kediri. Semakin dimilikinya jiwa berwirausaha para pelaku IKM diharapkan dapat semakin mempertanggung perekonomian lokal Kota Kediri.

Tumbuhnya industri-industri baru di Kota Kediri diharapkan mampu mengatasi permasalahan pengangguran yang ada di Kota Kediri. Dengan adanya industri-industri baru ini maka peluang kerja yang diharapkan juga semakin meningkat. Seperti pendapat dari Irianto (1996) mengatakan bahwa salah satu peran industri kecil adalah perluasan tenaga kerja yang tiap tahun bertambah jumlahnya.

Senada dengan pendapat dari Irianto dimana kenyataan memeperlihatkan bahwa dengan adanya IKM tahu dan tenun ikat di Kota Kediri menciptakan lapangan kerja tersendiri bagi masyarakat sekitar. Semakin berkembang IKM tersebut maka akan semakin memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, dan semakin bertambahnya jumlah pegawai dari industri tersebut tiap tahunnya. Selain memberi peluang kerja bagi masyarakat sekitar adanya IKM juga mampu memberikan peluang bagi masyarakat untuk berusaha. Seperti yang telah dirasakan oleh Ibu Siti selaku pemilik industri tenun ikat Medali Mas, awalnya beliau memiliki pegawai yang tadinya bekerja di tempatnya akhirnya pegawainya itu mampu membuka usahanya sendiri. Sudah ada 3 pegawai dari Ibu Siti yang kini membuka usaha tenun ikatnya sendiri. Dengan melihat fakta ini dengan

mengembangkan IKM maka dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar yang dapat meningkatkan perekonomian lokal.

2) Perluasan Peningkatan Pendapatan

Berdasarkan pendapat Irianto (1996) peran industri kecil adalah meningkatkan penghasilan masyarakat secara merata. Ini berarti dengan meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat, juga dapat meningkatkan pendapatan bagi pegawai. Pendapatan pegawai akan meningkat saat produk yang dihasilkan juga meningkat, serta penjualan juga meningkat.

Hal ini seperti yang dirasakan oleh para pegawai tenun ikat dan tahu saat produk yang dihasilkan banyak maka pendapatan yang diperoleh akan banyak pula. Bekerja di Industri ini merupakan pekerja borongan dimana pendapatan dibagi beberapa orang yang ada dalam kelompok tersebut. Jika mendapatkan pesanan maka pendapatan yang didapat akan meningkat tidak seperti biasanya. Pendapatan yang didapat para pekerja ini tidaklah banyak, bahkan tidak mencapai Upah Minimum Regional (UMR) oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih memperhatikan permasalahan ini, bukan hanya pemerintah namun stakeholder lainnya juga harus memperhatikan permasalahan pendapatan ini.

Dengan memberikan kontak bisnis yang tepat, dan menggunakan pola subkontrak seperti yang telah diungkapkan Sjaifudin (1995: 66-75) dengan menggunakan pola subkontrak maka akan memberi manfaat yang positif bagi usaha kecil karena secara ekonomis usaha-usaha kecil menjadi subkontrak

akan memperoleh jaminan pasar kontinuitas produksi. Untuk mewujudkan pola subkontrak ini dibutuhkan peran dari *stakeholder*, untuk meningkatkan jumlah produk secara berkala, dan ini juga merupakan jaminan terhadap pendapatan yang akan diperoleh para pegawai.

3) Keberdayaan Lembaga Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Proses Produksi Dan Pemasaran

Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi ini terlihat dari berapa jumlah hasil produk yang mampu dihasilkan dan jumlah penjualan dari produk tersebut. Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil ini terlihat dari siapa saja pembeli dari produk tersebut, dengan kata lain tingkat pemasaran produk tersebut sudah sampai mana, hanya ditingkat lokal saja apa sudah nasional. Melihat data yang sudah dipaparkan di penyajian data sangat terlihat bahwa tingkat pemasaran dari produk sudah ditingkat nasional.

Produk yang dihasilkan oleh tenun ikat medali mas perharinya mencapai 30-35 tenun perharinya dengan jumlah pegawai 70 orang, dengan harga jual tenun yang bervariasi, tenun biasa dihargai Rp 130.000,- perpotong. Sedangkan yang berbahan semi sutra seharga Rp 200.000,- dan yang berbahan sutra seharga Rp 250.000,- Jumlah produk yang terjual dalam perharinya tidak tentu. Kebanyakan medali mas mendapatkan pesanan dari pelanggannya dan itu juga tidak pasti. Terkadang medali mas mampu mendapat pesanan hingga 100 tenun dari daerah lain.

Sama halnya dengan tenun ikat kurniawan dalam sehari tenun ikat kurniawan mampu menghasilkan kurang lebih 10-15 tenun ikat dengan jumlah pegawai 25 orang, harga jual tenun ikat kurniawan sama dengan tenun ikat medali mas. Saat ini tenun ikat kurniawan sedang menjalin kerjasama dengan salah satu pelanggannya dimana, pelanggan tersebut meminta untuk membuat produk tenun ikat dalam jumlah yang banyak dan akan dijual kembali. Berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh tenun ikat kurniawan ini merupakan salah satu pola kemitraan keagenan. Dengan semakin banyaknya penjualan yang dihasilkan maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap pendapatan perusahaan.

Sedangkan hasil produksi yang dapat dihasilkan oleh industri perharinya adalah 600 tahu dalam sehari. Kalau kondisi sedang sepi maka produk yang mampu terjual sekitar 400-500 tahu. Sedangkan sisa tahu biasanya akan diolah menjadi stik tahu (*snack*). Karena semakin meningkatnya persaingan dalam industri tahu ada baiknya jika industri tahu mikimos memiliki strategi yang mampu meningkatkan hasil penjualan produk tahu. Belum adanya persiapan terhadap persaingan dengan industri-industri baru yang ada akan membuat penjualan produk akan menurun dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka akan membuat perusahaan bangkrut. Kelemahan dari para pelaku IKM adalah mereka cenderung berwiraswasta tidak berwirausaha. Yang diperlukan sebenarnya adalah jiwa wirausaha yang mampu mengembangkan perusahaan lebih besar dengan inovasi dan kreatifitas yang ada. Pelaku IKM biasanya cenderung hanya memiliki jiwa

berwiraswasta dimana mereka mengandalkan penjualan produk yang hanya cukup buat makan saja atau dengan kata lain hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

4) Keberdayaan Kelembagaan Jaringan Kerja Kemitraan Antara Pemerintah, Usaha Swasta Dan Masyarakat Lokal

Adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan LSM untuk mengembangkan IKM merupakan salah satu indikator dari pengembangan perekonomian lokal. Kemitraan antara pemerintah dengan IKM sudah dilakukan melalui pengembangan produksi, memberikan fasilitas pemasaran, dan fasilitas keuangan, permodalan. Selain bekerjasama dengan pemerintah IKM juga bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan dan memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Salah satu pihak swasta yang berperan dalam mengembangkan IKM adalah Hotel Grand Surya. Dengan dimilikinya program CSR yang dimiliki oleh Hotel Grand Surya merupakan salah satu jalan untuk memperkenalkan produk unggulan kota kediri kepada masyarakat luas. Program CSR ini berjalan sementara sekitar 1 bulan. Sedangkan program kemitraan yang dimiliki oleh Hotel Grand Surya yang bekerjasama dengan tenun ikat Medali Mas ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan tujuan *sharing profit*, selain itu juga bertujuan untuk memperkenalkan produk tenun ikat bandar kidul kepada kalangan menengah keatas.

Kemitraan antara IKM tidak hanya dilakukan dengan Hotel Grand Surya saja tapi juga dengan usaha-usaha kecil lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara pemilik perusahaan tenun ikat kurniawan mengatakan bahwa pihaknya sedang menjalin kerjasama dengan pelanggannya yang berencana menjual kembali tenun ikat yang dihasilkan oleh tenun ikat kurniawas. Kerjasama ini disebut pola kemitraan keagenan. Berdasarkan UU No 9 tahun 1995 pola kemitraan keagenan adalah usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah dan usaha besar mitranya. Dalam hal ini pelanggan bisa disebut usaha kecil dan IKM tenun ikat kurniawan bisa disebut usaha menengah yang menghasilkan barang yang nantinya akan didistribusikan oleh usaha kecil.

Selain bekerjasama dengan pemerintah dan swasta IKM juga menjalin kerjasama dengan LSM yaitu Yayasan Bina Negeri. Peran LSM dalam hal ini adalah memberikan pendidikan dan pelatihan tentang manajemen produksi, pembukuan sederhana. Selain memberi pendidikan dan pelatihan Yayasan Bina Negeri juga memberikan konsultasi gratis dan pendampingan IKM. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh IKM dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

3. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Stakeholder

Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Kediri Melalui IKM

a. Faktor pendukung

1) Pembinaan Melalui Pelatihan

Adanya pembinaan yang dilakukan pemerintah melalui pelatihan, baik pelatihan produksi melalui pelatihan *packing* (kemasan) dan pembukuan. Merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas produk dari IKM. Memberikan konsultasi gratis tentang kemasan juga diberikan oleh Pemerintah Disperindagtamben, sehingga dapat meningkatkan kreatifitas pelaku IKM dalam mengemas produk yang menarik minat pelanggan. Selain memberikan pelatihan *packing*, dalam meningkatkan kualitas IKM tenun ikat juga memberikan pelatihan pencelupan secara alami, sehingga mendapatkan produk yang ramah lingkungan. Pelatihan pembukuan juga diberikan pemerintah terhadap pelaku IKM agar mereka bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Pelatihan dilakukan guna meningkatkan kemampuan pelaku IKM dalam mengembangkan IKM nya, dengan bekerjasama dengan LSM dan Lembaga perguruan tinggi yang lebih berpengalaman dibidangnya merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan pelaku IKM baik dari manajemen usaha, maupun teknis dan penguasaan teknologi. Sehingga mampu meningkatkan inovasi dari pelaku IKM supaya mampu bersaing. Inovasi sangat diperlukan, wirausaha dituntut untuk berinovasi terus menerus, karena perubahan pasar yang sangat cepat dan persaingan yang kompleks.

2) Kualitas Produk

Menurut Zimmerer (1996:117) dalam Hardjanto (2013:4) *strategi market driven* ada 6 yaitu orientasi konsumen, kualitas, kenyamanan dan

kesenangan, inovasi, kecepatan, pelayanan dan kepuasan pelanggan. *Strategi market driven* tersebut senada dengan startegi yang dilakukan oleh pelaku IKM. Menghasilkan produk berkualitas baik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penjualan produk. Dengan menggunakan bahan-bahan baku yang berkualitas dan membuat kemasan yang menarik pelanggan merupakan cara untuk mempertahankan pelanggan. Banyaknya pesaing dibidang yang sama, membuat persaingan semakin ketat, dengan menghasilkan produk yang memiliki kualitas dan inovasi yang baik merupakan strategi pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk. Selain meberikan kualitas produk yang baik, strategi lain yang dapat digunakan untuk mempertahankan pelanggan adalah memberikan pelayanan yang baik merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan. Menguatamakan kepuasan pelanggan merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan.

3) Adanya Event Kegiatan di Kediri

Tingkat penjualan produk dirasakan karena ada pengaruh event yang ada di Kota Kediri. Event pariwisata misalnya dengan adanya wisatawan yang datang ke Kota Kediri merupakan salah satu pendukung dalam penjualan produk. Dengan melihat dampak yang dihasilkan karena event pariwisata Kota Kediri ada baiknya pemerintah meningkatkan kunjungan pariwisata dengan membuat wisata-wisata baru di Kediri, sehingga akan meningkatkan penjualan produk IKM kota Kediri.

4) Kerjasama Pameran dengan Pihak Swasta dan Daerah Lain

Pameran merupakan salah satu strategi pemasaran dengan cara promosi tujuan promosi adalah agar produk dikenal konsumen. Menurut Hardjanto (2013:1) tujuan pemasaran adalah bukan mendapatkan pelanggan tapi memperbaiki situasi bersaing. Dalam hal ini wirausaha harus mampu menghasilkan produk berkualitas, dengan harga yang lebih murah dan penyerahan lebih cepat daripada pesaing. Dengan pameran yang dilakukan dengan hotel grand surya merupakan salah satu cara untuk mengenalkan produk pada masyarakat, kerjasama dengan hotel tidak hanya dalam bentuk pameran melainkan hubungan kemitraan yang sudah dilakukan selama setahun dengan tujuan *sharing profit*. Selain menjual produk juga dapat mengenalkan produk pada konsumen. Pameran juga dilakukan dengan daerah lain, mengikuti pameran yang diadakan oleh daerah lain merupakan salah satu cara untuk memperluas jaringan pemasaran ditingkat nasional.

b. Faktor penghambat

1) Keterampilan Pegawai

Keterampilan pegawai sangat berpengaruh terhadap produk yang akan dihasilkan. Namun saat ini kurangnya keterampilan pegawai menjadi salah satu faktor penghambat dari pengembangan IKM. Dalam sehari satu pegawai hanya mampu menghasilkan 1-2 tenun ikat saja, hal ini yang akan menghambat kapasitas produksi yang akhirnya berdampak

negatif terhadap kepuasan pelanggan. Adanya inovasi baru terhadap motif tenun ikat membuat pegawai juga mengalami kesulitan dalam menghasilkan produk yang diinginkan.

Keterampilan pegawai dalam skala home industri dan pembuatan produk secara tradisional merupakan hal yang harus diutamakan tanpa keterampilan tersebut maka akan sulit untuk menghasilkan produk dengan kualitas baik. Padahal faktor pendukung dari IKM ini adalah kualitas produk yang baik, namun jika pegawai tidak memiliki keterampilan dalam membuat produk maka akan menurunkan kualitas produk.

2) Teknologi Kurang

Teknologi kurang dirasakan sebagai salah satu penghambat produksi pasalnya karena kurangnya teknologi yang dimiliki pengrajin tahu maka akan berdampak tidak mampu bersaing dengan pengrajin tahu lainnya. Seharusnya pembinaan dan pelatihan untuk menguasai teknologi lebih diperdalam lagi. Karena saat ini persaingan sangat ketat, dan keinginan pasarpun sangat dinamis. Jadi pelaku IKM harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Porter menekankan pentingnya peranan teknologi, strategi/organisasi dan geografi ekonomi dalam proses inovasi dan upaya menjaga keunggulan kompetitif perusahaan secara berkelanjutan (Porter & Sovell, 1998 dalam Kuncoro, 2006:32). Berdasarkan pendapat porter bahwa dalam mendukung

aktifitas produksi sehingga perusahaan mampu menghadapi persaingan sangat diperlukan pengembangan teknologi.

Namun saat ini pengembangan teknologi yang dimiliki IKM Kota Kediri sangat kurang, dan mereka cenderung tidak memiliki jiwa wirausaha yang mampu bersaing dengan persaingan yang semakin dinamis saat ini. Dengan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan nantinya. Penggunaan teknologi dalam perusahaan sangat beragam, mulai dari penggunaan teknologi untuk menyiapkan dokumen dan mengantar barang sampai pada membantu jalannya proses peralatan atau produk itu sendiri. Faktor-faktor dalam pengembangan teknologi adalah penelitian dan pengembangan kegiatan yang efektif untuk proses dan inisiatif produk, kolaborasi positif antara Departemen Sumber Daya Manusia dengan departemen lain, Fasilitas dan penguasaan peralatan, karyawan yang mempunyai kualifikasi profesional yang baik, dan kemampuan untuk memenuhi tenggat waktu yang baik (Dess & Lumpkin (2003:77) dalam Kuncoro, 2006:49)

Dari data wawancara yang didapat bahwa saat ini IKM sendiripun belum sepenuhnya memiliki pengembangan teknologi yang baik. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya penguasaan dan keterampilan dari pegawai itu sendiri. Dengan kurangnya kemampuan keterampilan dari pegawai itu sendiri berdampak terhadap tidak mampunya IKM dalam memenuhi pemesanan yang banyak.

3) Faktor Cuaca

Dalam membuat produk yang notabenne menggunakan alat tradisional, dan pembuatan produk tenun ikat yang menggunakan tangan bukan mesin jadi proses pembuatan selain menghabiskan waktu yang lama juga memanfaatkan sumber energi dari alam. Faktor cuaca merupakan dampak eksternal yang dirasakan oleh pengrajin tenun ikat, pasalnya untuk menghasilkan warna setelah pencelupan diperlukan bantuan sinar matahari untuk mengeringkannya namun hal ini akan terkendala saat musim hujan datang, dan akhirnya akan memperlambat produktivitas produk.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis data yang diperoleh serta perbandingan terhadap teori yang diungkapkan oleh para ahli, yaitu:

1. Peran pemerintah dalam mengembangkan IKM dirasa sudah maksimal, dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan produk, memberikan fasilitas pameran baik ditingkat lokal maupaun nasional merupakan salah satu cara untuk mengenalkan produk IKM Kota Kediri kepada masyarakat luas, pameran merupakan salah satu cara promosi, dengan pameran juga akan meningkatkan tingkat pemasaran produk. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan permodalan kepada pelaku IKM melalui kredit bergulir dengan bunga yang sangat kecil. Namun yang dirasakan pelaku IKM tidak sama dengan yang diungkapkan oleh pemerintah, dimana pemerintah memberikan pelatihan secara rutin kepada pelaku IKM, namun yang dirasakan pelaku IKM adalah pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan sudah dulu sekali akhir-akhir ini pelatihan yang diberikan pemerintah tidak ada.
2. Peran swasta dalam mengembangkan IKM dirasa kurang, seperti yang diungkapkan oleh pelaku IKM bahwa swasta kurang berperan dalam pengembangan IKM. Dukungan keuangan yang seharusnya dapat dirasakan oleh pelaku IKM namun tidak sama sekali. Pinjaman modal yang diberikan oleh bank-

bank swasta dengan bunga yang dirasa terlalu besar membuat IKM enggan melakukan pinjaman. Kerjasama IKM dengan hotel grand surya merupakan salah peran swasta yang dapat dirasakan langsung oleh IKM tenun ikat. Selain kerjasama dengan hotel grand surya, IKM tenun ikat juga bekerja sama dengan toko-toko lain yang berperan sebagai agen. Dalam hal ini kerjasama bisa disebut kemitraan keagenan. Dimana IKM tenun ikat berperan sebagai usaha menengah yang menghasilkan produk yang akan didistribusikan oleh usaha kecil yaitu toko-toko (agen).

3. Peran LSM, seperti yang diungkapkan oleh direktur Yayasan Bina Negeri untuk mengembangkan IKM Yayasan Bina Negeri melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam manajemen usaha yang bekerjasama dengan Disperindagtamben dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri. Yayasan Bina Negeri juga memberikan konsultasi gratis kepada pelaku IKM dengan mendirikan klinik UMKM. Selain itu Yayasan Bina Negeri juga memberikan pendampingan terhadap IKM pendampingan dilakukan dengan terjun langsung ketempat produksi atau pabrik, dan mengidentifikasi masalah serta mencari solusi. Asosiasi tenun ikat merupakan perkumpulan dari tenun ikat yang memiliki peran untuk memberikan informasi pada pelaku tenun ikat jika ada undangan pameran ataupun pelatihan. Selain itu dengan adanya asosiasi ini pelaku IKM juga dapat saling berbagi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi dan *sharing* inovasi-inovasi terbaru untuk mengembangkan IKM tenun ikat. Dahulu tenun ikat juga memiliki koperasi yang menjadi sarana untuk mendapatkan bantuan peralatan dari pemerintah, namun dikarenakan anggota yang kurang maka

koperasi jadi tidak berjalan. Adanya koperasi juga merupakan salah satu cara untuk memberikan bantuan modal terhadap para anggotanya, dan bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan pesanan besar.

4. Peningkatan perekonomian lokal dapat dilihat dari 4 indikator yaitu:

- a) Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan berusaha, adanya peningkatan jumlah IKM dari tahun ke tahun di Kota Kediri berdampak positif terhadap kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Faktanya setiap tahun jumlah IKM meningkat, selain jumlah IKM semakin berkembangnya industri maka akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pegawai. Dan hal itu terbukti di Industri tenun ikat hampir setiap tahun industri ini selalu menambah pegawai. Berbeda dengan industri tahu jumlah pengrajin tahu akan berkurang selama tingkat penjualan tidak meningkat. Dengan adanya IKM selain membuka lapangan kerja juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usaha baru, hal ini terbukti dengan adanya mitra binaan dari tenun ikat medali mas.
- b) Perluasan kesempatan bagi si miskin untuk meningkatkan pendapatan, dengan adanya pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, maka juga akan berdampak pada kesempatan mendapatkan pendapatan. Meski pendapatan yang didapat tidak sesuai dengan UMR kota Kediri namun hal ini bukan menjadi alasan bagi para pegawai untuk berhenti. Karena kemampuan yang dimiliki dan lokasi pekerjaan yang tidak jauh menjadi

- alasan bagi pegawai tetap bertahan, dengan gaji yang hanya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- c) Keberdayaan lembaga usaha ‘mikro dan kecil’ dalam proses produksi dan pemasaran, keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran dapat dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan dan jumlah produk yang terjual. Dari tahun-ketahun jumlah produk yang dihasilkan tenun ikat selalu meningkat seiring dengan bertambahnya pegawai. Dengan banyaknya pesanan membuat produksi meningkat, dan tingkat pemasaran saat ini tidak hanya dilokal saja namun tingkat nasional. Berbeda dengan industri tahu, hasil produk yang dihasilkan perhari kurang lebih 600 tahu yang terjual sekitar 400-500 tahu hal ini dikarenakan sifat industri hanya oleh-oleh jadi penjualan akan meningkat saat ada event di Kediri misalnya saat liburan dan lebaran.
- d) Keberdayaan ‘kelembagaan jaringan kerja’ kemitraan antara pemerintah, usaha swasta dan masyarakat lokal, adanya hubungan kemitraan antara pemerintah, swasta dan LSM dalam pengembangan IKM hubungan kemitraan ini hanya sebatas pelatihan dan pameran.

B. Saran

Untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui IKM diperlukan peran *stakeholder* yang maksimal, saat ini bisa dikatakan bahwa IKM Kota Kediri mengalami peningkatan jumlah, namun peran dari *stakeholder* saat ini dirasa kurang dan sinergi anantara ketiganya kurang maksimal, seharusnya baik pemerintah, swasta maupun LSM sendiri dalam mengembangkan IKM saling

bekerjasama dan berjalan bersama untuk meningkatkan perekonomian lokal. Seperti yang kita ketahui kerjasama antara ketiga sektor kurang dan cenderung berjalan sendiri-sendiri dampaknya adalah pengembangan IKM kurang maksimal yang berdampak pada perekonomian lokal. Untuk mewujudkan sinergi antara ketiga sektor tersebut diperlukan:

1. Pemerintah harus tetap konsisten menjaga hubungan dengan IKM meski IKM sudah maju dan berkembang namun tetap perlu pendampingan agar bisa bertahan didalam persaingan. Menciptakan kondisi yang kondusif agar perekonomian tetap berjalan baik, meningkatkan jumlah wisatawan dengan menciptakan tempat wisata yang menarik di Kediri sehingga produk IKM yang bersifat oleh-oleh akan tetap berkembang dan mampu bersaing. Memberikan pelatihan penguasaan teknologi dan teknis dalam menciptakan inovasi baru sehingga pelaku IKM dan produknya mampu bersaing. Pemerintah juga harus menjalin kerjasama dengan swasta baik dalam memberikan pelatihan dan pembinaan bagi para pelaku IKM membuat kebijakan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

2. Peran swasta yang lebih berpengalaman dalam bidang produksi maupun pemasaran seharusnya lebih banyak lagi. Pemerintah seharusnya dapat membuat kebijakan yang dapat mengikat swasta sehingga mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan IKM. Meningkatkan program CSR maupun kemitraan dengan para pelaku IKM. Pemerintah seharusnya dapat membuat kebijakan yang dapat mengikat swasta sehingga mampu memberikan

kontribusi untuk mengembangkan IKM. Meningkatkan program CSR maupun kemitraan dengan para pelaku IKM

3. LSM di Kota Kediri sangat banyak namun peran mereka masih kurang dalam mengembangkan IKM, seharusnya lembaga perguruan tinggi di Kota Kediri lebih aktif dalam memberikan pelatihan kepada pelaku IKM. Sebagai bentuk pengabdianya terhadap masyarakat.

4. Industri Kecil Menengah, jiwa wirausaha dari pelaku IKM seharusnya lebih ditanamkan sehingga mereka bisa bertahan dalam persaingan. Memanfaatkan semua teknologi yang ada sehingga dapat meningkatkan penjualan, memanfaatkan asosiasi dengan menjadikannya sebagai sarana sharing dan saling membantu, memberikan kesempatan kepada industri lain untuk mendapatkan pesanan, saat mendapatkan pesanan banyak.

5. Peran *stakeholder* dalam pengembangan IKM seharusnya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat berjalan selaras dan bersinergi. Peran pemerintah dalam mengembangkan IKM adalah membuat formulasi dan penetapan kebijakan dalam mengembangkan IKM agar dapat dikenal oleh masyarakat luas dan tidak hanya ditingkat lokal, yang bekerjasama dengan pihak swasta dan LSM, mengimplementasi kebijakan, memonitoring dan mengevaluasi kebijakan untuk mengembangkan IKM. Peran Swasta memberikan kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi. Peran swasta ini juga bisa dalam bentuk konsultasi, temu bisnis, memberi dukungan keuangan dengan bunga yang kecil, serta dukungan pemasaran. Peran LSM dalam mengembangkan IKM adalah partisipasi dalam

formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi. Yang dimaksud LSM disini adalah media (TV, Radio, Film, Surat Kabar), dan Lembaga perguruan tinggi pemerintah membuat kebijakan yang notabene mampu memberikan kontribusi terhadap promosi produk melalui media, dan hal tersebut bisa dilakukan secara gratis untuk mempromosikan produk IKM, selain sebagai salah satu bentuk promosi juga merupakan dukungan dari pihak media dalam bentuk kemitraan. Lembaga perguruan tinggi di Kota Kediri lebih aktif dalam memberikan pelatihan baik dari segi teknologi ataupun manajemen bisnis kepada pelaku IKM, sebagai bentuk pengabdianya terhadap masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: FE UGM.
- Bogdan, Robert C. Dan Steven J. Taylor, 1992, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach in the Social Sciences*, alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons, Surabaya, Usaha Nasional
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hafsah, Mohammad Jafar, Dr. Ir. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan strategi* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Hardjanto, Imam. 2010. *Teori Pembangunan*. Buku Ajar FIA UNIBRAW. Malang: Pasca Sarjana FIA-UB.
- Hardjanto, Imam. 2013. *Kapita Selekta Kewirausahaan*. Buku Ajar FIA UNIBRAW. Malang: FIA-UB
- Harsono, Boedi. 2006. *Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Media Pustaka.
- Hetifah, Sumarto, Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance "20 Pakarsa Inovatif Dan Partisipasi Indonesia"*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora: Bandung
- Indradi, Sjamsiar Sjamsudin. 2006. *Dasar-Dasar Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN
- Irawan, Drs, M.B.A dan Suparmoko, Drs, M.A, Ph.D. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPSE Yogyakarta
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pusaka Cidesindo
- Kuncoro, Mudrajad. Ph.D. 2005. *Startegi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, Ety Puji. 2010. *Penguatan Ekonomi Industri Kecil dan Menengah Melalui Platform Klaster Industri*. Jurnal. pdf

Ma'rif, Samsul. 2002. *Ekonomi Wilayah dan Kota, Ekonomika dalam Perencanaan Identifikasi Sektor Strategis*. Semarang: Diktat Kuliah PWK UNDIP.

Mubyarto. 1993. *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES

Muluk, Khairul M.R, Dr. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press

Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Prawirokusumo, Soeharto. 2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Rohmad, Zaini, Sudarmo, dan Siany Indria Liestyasari. 2009. *Kebijakan kemitraan publik, privat dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Saleh, Irsan Ashari, 1986. *Industri Kecil: sebuah tujuan dan perbandingan*. Jakarta: LP3ES.

Saedah, Euis. 2013. *Industri Kecil dan Menengah Komponen sebagai Rantai Nilai Industri Manufaktur*. ppt

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance "Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Rekstrukturasasi dan Pemberdayaan"*. Bandung: CV. Mandar Maju

Siagian, Sondang, P. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sinambela, L.P. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Sjaifudian, Hetifah, dkk. 1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usah Kecil*. Bandung: AKATIGA

Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sulistiyanti. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemembrdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Suparmoko, Drs, Ph.D, M.A. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Supriyadi, Ery. 2007. *Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme Dalam Praktek Pendekatan PEL*. Bandung: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 18 No 2
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya (UB) Press
- Susanti, Etika Ari, dkk. *Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. Malang: Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 No. 4
- Suseno, T. W, dkk. 2005. *Responsisi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam Perekonomian Nasional*. Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.
- Syarif, Rusli. 1991. *Produktifitas*. Jakarta: Depdikbud.
- Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba
- Todaro, Michael.P & Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Dialihbahasakan oleh Haris Munandar & Puji. Jakarta: Erlangga.
- Admin. *Pengembangan Ekonomi Lokal*. Diakses Pada Tanggal 16 September 2013 dari <http://perencanaankota.blogspot.com/2013/02/pengembangan-ekonomilokal.html>
- Mubyarto, Institute. 2010. *Ringkasan Eksekutif Semiloka Pengembangan Model Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan Kota Kediri*. Diakses Pada Tanggal 16 September 2013 dari <http://mubyarto.org/artikel.php?parameter=311>
- Pemerintah Kota Kediri. 2013. *Potensi Industri Kota Kediri*. Di Akses Pada Tanggal 16 September 2013 dari www.kedirikota.go.id/read/Investasi/110/1/25/Industri.html

Pemerintah Kota Kediri. 2013. *Produk Unggulan*. Diakses Pada Tanggal 16 September 2013 dari www.kedirikota.go.id/read/Investasi/109/1/25/Produk%20Unggulan.html

Saptowalyono, Cyprianus Anto. 2003. *Industri Kecil Belum Sadari Dampak Pasar Tunggal ASEAN*. Diakses Pada Tanggal 16 September 2013 dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/03/22/23015583/Industri.Kecil.Belum.Sadari.Dampak.Pasar.Tunggal.ASEAN>

-----, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

-----, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

-----, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

-----, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan



CURRICULUM VITAE

Nama : RISCHI AGUSTINA
 Nomor Induk Mahasiswa : 105030113111002
 Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 31 Agustus 1992
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Email : rieschiey@gmail.com
 Jenis Kelamin : Perempuan

Riwayat Pendidikan:

Periode			Sekolah/Universitas	Jurusan
1998	-	2004	SDN 1 PLOSOKLATEN	-
2004	-	2007	SMPN 1 PLOSOKLATEN	-
2007	-	2010	SMAN 1 PARE	IPS
2010	-	Sekarang	UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG	Administrasi Publik

